

JADWAL

Tanggal Efektif	:	16 Maret 2018	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	27 Maret 2018
Masa Penawaran Umum	:	19-20 Maret 2018	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	22 Maret 2018	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	21 Maret 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	26 Maret 2018	- Pasar Tunai	:	24 Maret 2021
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	26 Maret 2018	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	27 September 2018
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	27 Maret 2018	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	27 Maret 2021
			Masa Berlaku Waran Seri I	:	27 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 53/POJK.04/2017.

PT JAYA TRISHINDO TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT JAYA TRISHINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :

Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1/1A – Jakarta Barat 11620
 Telepon: (021) 58900022 ; Faksimili: (021) 58900033
 Email : corsec@jatigroup.com ; Website : www.jatigroup.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp27.500.000.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,97% (dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan 27 Maret 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA KEUANGAN DARI ENTITAS ANAK. JIKA KINERJA KEUANGAN ENTITAS ANAK MENURUN, MAKA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN JUGA AKAN MENURUN.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Jaya Trishindo Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat 003/SK/JT/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 12 Februari 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	12
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
IV. FAKTOR RISIKO.....	32
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	35
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	36
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	36
2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM.....	45
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	49
4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	51
5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA.....	56
6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	61
7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	62
8. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	67
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	80
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	81
IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	83
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	89
XI. LAPORAN KEUANGAN	107

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Yang dimaksud afiliasi adalah: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebuthubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
BAE	: Biro Administrasi Efek
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, serta Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Bursa Efek	: Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh BEI.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)	: Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Entitas Anak	: Perusahaan dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan saham diatas 50% dan dikendalikan sepenuhnya oleh Perseroan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS)	: Berarti suatu formulir yang mengkonfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)	: Berarti salinan asli dari formulir pemesanan pembelian terkait Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap mana harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan, dan diajukan oleh calon pembeli kepada para Penjamin Emisi Efek, dan agen penjualan (jika ada) pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga tiap saham yang ditawarkan, melalu Penawaran Umum yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp110 (seratus sepuluh Rupiah).
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Berarti harga pelaksanaan Waran Seri I yaitu Rp400 (empat ratus Rupiah)
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi saham bertugas mengadministrasikan saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di KSEI pada penitipan kolektif.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan atas penjualan saham yang ditawarkan yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas saham-saham melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, namun tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan maksimal 5 (lima) Hari Kerja.

- Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
- Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- Pemerintah : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- Penawaran Umum atau Penawaran Umum Saham Perdana : Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat dengan mengingat syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan tata cara yang diatur dalam UUPM dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek (apabila ada) yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan dan akan bertanggung jawab, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.E.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan No. IX.E.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.25/2017 : Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 32/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No.56/2015 : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan OJK No.53/2017 : Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah

Peraturan OJK No.54/2017	: Berarti Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No 13 tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 16 tanggal 7 Februari 2018, yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 21 tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris Pengganti pengganti Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-00895/BEI.PP1/02-2018 ,yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Februari 2018.
Perjanjian Penerbitan Waran Seri I	: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.15 tanggal 12 Januari 2018 yang telah diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.17 tanggal 7 Februari 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.22 tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., Notaris Pengganti pengganti Fathiah Helimi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 14 tanggal 12 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 16 tanggal 12 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	: Berarti PT Jaya Trishindo Tbk
Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, yang syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan dan Penjamin Emisi Efek termasuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan No. 23/POJK.04/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SKS	: Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

- Tanggal Pengembalian : Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Saham Perdana dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Saham Perdana.
- Tanggal Penjatahan : Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan.
- TDP : Berarti Tanda Daftar Perusahaan.
- UU Pasar Modal : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UU Perseroan Terbatas : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Waran : Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk.

I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp 27.500.000.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham biasa atas nama yang ditawarkan, seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 21,97% (dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) saham baru Perseroan, berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan 27 Maret 2021. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).



PT JAYA TRISHINDO Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal melalui Entitas Anak

Kantor Pusat :

Perkantoran Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E1/1A, Jakarta Barat 11620
Telepon : (021) 58900300 ; Faksimili : (021) 58900033
Email : corsec@jatigroup.com ; Website : www.jatigroup.com

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KINERJA KEUANGAN DARI ENTITAS ANAK. JIKA KINERJA KEUANGAN ENTITAS ANAK MENURUN, MAKA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN JUGA AKAN MENURUN. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 6 tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0000120.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0000758.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Startel Communication	398.300.000	39.830.000.000	70%
2. PT Komala Tri Varia	170.700.000	17.070.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	569.000.000	56.900.000.000	100%
Saham dalam Portepel	1.631.000.000	163.100.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Startel Communication	398.300.000	39.830.000.000	70,00%	398.300.000	39.830.000.000	48,63%
2. PT Komala Tri Varia	170.700.000	17.070.000.000	30,00%	170.700.000	17.070.000.000	20,84%
3. Masyarakat				250.000.000	25.000.000.000	30,53%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	569.000.000	56.900.000.000	100,00%	819.000.000	81.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.631.000.000	163.100.000.000		1.381.000.000	138.100.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 21,97% (dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjataan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Jaya Trishindo Tbk No. 15 tanggal 12 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp 400 (empat ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			%	Setelah Pelaksanaan Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000		2.200.000.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1.PT Startel Communication	398.300.000	39.830.000.000	48,63%	398.300.000	39.830.000.000	42,19%
2. PT Komala Tri Varia	170.700.000	17.070.000.000	20,84%	170.700.000	17.070.000.000	18,08%
3.Masyarakat	250.000.000	25.000.000.000	30,53%	375.000.000	37.500.000.000	39,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	819.000.000	81.900.000.000	100,00%	944.000.000	94.400.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	1.381.000.000	138.100.000.000		1.256.000.000	125.600.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.

- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 400 (empat ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.

- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:

1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolakannya permohonan untuk pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Cabang Daan Mogot, Jakarta Barat
Atas nama PT Jaya Trishindo
No. Rek. 1333111999

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan / atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. : (021) 29745222, Fax. : (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 569.000.000 (lima ratus enam puluh sembilan juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 819.000.000 (delapan ratus sembilan belas juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 12 Februari 2018 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh PT Startel Communication dan PT Komala Tri Varia, sebagai pemegang saham lama Perseroan, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

1. PT Startel Communication berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2018 menyatakan: PT Startel Communication ("STC") pemegang 70% saham Perseroan
 - a) Berdasarkan Akta No.4 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, STC memperoleh saham Perseroan sebanyak 32.053 (tiga puluh dua ribu lima puluh tiga) lembar saham yang dilakukan dengan cara jual beli dengan Bapak Edwin Widjaja diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp32.053.000.000 (tiga puluh dua miliar lima puluh tiga juta Rupiah).
 - b) Berdasarkan Akta No.31 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H, pengganti Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta,
 - i) STC memperoleh saham Perseroan sebanyak 5.502 (lima ribu lima ratus dua) lembar saham yang diperoleh dari kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016, diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp5.502.000.000 (lima miliar lima ratus dua juta Rupiah).
 - ii) STC memperoleh saham Perseroan sebanyak 2.275 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang diperoleh dengan menyeter uang tunai, diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp2.275.000.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh STC setelah *stock split* pada tanggal 5 Januari 2018 dan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum tanggal 22 Januari 2018 adalah sebesar 398.300.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu) lembar saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 39.830.000.000 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah).

Dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif, STC menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

2. PT Komala Tri Varia berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 19 Januari 2018 menyatakan:

PT Komala Tri Varia ("KTV") pemegang 30% saham Perseroan

- a) Berdasarkan Akta No.4 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,
 - i) KTV memperoleh saham Perseroan sebanyak 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) lembar saham yang dilakukan dengan cara jual beli dengan Bapak Edwin Widjaja diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp13.712.000.000 (tiga belas miliar tujuh ratus dua belas juta Rupiah);
 - ii) KTV memperoleh saham Perseroan sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham yang dilakukan dengan cara jual beli dengan Bapak Leonard Chendra diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).
- b) Berdasarkan Akta No.31 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Dahlia, S.H, pengganti Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta,
 - i) KTV memperoleh saham Perseroan sebanyak 2.358 (dua ribu tiga ratus lima puluh delapan) lembar saham yang diperoleh dari kapitalisasi saldo laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016, diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp2.358.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta Rupiah).
 - ii) KTV memperoleh saham Perseroan sebanyak 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham yang diperoleh dengan menyetero uang tunai, diharga nominalnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham (sebelum *stock split* 1:10.000). Jumlah nilai transaksi sebesar Rp975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh KTV setelah *stock split* pada tanggal 5 Januari 2018 dan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum tanggal 22 Januari 2018 adalah sebesar 170.700.000 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 17.070.000.000 (tujuh belas miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif, KTV menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh sahamnya di Perseroan.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL DISTRIBUSI SAHAM, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN, KECUALI WARAN SERI I SESUAI KETENTUAN PENERBITAN WARAN PADA BAB INI

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal di Entitas Anak yaitu PT Komala Indonesia pada nilai nominal. Demikian juga dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal di Entitas Anak pada nilai nominal.

Berikut proforma modal Entitas Anak sebelum dan sesudah Perseroan meningkatkan penyertaan dari dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Sebelum Peningkatan Penyertaan Perseroan			%	Setelah Peningkatan Penyertaan Perseroan Dari Hasil IPO	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000		220.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Jaya Trishindo	56.431	56.431.000.000	99,00%	80.778	80.778.000.000	99,30%
2. Edwin Widjaja	569	569.000.000	1,00%	569	569.000.000	0,70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	57.000	57.000.000.000	100,00%	81.347	81.347.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	163.000	163.000.000.000		138.653	138.653.000.000	

Berikut proforma modal Entitas Anak sebelum dan sesudah Perseroan meningkatkan penyertaan dari dana hasil Pelaksanaan seluruh Waran Seri I :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham					
	Sebelum Peningkatan Penyertaan Perseroan Dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I			%	Setelah Peningkatan Penyertaan Perseroan Dari Hasil Pelaksanaan Seluruh Waran Seri I	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000		220.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Jaya Trishindo	80.778	80.778.000.000	99,30%	130.778	130.778.000.000	99,57%
2. Edwin Widjaja	569	569.000.000	0,70%	569	569.000.000	0,43%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.347	81.347.000.000	100,00%	131.347	131.347.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	138.653	138.653.000.000		88.653	88.653.000.000	

Selanjutnya oleh Entitas Anak:

a) dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan untuk kebutuhan:

1. Investasi (*capital expenditures*) sebesar 60% berupa:
 - a) Uang muka pembelian 1 unit helikopter bekas tipe AS 350 B3;
 - b) Uang muka pembelian 1 unit helikopter baru tipe AW 109 Trekker; dan
 - c) Pembuatan hangar.
2. Modal kerja (*working capital*) sebesar 40%, antara lain untuk pembelian bahan bakar *avtur*, *spareparts* helikopter, biaya pemeliharaan helikopter, gaji pilot dan *crew*, biaya asuransi, biaya pelatihan pilot dan *crew*, dan lainnya yang berhubungan dengan modal kerja.

b) dana yang diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk kebutuhan modal kerja seperti pembelian bahan bakar *avtur*, *spareparts* helikopter, biaya pemeliharaan helikopter, gaji pilot dan *crew*, biaya asuransi, biaya pelatihan pilot dan *crew*, dan lainnya yang berhubungan dengan modal kerja.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan / atau perusahaan pembiayaan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan transaksi tertentu, transaksi material dan / atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan / atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 11,47% dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 4,80% yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,50%
 2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 3,80%
 3. Biaya jasa penjualan sekitar 0,50%
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 4,85% yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 3,58%
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,80%
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,47%
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,60%
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0.84%.
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,38%, yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir - formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*, dan biaya lainnya.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XI dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 (diaudit) dan 2016 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak diaudit atau direviu dan (b) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 16 April 2007, dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup. Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1/1A – Jakarta Barat 11620.

Melalui Entitas Anak Perseroan yang bernama PT Komala Indonesia, Perseroan menjalankan kegiatan usaha angkutan udara niaga tak berjadwal, yaitu penyewaan pesawat helikopter.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Perseroan dimana 95% sumber pendapatan berasal dari Entitas Anak, maka faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk penyediaan armada helikopter dan tingkat utilisasi pemakaian

Entitas Anak yang usahanya menyewakan helikopter, maka usahanya tergantung pada seberapa banyak pelanggan yang dapat dilayani dengan helikopter yang tersedia. Penyediaan helikopter bisa dengan cara investasi atau sewa dari pihak lain. Jika inventasi maka harus dikaji dengan hati-hati untuk menghindari investasi yang berlebihan. Jika sewa dari pihak lain, maka harus dipastikan mengenai kondisi helikopter dan kelaikudaraannya.

Jumlah pemakaian per jam per helikopter juga mempengaruhi kepada hasil usaha Entitas Anak. Semakin banyak jumlah jam terbang helikopter berarti jumlah pendapatan semakin banyak.

b. Mutu layanan yang diberikan kepada pelanggan penyewa

Entitas Anak sebagai perusahaan jasa, harus selalu menjaga mutu layanan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga pelanggan penyewa merasa nyaman, aman dan menjadi pelanggan yang loyal. Kondisi pesawat harus selalu baik, bersih, kelaikudaraan harus selalu diperiksa. Pilot dan crew harus melayani pelanggan dengan baik, sopan dan ramah.

c. Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik

Faktor kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik sangat penting sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang padat modal.

Sampai sekarang Perseroan mampu mendapatkan pendanaan dengan pinjaman dari bank dan perusahaan pembiayaan.

d. Perubahan perilaku konsumen

Sehubungan dengan berkembangnya teknologi informasi, akses konsumen terhadap informasi mengenai layanan penggunaan helikopter semakin mudah diperoleh. Saat ini pengguna helikopter semakin beragam dari sebelumnya hanya korporasi besar seperti perusahaan pertambangan, minyak dan gas, sekarang kalangan individu seperti tokoh masyarakat, kalangan artis dan eksekutif perusahaan telah menggunakan jasa layanan helikopter untuk kegiatannya. Dengan demikian pendapatan atas jasa layanan penyewaan helikopter dapat berasal dari beragam *customer*.

e. Perkembangan aktivitas pemasaran

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, aktivitas pemasaran Perseroan masih sama yaitu dilakukan melalui *networking* dan promosi melalui *website*. Kedepannya media promosi Perseroan juga akan menggunakan media sosial lainnya.

f. Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada *competitor*

Perubahan yang dilakukan oleh *competitor* bisa berdampak pada kegiatan usaha Perseroan, oleh sebab itu Perseroan harus mampu mengantisipasi bila ada perubahan yang dilakukan oleh *competitor*.

g. Perubahan tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada kinerja Perseroan sehubungan dengan penggunaan kredit dari bank dan perusahaan pembiayaan.

h. Kondisi ekonomi dan valuta asing

Kondisi makro ekonomi bisa mempengaruhi terhadap kegiatan usaha Entitas Anak karena di Indonesia, pengguna helikopter masih didominasi oleh korporasi, bila ekonomi berkontraksi atau resesi maka korporasi akan berhemat, salah satunya berhemat dalam penggunaan helikopter atau mengajukan penawaran harga yang lebih murah, sehingga bisa menurunkan tingkat laba. Sebaliknya bila kondisi ekonomi membaik dan bertumbuh, pengguna helikopter bukan hanya korporasi tetapi juga individu, seperti untuk wisata udara atau para eksekutif perusahaan yang bermaksud melakukan perjalanan bisnis dengan lebih cepat.

Perubahan kurs valuta asing, seperti Dollar Amerika Serikat (USD) atau Euro Eropa (EUR) juga akan berpengaruh terhadap kinerja Entitas Anak. Untuk penyediaan pesawat dengan investasi yang dibiayai pinjaman bank, biasanya dalam pinjaman USD. Sementara untuk penyediaan dengan menyewa dari operator lain atau sewa guna usaha dari luar negeri, biasanya menggunakan USD dan EUR.

i. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja

- Melakukan *customer feedback*;
- Terus menerus meningkatkan kualitas layanan jasa yang diberikan kepada *customer*;
- Meningkatkan kualitas manajemen;
- Terus mencari sumber pendanaan dengan *cost of fund* yang lebih murah.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi pada tanggal 7 Februari 2018 sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak diaudit atau direviu, (b) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN	87.702.963.102	50.786.001.580	71.390.391.829	49.978.472.430
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(66.780.085.714)	(40.826.560.964)	(53.830.373.315)	(29.544.896.284)
LABA BRUTO	20.922.877.388	9.959.440.616	17.560.018.514	20.433.576.146
Beban Usaha	(4.468.858.616)	(3.567.359.758)	(5.258.966.067)	(4.400.783.331)
Pendapatan operasi lain	1.113.604.791	3.834.046.556	3.834.046.556	-
Beban operasi lain	(360.441.574)	-	-	-
Rugi selisih kurs - neto	(3.173.111.236)	(367.284.753)	(726.338.368)	(2.738.247.816)
LABA USAHA	14.034.070.753	9.858.842.661	15.408.760.635	13.294.544.999
Penghasilan keuangan	27.430.228	9.428.203	20.106.993	20.581.412
Biaya keuangan	(9.890.370.655)	(5.817.780.031)	(9.702.879.064)	(8.963.151.874)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4.171.130.326	4.050.490.833	5.725.988.564	4.351.974.537
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(927.916.370)	(820.028.477)	(1.345.848.667)	(260.923.508)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.243.213.956	3.230.462.356	4.380.139.897	4.091.051.029
Penghasilan komprehensif lain – neto setelah pajak	41.383.253	(11.129.219)	(14.838.959)	7.085.467
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	3.284.597.209	3.219.333.137	4.365.300.938	4.098.136.496

Pendapatan

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pendapatan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 36.916.961.522 atau 72,69% dari Rp 50.786.001.580 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 87.702.963.102 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kebutuhan penyewaan helikopter untuk penanganan siaga darurat bencana asap dan semakin membaiknya stabilitas keamanan yang menyebabkan kegiatan ekonomi meningkat sehingga juga berimbas pada peningkatan frekuensi perjalanan.

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 21.411.919.399 atau 42,84% dari Rp 49.978.472.430 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 71.390.391.829 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi perekonomian Indonesia yang semakin stabil dan semakin meningkatnya kebutuhan penggunaan jasa sewa helikopter dimana Entitas Anak sebagai salah satu Perusahaan Jasa Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal atau Penyewaan Helikopter.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 25.953.524.750 atau 63,57% dari Rp 40.826.560.964 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 66.780.085.714 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Kenaikan ini mengikuti kenaikan pendapatan sewa secara proporsional, walaupun tidak berbanding lurus dan lebih rendah dari kenaikan pendapatannya. Dengan kenaikan pengguna jasa sewa helikopter maka biaya langsung atas penggunaan helikopter ikut meningkat antara lain seperti bahan bakar, honor pilot, pemakaian perlengkapan terbang, biaya ijin terbang dan mendarat, dan biaya langsung lainnya.

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 24.285.477.031 atau 82,20% dari Rp 29.544.896.284 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 53.830.373.315 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan sewa operasi pesawat untuk memenuhi permintaan pelanggan dan adanya peningkatan utilisasi helikopter sehingga terjadi banyak penggantian suku cadang dan perawatan pada helikopter untuk menjaga kualitas pesawat dalam kondisi layak terbang dan mengutamakan keselamatan penumpang.

Laba Bruto

Laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan laba bruto periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba bruto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 10.963.436.772 atau 110,08% dari Rp 9.959.440.616 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi sebesar Rp 20.922.877.388 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini merupakan akibat kenaikan pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian tambahan helikopter dan meningkatnya efisiensi biaya Perseroan.

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 2.873.557.632 atau 14,06% dari Rp 20.433.576.146 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 17.560.018.514 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh bertambahnya beban pokok pendapatan untuk biaya suku cadang dan perawatan atas tambahan armada helikopter dan untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan maka Perseroan memberikan potongan harga khusus yang menyebabkan laba kotor menurun.

Beban Usaha

Beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 901.498.858 atau 25,27% dari Rp 3.567.359.758 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi sebesar Rp 4.468.858.616 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya transportasi dan perjalanan dinas, dan biaya jasa profesional.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 858.182.736 atau 19,50% dari Rp 4.400.783.331 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp 5.258.966.067 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan karyawan serta biaya pajak dan perijinan.

Rugi Selisih Kurs – Neto

Rugi selisih kurs - neto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan rugi selisih kurs - neto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Rugi selisih kurs - neto untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 2.805.826.483 atau 763,94% dari Rp 367.284.753 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 3.173.111.236 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Euro Eropa sehingga berdampak negatif terhadap Perseroan yang memiliki utang dalam mata uang asing.

Rugi selisih kurs - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan rugi selisih kurs - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Rugi selisih kurs - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 2.011.909.448 atau 73,47% dari Rp 2.738.247.816 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 726.338.368 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan Euro Eropa sehingga berdampak positif terhadap Perseroan yang memiliki utang dalam mata uang asing.

Laba Usaha

Laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 4.175.228.092 atau 42,35% dari Rp 9.858.842.661 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 14.034.070.753 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan atas penyewaan helikopter karena penambahan armada.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 2.114.215.636 atau 15,90% dari Rp 13.294.544.999 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 15.408.760.635 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penurunan rugi selisih kurs.

Penghasilan Keuangan

Penghasilan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Penghasilan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 18.002.025 atau 190,94% dari Rp 9.428.203 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 27.430.228 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga karena kenaikan jumlah dana yang ditempatkan pada rekening bank.

Penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 20.106.993 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan penghasilan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 20.581.412.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan biaya keuangan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Biaya keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 4.072.590.624 atau 70,00% dari Rp 5.817.780.031 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 9.890.370.655 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah utang pembiayaan dan utang sewa pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan operasional.

Biaya keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan Biaya keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Biaya keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 739.727.190 atau 8,25% dari Rp 8.963.151.874 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 9.702.879.064 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh upaya perseroan untuk mengendalikan penambahan pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba sebelum pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 120.639.493 atau 2,98% dari Rp 4.050.490.833 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 4.171.130.326 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan pendapatan atas penyewaan helikopter karena penambahan armada.

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 1.374.014.027 atau 31,57% dari Rp 4.351.974.537 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 5.725.988.564 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh penurunan rugi selisih kurs.

Laba Periode / Tahun Berjalan

Laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 12.751.600 atau 0,39% dari Rp 3.230.462.356 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 3.243.213.956 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 289.088.868 atau 7,07% dari Rp 4.091.051.029 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4.380.139.897 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah Laba Komprehensif

Jumlah laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah laba komprehensif untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 65.264.072 atau 2,03% dari Rp 3.219.333.137 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi Rp 3.284.597.209 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 267.164.442 atau 6,52% dari Rp 4.098.136.496 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 4.365.300.938 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	8.911.160.695	12.504.549.964	4.738.231.034
Piutang usaha – pihak ketiga	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848
Piutang lain-lain – pihak ketiga	-	122.500.000	122.500.000
Biaya dibayar di muka	949.646.506	904.311.803	728.445.072
Bank garansi	1.403.168.000	429.952.000	441.440.000
Jumlah Aset Lancar	54.851.679.279	17.380.887.780	10.349.425.954
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain - pihak berelasi	665.301.295	5.180.085.219	1.990.211.119
Aset tetap – neto	148.235.974.581	89.841.840.489	78.360.807.994
Uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang	12.184.019.948	41.330.572.744	51.002.753.187
Aset pajak tangguhan	3.715.373	-	-
Setoran jaminan	3.970.093.603	-	606.980.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	165.059.104.800	136.352.498.452	131.960.752.300
JUMLAH ASET	219.910.784.079	153.733.386.232	142.310.178.254
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha – pihak ketiga	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845
Utang pembiayaan	32.528.421.174	24.925.626.250	17.096.454.401
Utang pajak	567.465.683	1.709.815.482	210.182.425
Beban akrual	2.785.264.960	368.051.573	678.735.214
Setoran dari pelanggan	13.064.825.900	2.565.883.414	1.761.526.268
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	16.300.832.020	21.103.145.912	28.333.798.810
Sewa pembiayaan	10.891.781.768	9.922.059.469	26.375.007.880
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	96.665.884.040	62.305.804.172	80.530.956.843
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	45.542.500.000	45.540.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	91.273.865	112.304.571	65.365.851
Liabilitas pajak tangguhan – neto	107.216.243	343.102.958	281.633.361
Utang jangka panjang – setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:			
Sewa pembiayaan	65.516.403.643	36.602.147.652	11.429.996.258
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	65.714.893.751	82.600.055.181	57.316.995.470
JUMLAH LIABILITAS	162.380.777.791	144.905.859.353	137.847.952.313
EKUITAS			
Modal saham	45.790.000.000	250.000.000	250.000.000
Saldo laba	11.169.451.295	7.916.446.680	3.594.400.270
Kepentingan non pengendali	570.554.993	661.080.199	617.825.671
Jumlah Ekuitas	57.530.006.288	8.827.526.879	4.462.225.941
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS	219.910.784.079	153.733.386.232	142.310.178.254

Jumlah Aset

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 66.177.397.847 atau 43,05% dari Rp 153.733.386.232 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 219.910.784.079 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo piutang usaha dan perolehan 3 (tiga) unit helikopter.

Perbandingan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 11.423.207.978 atau 8,03% dari Rp 142.310.178.254 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 153.733.386.232 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan saldo kas dan bank dan perolehan 1 (satu) unit helikopter

Kas dan Bank

Perbandingan posisi kas dan bank pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo kas dan bank pada tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp 3.593.389.269 atau 28,74% dari Rp 12.504.549.964 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 8.911.160.695 pada tanggal 30 September 2017.

Perbandingan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 7.766.318.930 atau 163,91% dari Rp 4.738.231.034 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 12.504.549.964 pada tanggal 31 Desember 2016.

Piutang Usaha – Pihak Ketiga

Perbandingan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 40.168.130.065 atau 1.174,65% dari Rp 3.419.574.013 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 43.587.704.078 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan atas penyewaan helikopter.

Perbandingan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi piutang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo piutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 899.235.835 atau 20,82% dari Rp 4.318.809.848 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 3.419.574.013 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh perputaran piutang usaha yang lebih baik pada tahun 2016.

Biaya Dibayar Dimuka

Perbandingan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo biaya dibayar di muka pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 45.334.703 atau 5,01% dari Rp 904.311.803 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 949.646.506 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan asuransi atas perolehan pesawat di tahun 2017.

Perbandingan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 175.866.731 atau 24,14% dari Rp 728.445.072 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 904.311.803 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan asuransi atas perolehan pesawat di tahun 2016.

Bank Garansi

Perbandingan posisi bank garansi pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi bank garansi pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo bank garansi pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp. 973.216.000 atau 226,35% dari Rp 429.952.000 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 1.403.168.000 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya perjanjian penyewaan helikopter dimana pihak penyewa meminta jaminan berupa bank garansi.

Perbandingan posisi bank garansi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi bank garansi pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo bank garansi pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 11.488.000 atau 2,60% dari Rp 441.440.000 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 429.952.000 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan kurs mata uang asing.

Piutang Lain-Lain - Pihak Berelasi

Perbandingan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo piutang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp 4.514.783.924 atau 87,16% dari Rp 5.180.085.219 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 665.301.295 pada tanggal 30 September 2017.

Perbandingan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi piutang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo piutang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 3.189.874.100 atau 160,28% dari Rp 1.990.211.119 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 5.180.085.219 pada tanggal 31 Desember 2016.

Aset Tetap – Neto

Pada tanggal 30 September 2017, Entitas Anak memiliki ikatan belanja modal dengan Leonardo S.p.a, Italia. Nilai pembelian helikopter dari Leonardo S.p.a adalah sebesar EUR 4.848.800. Harga pembelian tersebut harus dilunasi pada saat helikopter dikirim kepada Komala. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Entitas Anak harus membayar uang muka pemesanan sebesar EUR 80.0000 pada tanggal 28 September 2017 dan sebesar EUR 200,000 pada bulan November 2017. Pada tanggal 30 September 2017, jumlah uang muka yang telah dibayar oleh Entitas Anak adalah sebesar EUR 80,000 atau setara dengan Rp 1.271.594.400 dan disajikan sebagai uang muka perolehan helikopter.

Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk penambahan armada helikopter Perseroan yang akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Sumber dana yang digunakan saat ini adalah dana internal Perseroan. Manajemen memperkirakan pengiriman helikopter akan dilakukan pada akhir tahun 2018

Dengan adanya tambahan investasi helikopter maka Perseroan memproyeksikan akan ada peningkatan produksi jam terbang sebanyak kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) jam per tahun.

Perbandingan posisi aset tetap - neto pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo aset tetap - neto pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 58.394.134.092 atau 65,00% dari Rp 89.841.840.489 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 148.235.974.581 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini karena adanya penambahan 3 unit helikopter.

Perbandingan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo aset tetap - neto pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 11.481.032.495 atau 14,65% dari Rp 78.360.807.994 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 89.841.840.489 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini karena adanya penambahan 1 unit helikopter.

Uang Muka Perolehan Aset Tetap dan Suku Cadang

Perbandingan posisi uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp 29.146.552.796 atau 70,52% dari Rp 41.330.572.744 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 12.184.019.948 pada tanggal 30 September 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian uang muka perolehan helikopter yang direklasifikasi ke akun aset tetap.

Perbandingan posisi uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo uang muka perolehan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 9.672.180.443 atau 18,96% dari Rp 51.002.753.187 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 41.330.572.744 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengembalian uang muka perolehan helikopter.

Setoran Jaminan

Perbandingan posisi setoran jaminan pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi setoran jaminan pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo setoran jaminan pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 3.970.093.603 disebabkan oleh pembayaran setoran jaminan atas sewa operasi dan pembiayaan helikopter.

Perbandingan posisi setoran jaminan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi setoran jaminan pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo setoran jaminan pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 606.980.000 disebabkan oleh pengembalian setoran jaminan atas sewa pembiayaan helikopter.

Jumlah Liabilitas

Perseroan berhutang dalam mata uang US Dollar karena tingkat suku bunga yang lebih murah dibandingkan dengan berhutang dalam mata uang Rupiah.

Bila tingkat suku bunga pinjaman meningkat maka beban bunga yang harus dibayar oleh Perseroan dari laba usaha semakin besar, sehingga akan mempengaruhi perolehan laba bersih Perseroan.

Perseroan sampai sekarang tidak menerapkan kebijakan lindung nilai atas pinjaman dan ikatan dalam mata uang asing. Alasan Perseroan tidak melakukan kebijakan lindung nilai karena adanya *natural hedging* dalam kegiatan usaha Perseroan yaitu penerimaan dari pelanggan perhitungannya atas dasar US Dollar yang dikalikan dengan kurs Rupiah terhadap US Dollar yang sedang berlaku dipasar.

Saat ini Perseroan tidak mempunyai hutang yang suku bunganya belum ditentukan. Suku bunga pada hutang sudah ada bunganya.

Perseroan telah menghitung dan membukukan bunga terutang pada tanggal laporan posisi keuangan dan disajikan sebagai bagian dari akun beban akrual pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 17.474.918.438 atau 12,06% dari Rp 144.905.859.353 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 162.380.777.791 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang usaha.

Perbandingan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 7.057.907.040 atau 5,12% dari Rp 137.847.952.313 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 144.905.859.353 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang sewa pembiayaan.

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Perbandingan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 18.816.070.463 atau 1.099,57% dari Rp 1.711.222.072 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 20.527.292.535 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang atas sewa operasi helikopter.

Perbandingan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang usaha - pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 4.364.029.773 atau 71,83% dari Rp 6.075.251.845 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 1.711.222.072 pada tanggal 31 Desember 2016.

Utang Pembiayaan

Perbandingan posisi utang pembiayaan pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang pembiayaan pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 7.602.794.924 atau 30,50% dari Rp 24.925.626.250 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 32.528.421.174 pada tanggal 30 September 2017.

Perbandingan posisi utang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 7.829.171.849 atau 45,79% dari Rp 17.096.454.401 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 24.925.626.250 pada tanggal 31 Desember 2016.

Beban Akruai

Perbandingan posisi beban akrual pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi beban akrual pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo beban akrual pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 2.417.213.387 atau 656,76% dari Rp 368.051.573 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.785.264.960 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan akrual bunga dan akrual biaya operasional dan pemeliharaan.

Perbandingan posisi beban akrual pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi beban akrual pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo beban akrual pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 310.683.641 atau 45,77% dari Rp 678.735.214 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 368.051.573 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan akrual bunga.

Setoran dari Pelanggan

Perbandingan posisi setoran dari pelanggan pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi setoran dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo setoran dari pelanggan pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 10.498.942.486 atau 409,17% dari Rp 2.565.883.414 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 13.064.825.900 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan setoran jaminan dari pelanggan untuk penyewaan helikopter.

Perbandingan posisi setoran dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi setoran dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo setoran dari pelanggan pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 804.357.146 atau 45,66% dari Rp 1.761.526.268 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 2.565.883.414 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan uang muka dari pelanggan.

Utang Bank Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Perbandingan posisi utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp 4.802.313.892 atau 22,76% dari Rp 21.103.145.912 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 16.300.832.020 pada tanggal 30 September 2017. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang bank selama periode berjalan.

Perbandingan posisi utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 7.230.652.898 atau 25,52% dari Rp 28.333.798.810 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 21.103.145.912 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang bank selama tahun berjalan.

Utang Sewa Pembiayaan yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Perbandingan posisi utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 969.722.299 atau 9,77% dari Rp 9.922.059.469 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 10.891.781.768 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang sewa pembiayaan untuk perolehan aset tetap selama periode berjalan.

Perbandingan posisi utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang sewa pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang pembiayaan yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016 menurun sebesar Rp 16.452.948.411 atau 62,38% dari Rp 26.375.007.880 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 9.922.059.469 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian utang sewa pembiayaan kepada operator helikopter dari Thailand.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi

Perbandingan posisi utang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 30 September 2017 menurun sebesar Rp 45.542.500.000 terutama disebabkan oleh konversi pinjaman menjadi modal saham sebesar Rp 45.540.000.000.

Perbandingan posisi utang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang lain-lain - pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 2.500.000 karena pinjaman kepada PT Komala Tri Varia.

Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang

Perbandingan posisi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 30 September 2017 meningkat sebesar Rp 28.914.255.991 atau 79,00% dari Rp 36.602.147.652 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 65.516.403.643 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan utang sewa pembiayaan untuk perolehan aset tetap selama periode berjalan.

Perbandingan posisi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi utang sewa pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang pembiayaan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat sebesar Rp 25.172.151.394 atau 220,23% dari Rp 11.429.996.258 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 36.602.147.652 pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perolehan utang sewa pembiayaan kepada operator helikopter dari Malaysia.

EKUITAS

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Saldo ekuitas pada tanggal 30 September 2017 meningkat Rp 48.702.479.409 atau 551,71% dari Rp 8.827.526.879 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 57.530.006.288 pada tanggal 30 September 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp 45.540.000.000 dan jumlah laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp 3.284.597.209.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 meningkat Rp 4.365.300.938 atau 97,83% dari Rp 4.462.225.941 pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 8.827.526.879 pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh jumlah laba komprehensif tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Keterangan	Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September		Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	58.033.775.523	30.811.418.605	73.093.984.810	48.150.157.067
Penerimaan dari pendapatan operasi lain	1.113.206.991	813.912.977	813.912.977	-
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	27.430.228	9.428.203	20.106.993	20.581.412
Pembayaran kas kepada pemasok	(39.936.139.380)	(26.202.971.659)	(48.616.087.479)	(26.945.289.975)
Pembayaran kas kepada karyawan	(4.010.595.908)	(2.703.679.565)	(4.268.002.264)	(4.907.690.728)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(2.071.449.449)	(1.826.229.200)	(2.591.860.656)	(3.182.825.878)
Pembayaran biaya keuangan	(9.230.940.212)	(5.817.780.031)	(10.193.359.259)	(8.632.240.890)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.019.318.952)	(765.212.875)	(1.226.463.674)	(881.665.974)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	2.905.968.841	(5.681.113.545)	7.032.231.448	3.621.025.034
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	(7.044.972.908)	(844.703.812)	(1.978.248.314)	(40.410.923.500)
Pencairan (pembayaran) setoran jaminan	(3.970.093.603)	606.980.000	606.980.000	(358.180.000)
Penempatan bank garansi	(973.216.000)	-	-	(441.440.000)
Perolehan aset tetap	(33.500.000)	-	(9.145.000)	(31.012.711.045)
Pengembalian uang muka perolehan helikopter	-	7.170.554.159	7.511.928.757	4.104.522.955
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(12.021.782.511)	6.932.830.347	6.131.515.443	(68.118.731.590)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang pembiayaan	7.602.794.924	6.791.458.618	7.829.171.849	13.870.735.823
Kenaikan (penurunan) piutang lain-lain – pihak berelasi	4.265.563.925	1.330.609.202	(3.189.874.100)	(1.781.850.921)
Pelepasan entitas anak	127.500.000	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	(4.802.313.892)	(6.348.188.732)	(7.230.652.898)	(5.000.094.315)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.668.620.556)	(976.921.828)	(2.808.572.812)	(4.203.378.995)
Kenaikan (penurunan) utang lain-lain – pihak berelasi	(2.500.000)	-	2.500.000	32.665.652.851
Penerimaan utang bank jangka panjang	-	-	-	33.333.893.125
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	5.522.424.401	796.957.260	(5.397.427.961)	68.884.957.568
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	(3.593.389.269)	2.048.674.062	7.766.318.930	4.387.251.012
KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN	12.504.549.964	4.738.231.034	4.738.231.034	350.980.022
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN	8.911.160.695	6.786.905.096	12.504.549.964	4.738.231.034

Sumber dan Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016

Kas neto dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah positif yaitu sebesar Rp 2.905.968.841. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan dan pendapatan operasi lain, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha.

Kas neto dari aktivitas operasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah negatif yaitu sebesar Rp 5.681.113.545. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha serta biaya keuangan.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Kas neto dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 7.032.231.448. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha serta biaya keuangan.

Kas neto dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah positif yaitu sebesar Rp 3.621.025.034. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan untuk beban usaha serta biaya keuangan.

Arus kas dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

Kas neto dari aktivitas operasi yang berakhir pada periode 31 Desember 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 7.032.231.448. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha, serta biaya keuangan.

Kas neto dari aktivitas operasi yang berakhir pada periode 31 Desember 2015 adalah positif yaitu sebesar Rp 3.621.025.034. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pelanggan, sementara penggunaan kas hasil operasi terutama untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha, serta biaya keuangan.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016

Kas neto dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah negatif yaitu sebesar Rp 12.021.782.511. Penggunaan kas terutama digunakan untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap, pembayaran setoran jaminan dan penempatan bank garansi.

Kas neto dari aktivitas investasi untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 6.932.830.347. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pengembalian uang muka perolehan helikopter.

Arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Kas neto dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 6.131.515.443. Sumber utama penerimaan kas berasal dari pengembalian uang muka perolehan helikopter.

Kas neto dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah negatif yaitu sebesar Rp 68.118.731.590. Penggunaan utama kas adalah untuk pembayaran uang muka perolehan aset tetap dan perolehan aset tetap.

Sumber dan Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2016

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah positif yaitu sebesar Rp 5.522.424.401. Sumber kas terutama dari utang pembiayaan dan penerimaan piutang lain-lain kepada pihak berelasi.

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 adalah positif yaitu sebesar Rp 796.957.260. Sumber kas terutama dari utang pembiayaan dan penerimaan piutang lain-lain kepada pihak berelasi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah negatif yaitu sebesar Rp 5.397.427.961. Penggunaan kas terutama untuk pembayaran utang bank jangka panjang.

Kas neto dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah positif yaitu sebesar Rp 68.884.957.568. Sumber kas utama berasal dari utang bank jangka panjang dan utang lain-lain kepada pihak berelasi.

ANALISA RASIO

Rasio	Sep 2017	Desember 2016	Desember 2015
Liquidity Ratio			
<i>Current Ratio</i>	0,57 x	0,28 x	0,13 x
<i>Quick Ratio</i>	0,54 x	0,26 x	0,11 x
Activity Ratio			
<i>Account Receivable Turnover</i>	3,73 x	22,67 x	17,46 x
<i>Fixed Asset Turnover</i>	0,74 x	1,04 x	1,52 x
<i>Assets Turnover</i>	0,47 x	0,59 x	0,82 x
Profitability Ratio			
<i>EBITDA Margin</i>	21,90%	31,72%	38,48%
<i>Gross Profit Margin</i>	23,86%	24,60%	40,88%
<i>Operating Margin</i>	16,00%	21,58%	26,60%
<i>Net Profit Margin</i>	3,75%	6,11%	8,20%
<i>ROE</i>	5,71%	49,45%	91,84%
<i>ROA</i>	1,49%	2,84%	2,88%

Rasio	Sep 2017	Desember 2016	Desember 2015
Leverage Ratio			
<i>Debt to Equity Ratio</i>	2,82x	16,42x	30,89x
<i>Interest Bearing Debt to Equity</i>	2,18x	10,48x	18,65x
<i>Assets to Equity</i>	3,82x	17,42x	31,89x
<i>Net Debt to EBITDA</i>	8,45x	6,40x	7,17x
<i>EBITDA to Interest Coverage</i>	1,94x	2,33x	2,15x

4. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan Pemerintah yang terkait langsung dengan bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak yaitu peraturan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diantaranya yaitu aset minimal memiliki 1 (satu) pesawat helikopter untuk bidang usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.

5. KEJADIAN YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Tidak ada kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.

6. KEJADIAN MATERIAL SETELAH LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan laporan Akuntan Publik selain dari yang telah diungkapkan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian.

IV. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan yang material dan telah dilakukan pembobotan serta disusun dari bobot yang paling berat sampai bobot yang paling ringan dampaknya dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yaitu PT Komala Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha Pengangkutan Udara Niaga tidak berjadwal yaitu penyewaan pesawat helikopter.

A. Risiko Yang Dihadapi Perseroan

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Perseroan sebagai Perusahaan Induk yang mana sekitar 95% dari pendapatan konsolidasi Perseroan berasal dari pendapatan Entitas Anak, maka kinerja keuangan Perseroan akan tergantung dari kinerja keuangan Entitas Anak. Apabila pendapatan Entitas Anak menurun, maka pendapatan Perseroan juga akan menurun.

B. Risiko Yang Dihadapi Entitas Anak

1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, risiko utama adalah kecelakaan pesawat helikopter yang dimiliki oleh Entitas Anak. Bilamana hal ini terjadi, maka langsung akan berdampak negatif terhadap kelancaran operasi dan pendapatan Entitas Anak.

2. Risiko Usaha Yang Material

2.1. Risiko Persaingan

Adanya persaingan usaha dari perusahaan sejenis dapat mempengaruhi pendapatan dan margin keuntungan. Penyewa pesawat menjadi punya alternatif pilihan, dapat memilih menyewa pesawat dari perusahaan yang menjadi pesaing Entitas Anak, hal ini akan berdampak terhadap menurunnya perolehan pendapatan Entitas Anak. Penyewa menjadi punya perbandingan layanan, dapat menuntut layanan yang lebih baik dan harga layanan yang lebih murah dari Entitas Anak dibandingkan perusahaan pesaing, hal ini akan berdampak terhadap menurunnya margin keuntungan Entitas Anak.

2.2. Risiko Pemeliharaan dan *Spare Parts* Pesawat

Dukungan pemeliharaan dan *spare parts* pesawat oleh pabrikan pembuat pesawat sangat penting bagi kelangsungan dan kelancaran operasional Entitas Anak, apabila pasokan *spare parts* terganggu maka akan mengganggu operasional pesawat helikopter.

2.3. Risiko Tingkat Suku Bunga

Pembiayaan pengadaan pesawat helikopter milik Entitas Anak sebagian besar dilakukan dengan cara pinjaman dari Bank atau Perusahaan Pembiayaan, sehingga bila terjadi kenaikan tingkat suku bunga pinjaman akan berdampak terhadap kenaikan biaya bunga yang harus dibayar dan dapat mengurangi tingkat keuntungan yang akan diperoleh Entitas Anak.

2.4. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Entitas Anak yang kegiatan usahanya adalah Pengangkutan Udara Niaga tidak berjadwal, harus menjalankan usahanya tersebut sesuai dengan peraturan dari Departemen Perhubungan. Jika gagal memenuhi peraturan yang berlaku setelah diberikan waktu untuk menyesuaikan maka bisa dikenakan sanksi penghentian sementara penerbangan bagi pesawat-pesawat milik Entitas Anak. Sehingga akan mengganggu pendapatan dan kelangsungan usaha Entitas Anak.

2.5. Risiko Pasokan Bahan Bakar Pesawat

Bilamana pasokan bahan bakar untuk helikopter terganggu, maka pengoperasian helikopter juga akan terganggu dan berdampak terhadap biaya dan pendapatan.

2.6. Risiko Kurs Valuta Asing

Risiko kurs valuta asing akan berdampak terhadap keuangan perusahaan dalam bentuk rugi selisih kurs bilamana Entitas Anak melakukan pinjaman Kredit Investasi atau Sewa Guna Usaha dalam rangka pengadaan pesawat helikopter yang biasanya dalam mata uang USD atau EUR.

2.7. Risiko Sumber Daya Manusia Dibidang Penerbangan

Mengoperasikan helikopter perlu keahlian khusus, tidak semua orang bisa melakukannya, dibutuhkan pendidikan menjadi pilot dan pengalaman terbang. Bila pasokan pilot di pasar tenaga kerja berkurang, maka kegiatan usaha penyewaan helikopter akan terganggu.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Penyewa pesawat helikopter Entitas Anak Perseroan umumnya adalah berbentuk korporasi. Bilamana kondisi marko ekonomi Indonesia sedang kontraksi, daya beli melemah, korporasi – koporasi akan menyusun kembali prioritas kebutuhannya. Tidak menutup kemungkinan korporasi tersebut akan mengurangi kebutuhan angkutan udara dengan pesawat helikopter atau meminta negosiasi ulang mengenai harga layanan agar lebih murah. Situasi tersebut tentu akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan margin keuntungan Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dan Entitas Anak menjalankan usaha berdasarkan kontrak-kontrak bisnis jangka panjang maupun jangka pendek. Tidak menutup kemungkinan terhadap kontrak-kontrak bisnis tersebut dikemudian hari bisa terjadi permasalahan hukum, yang bisa berdampak negatif bagi aspek keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Panawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- f. Faktor–faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN DARI BOBOT RISIKO PALING BERAT SAMPAI BOBOT PALING RINGAN YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 7 Februari 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai (a) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, dan 2015, tidak diaudit atau direviu, (b) laporan keuangan konsolidasian diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (c) penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya.

Manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Jaya Trishindo berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 16 April 2007 juncto Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 18 Januari 2008 keduanya dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup, yang telah:

- Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-06130.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 08 Februari 2008;
- Didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0009205.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008;
- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan Nomor 6845.

(“Akta Pendirian”)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Edwin Widjaja	225	225.000.000	90%
2. Leonard Chendra	25	25.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta sebagai berikut:

a) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Sebagai Pengganti Rapat Yang Diambil Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Jaya Trishindo Nomor 05 tanggal 12 April 2010 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup, yang telah:

- Disetujui oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-29581.AH.01.02.TH.2010 tanggal 10 Juni 2010;
- Didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0043881.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010
- Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 1 Juli 2011, Tambahan Nomor 17015

(“Akta No 05/2010”)

Akta No 05/2010 mengatur mengenai persetujuan pemegang saham atas perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang agen perjalanan wisata;
 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
 - Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
 - Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek wisata dan daya tarik wisata;
 - Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaya Trishindo Nomor 14 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup, yang telah:
- Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0006574.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0036351.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017;
 - Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dengan Nomor AHU-AH.01.03-0118860 tanggal 17 Maret 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0036351.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017;
- (“Akta No 14/2017”)**

Akta No 14/2017 mengatur mengenai keputusan pemegang saham atas persetujuan: Konversi piutang tuan Edwin Widjaja sebesar Rp45.540.000.000,- (empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) terhitung mulai bulan Januari 2016 kepada Perseroan menjadi setoran modal tuan Edwin Widjaja kepada Perseroan. Dengan demikian terjadi penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi sebesar Rp45.790.000.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah).

Sehingga merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp46.540.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 46.540 saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 45.790 (empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau sebesar Rp45.790.000.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah).
- c) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Jaya Trishindo Nomor 31 tanggal 22 Desember 2017 dibuat oleh Dahlia, SH, pengganti dari Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang telah:
- Disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0028099.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167774.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
 - Diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 Desember 2017 dengan Nomor AHU-AH.01.03-0207273 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167774.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017.

yang mengatur mengenai persetujuan pemegang saham atas:

- peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp.46.540.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 46.540 (empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp.220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu);
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 45.790 (empat puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh) saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.45.790.000.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus Sembilan juta Rupiah) menjadi 56.900 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 56.900.000.000,- (lima puluh enam miliar Sembilan ratus juta Rupiah).

Peningkatan sebesar Rp.11.110.000.000,- dilakukan:

- a. sebesar Rp.7.860.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan kapitalisasi saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai surat No. 0646/T&T-GA/R-5/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 21 Desember 2017, jumlah saldo sampai 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.916.446.680,- (tujuh miliar Sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dari jumlah saldo laba tersebut yang dikapitalisasi menjadi modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp7.860.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah). Peningkatan modal dilakukan secara proporsional diantara para pemegang saham.
 - b. Sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dilakukan dengan uang tunai dan dilakukan secara proporsional diantara para pemegang saham.
- d) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaya Trishindo No. 6 tanggal 5 Januari 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah :
- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0000120.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000758.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018;
 - diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0003516 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000758.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018

yang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyetujui Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perseroan terbuka yaitu antara lain perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
2. Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham Perseroan yang semula Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp.100,- (seratus Rupiah).
3. Menyetujui menyesuaikan seluruh anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal termasuk Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik tanggal 14 Mei 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 24 Maret 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk penerbitan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama;

4. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk penerbitan sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama;
5. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan (Initial Public Offering/IPO).

1.2. Maksud dan Tujuan

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan;
 - perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah serta local dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain
 - bertindak sebagai grosier, supplier, leveransier, waralaba dan commission house
 - bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri
- b. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong (kontraktor), perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan-jalan, jembatan, serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi serta usaha-usaha lain dalam bidang teknik sipil dan elektronik serta pekerjaan umum lainnya;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan orang maupun barang serta usaha pergudangan dan pengepakan;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak

1.3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Edwin Widjaja	225	225.000.000	90%
2. Leonard Chendra	25	25.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250	250.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Tidak ada perubahan struktur permodalan Perseroan sepanjang tahun 2016

Tahun 2017

Berdasarkan Akta No 14/2017 pemegang saham Perseroan telah memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Menambah modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp46.540.000.000 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) terbagi atas 46.540 (empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh) saham dengan nominal per saham Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- b. Menambah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), menjadi sebanyak 45.790 (empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau sebesar Rp45.790.000.000 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah). Tambahan modal disetor tersebut berasal dari konversi piutang Edwin Widjaja kepada Perseroan.

Struktur dan kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	46.540	46.540.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Edwin Widjaja	45.765	45.765.000.000	99.9%
2. Leonard Chendra	25	25.000.000	0.1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.790	45.790.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jaya Trishindo Nomor 4 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup, telah disetujui penjualan saham milik:

- a) Edwin Widjaja sebanyak 32.053 (tiga puluh dua ribu lima puluh tiga) saham kepada PT Startel Communication dan sebanyak 13.712 (tiga belas ribu tujuh ratus dua belas) kepada PT Komala Tri Varia.
- b) Leonard Chendra sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada PT Komala Tri Varia

Jual Beli Saham-Saham Edwin Widjaja kepada PT Startel Communication direalisasikan berdasarkan Jual Beli Saham-Saham dibawah tangan tanggal 5 Juli 2017 yang telah didaftarkan dalam Buku Daftar No. 22/Dibukukan/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor.

Jual Beli Saham-Saham Edwin Widjaja kepada PT Komala Tri Varia direalisasikan berdasarkan Jual Beli Saham-Saham dibawah tangan tanggal 5 Juli 2017 yang didaftarkan dalam Buku Daftar No. 23/Dibukukan/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Jual Beli Saham-Saham Leonard Chendra kepada PT Komala Tri Varia direalisasikan berdasarkan Jual Beli Saham-Saham dibawah tangan tanggal 5 Juli 2017 yang didaftarkan dalam Buku Daftar No. 24/Dibukukan/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

Dengan dilakukannya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	46.540	46.540.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Startel Communication	32.053	32.053.000.000	70%
2. PT Komala Tri Varia	13.737	13.737.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.790	45.790.000.000	100%
Saham dalam Portepel	750	750.000.000	

Berdasarkan (“**AKTA 31/2017**”) pemegang saham Perseroan telah memutuskan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp.46.540.000.000,- (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 46.540 (empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp.220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu);
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 45.790 (empat puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh) saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.45.790.000.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus Sembilan juta Rupiah) menjadi 56.900 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 56.900.000.000,- (lima puluh enam miliar Sembilan ratus juta Rupiah).

Peningkatan sebesar Rp.11.110.000.000,- dilakukan:

1. sebesar Rp.7.860.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dengan kapitalisasi saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dengan Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara sesuai surat No. 0646/T&T-GA/R-5/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 21 Desember 2017, jumlah saldo sampai 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.916.446.680,- (tujuh miliar Sembilan ratus enam belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dari jumlah saldo laba tersebut yang dikapitalisasi menjadi modal ditempatkan dan disetor adalah sebesar Rp7.860.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah). Peningkatan modal dilakukan secara proporsional diantara para pemegang saham.
2. sebesar Rp.3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dilakukan dengan uang tunai dan dilakukan secara proporsional diantara para pemegang saham.

Dengan dilakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Startel Communication	39.830	39.830.000.000	70%
2. PT Komala Tri Varia	17.070	17.070.000.000	30%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	56.900	56.900.000.000	100%
Saham dalam Portepel	163.100	163.100.000.000	

1.4. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

No	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No.1330/24.3PT.7/31.73-1.824.27/e/2017, tanggal 15 Desember 2017. Dengan klasifikasi usaha perdagangan besar alat transportasi udara,suku cadang dan perlengkapan lainnya.	Sampai dengan tanggal 06 April 2019	Kepala Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.431/24.1PB.7/31.73-1.824.27/e/2017, tanggal 15 Desember 2017, yang menerangkan KBLI Perseroan adalah 7490,7020,4659 dan 7730.	Tanpa Jangka Waktu	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No.13/27.1BU.1/31.73.08.1002/-071.562/e/2018, tanggal 12 Januari 2018	Sampai dengan tanggal 12 Januari 2023	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.02.566.647.0-032.000	-	Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Jakarta Kembangan

1.5. Keterangan Mengenai Aset Tetap

a. Aset Perseroan

Penyertaan Pada Perusahaan Lain

Perseroan memiliki penyertaan pada perusahaan lain, dengan perincian sebagai berikut:

Penyertaan Pada Perusahaan Lain	Jumlah Saham	Persentase (%)
PT Komala Indonesia	56.431	99%

Penyertaan Perseroan tersebut di atas adalah benar dan sah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

b. Aset Entitas Anak

Helikopter yang dimiliki

No	Jenis Pesawat	Jumlah Unit Pesawat
1	Helikopter AS 350 B3e Reg. PK KIE	1

Helikopter yang dikuasai berdasarkan Perjanjian Sewa dengan Opsi Beli

No	Jenis Pesawat	Jumlah Unit Pesawat
1	Helikopter AS 350 B3 Reg. PK KIA	1
2	Helikopter AS 350 B3e Reg. PK KIF	1
3	Helikopter MI 172 Reg. VN 8427	1
4	Helikopter MI 172 Reg. VN 8428	1

Kepemilikan Atas Mesin-Mesin dan Perlengkapan Pesawat Helikopter:

Engine Arriel 2B 22228, Partie Mobile (Float) p/n: 355 SCM 209210, Cargo Hook p/n: IS 19-100, Cargo Hook p/n: IS 19-100, Hour Meter, KHF 950 HF Radio System, EMS KIT.

Nilai Aset Tetap

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak per 30 September 2017:

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Bersih (Rupiah)
Helikopter AS 350 B3 Reg. PK KIA	8.218.750.005
Helikopter AS 350 B3e Reg. PK KIE	36.761.650.649
Helikopter AS 350 B3e Reg. PK KIF	31.040.279.990
Helikopter MI 172 Reg. VN 8427	32.948.177.083
Helikopter MI 172 Reg. VN 8428	32.948.177.083
Mesin Helikopter	3.543.689.890
Perlengkapan Helikopter	2.660.280.264
Peralatan dan Perabotan Kantor	114.969.617
Jumlah	148.235.974.581

Aset Tetap Yang Dijaminkan

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, aset tetap milik Entitas Anak yang dijaminan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Jenis Aset | : | Helikopter AS 350 B3 Reg. PK KIA |
| Bukti Kepemilikan Aset | : | <i>Bill of Sale</i> |
| Lokasi | : | Jakarta |
| Pemegang Hak | : | PT PPA Finance |
| Nilai Jaminan | : | Rp19.400.000.000
(sembilan belas miliar empat ratus juta Rupiah) |
| Jangka waktu | : | 60 bulan sejak 15 Desember 2014 |

1.6. Asuransi

Entitas Anak Perseroan telah membuat perjanjian asuransi dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

Asuransi Hull All Risk dan Hull War Risk (termasuk kecelakaan pribadi dan pihak ketiga atas luka badan)

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Perusahaan Asuransi | : | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
| Nomor Sertifikat Asuransi | : | C17/KOMALA/001 |
| Nama Tertanggung | : | Entitas Anak Perseroan |
| Alamat Tertanggung | : | Perkantoran Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1/A,
Jakarta Barat |
| Periode Pertanggung | : | 12 bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 |
| Total Harga Pertanggung | : | EURO 2,000,000 |
| Objek Pertanggung | : | Helicopter AS 350 B3 termasuk Bambi Bucket, Registrasi No. PK-KIF, No. Seri 8047 |
| Penutupan atas | : | Hulls all risk dan hull war risks termasuk kehilangan dan kerusakan mesin dan komponen lain, asuransi pihak ketiga atas luka badan dan kerusakan property diakibatkan oleh operasional helicopter dan kecelakaan pribadi (personal accident) |
| Lokasi penutupan | : | Batas geografis: Indonesia dan Malaysia |

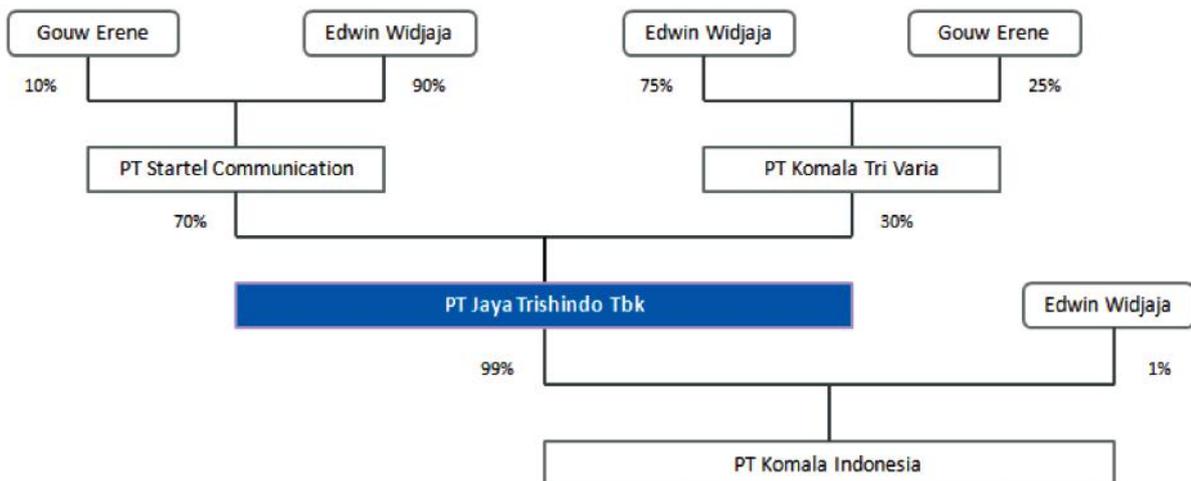
Asuransi Hull All Risk dan Hull War Risk (termasuk kecelakaan pribadi dan pihak ketiga atas luka badan)

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Perusahaan Asuransi | : | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
| Nomor Sertifikat Asuransi | : | C17/KOMALA/002 |
| Nama Tertanggung | : | Entitas Anak Perseroan |
| Alamat Tertanggung | : | Perkantoran Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1/A,
Jakarta Barat |
| Periode Pertanggung | : | 12 bulan sejak tanggal 24 Mei 2017 |
| Total Harga Pertanggung | : | EURO 2,000,000 |
| Objek Pertanggung | : | Helicopter AS 350 B3 termasuk Bambi Bucket, Registrasi No. PK-KIA |
| Penutupan atas | : | Hulls all risk dan hull war risks termasuk kehilangan dan kerusakan mesin dan komponen lain, asuransi pihak ketiga atas luka badan dan kerusakan property diakibatkan oleh operasional helicopter dan kecelakaan pribadi (personal accident) |
| Lokasi penutupan | : | Batas geografis: Indonesia dan Malaysia |

Asuransi Hull All Risk dan Hull War Risk (termasuk kecelakaan pribadi dan pihak ketiga atas luka badan)

Perusahaan Asuransi : PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
 Nomor Sertifikat Asuransi : C17/KOMALA/003
 Nama Tertanggung : Entitas Anak Perseroan
 Alamat Tertanggung : Perkantoran Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1/A, Jakarta Barat
 Periode Pertanggung : 12 bulan sejak tanggal 24 Mei 2017
 Total Harga Pertanggung : EURO 2,000,000
 Objek Pertanggung : Helicopter AS 350 B3 termasuk Bambi Bucket, Registrasi No. PK-KIE
 Penutupan atas : Hulls all risk dan hull war risks termasuk kehilangan dan kerusakan mesin dan komponen lain, asuransi pihak ketiga atas luka badan dan kerusakan property diakibatkan oleh operasional helicopter dan kecelakaan pribadi (personal accident)
 Lokasi penutupan : Batas geografis: Indonesia dan Malaysia

1.7. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



Pihak pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Edwin Widjaja

1.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak

Berikut ini adalah tabel yang mengungkapkan hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham Perseroan		Entitas Anak Perseroan
		STC	KTV	KI
Gouw Erene Goetama	Komisaris Utama	-	Komisaris	Komisaris
Benny Sidarta	Komisaris Independen	-	-	-
Edwin Widjaja	Direktur Utama	Komisaris	Direktur	Direktur
Erwin Budi Satria	Direktur Independen	-	-	-

2. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

2.1. PT Startel Communication ("STC")

Riwayat Singkat

STC didirikan dengan nama PT Startel Communication berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 tanggal 14 Oktober 2002 dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor di Citeureup, yang telah:

- a. Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-01256 HT.01.01.TH 2003 tanggal 22 Januari 2003;
- b. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor TDP No.090216425129 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No.2770/BH.09-02/II/003 tanggal 23 Februari 2003;
- c. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 30 tanggal 15 April 2003, Tambahan Nomor 2992.

Anggaran Dasar STC telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Startel Communication No.04 tanggal 5 Februari 2013 dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No.AHU-12048.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0020713.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Startel Communication Nomor 04 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-12048.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013; didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0020713.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013, maksud dan tujuan STC adalah sebagai berikut:

1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
2. menjalankan usaha dalam bidang pembangunan
3. menjalankan usaha dalam bidang jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, STC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan yang meliputi:
 1. Perdagangan ekspor dan impor, antar pulau / daerah serta lokal dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain;
 2. Perdagangan besar lokal dalam negeri antar pulau / daerah serta lokal dan interinsulair selain ekspor dan import;
 3. Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, waralaba, dan commission house serta kegiatan usaha terkait;
 4. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 5. Perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi dan segala kegiatan usaha yang berkaitan;
 6. Ekspor impor dan perdagangan peralatan komunikasi, meliputi peralatan telekomunikasi diantaranya telepon selular, wireless, pager, mesin-mesin, telegeram, telex, telstex, facsimille baik dalam bentuk perangkat keras maupun lunak serta kegiatan usaha terkait;
- b) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan yang meliputi:
 1. Pemasangan instalasi – instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air conditioner (AC), spinker, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro, dan mesin;
 2. Pemborongan bidang telekomunikasi meliputi jasa teknologi informasi komunikasi, multimedia, telekomunikasi navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (pengindraan jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait;

- c) Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:
1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa sistem komunikasi data antara lain jasa VSAT (*Very Small Aperture Terminal*);
 2. Jasa penyediaan dan penyewaan perangkat keras komputer dan peripheralnya serta kegiatan usaha yang terkait;
 3. Jasa telekomunikasi umum meliputi wartel dan warnet untuk keperluan masyarakat umum termasuk penyewaan komputer, pelayanan email, facsimille, pos elektronik dan kegiatan usaha instalasi serta perawatan dan perbaikan dan kegiatan usaha yang terkait;
 4. Jasa teknologi informasi termasuk internet content provider, multimedia, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (*tele conference*), pusat data, pengolahan dan penyimpanan data serta kegiatan usaha terkait;
 5. Jasa konsultasi telekomunikasi meliputi sentral telekomunikasi, sistem pemancar, dan penerima radio dan televisi, sistem komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, perhitungan instalasi serta kegiatan usaha terkait;
 6. Jasa pengembang piranti lunak meliputi pembuatan aplikasi, feasibility study, otomatisasi sistem perkantoran, penelitian dan pemasangan (instalasi) serta pemeliharaan (*maintenance*) sistem baik software maupun hardware terkait, modifikasi serta perkembangan sistem-sistem;
 7. Jasa pengembangan perangkat lunak (*software*) meliputi perencanaan dan perancangan sistem (*case study dan design*), pengembangan dan pengerjaan (*development dan implementasi*), pemeliharaan (*maintenance*) serta kegiatan usaha terkait;
 8. Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi serta kegiatan terkait

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan:

- Akta Berita Acara Rapat PT Startel Communication No.07 tanggal 13 November 2008 dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No AHU-95923.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0121099.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Startel Communication Nomor 27 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menti Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dengan Nomor AHU-AH.01.03-0192823 tanggal 21 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0147333.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017;

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham STC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Edwin Widjaja	270	270.000.000	90%
2. Gouw Erene Goetama	30	30.000.000	10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100%
Saham dalam Portepel	700	700.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Startel Communication Nomor 27 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dengan Nomor AHU-AH.01.03-0192823 tanggal 21 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0147333.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 21 November 2017, juga memuat mengenai susunan Komisaris dan Direksi STC sebagai berikut:

Komisaris : Edwin Widjaja
Direktur : Huarief Johan

Ikhtisar Data Keuangan PT Startel Communication Posisi Keuangan Konsolidasian per 30 September 2017

	Rp
Aset Lancar	54.861.177.412
Aset Tidak Lancar	166.016.109.166
Jumlah Aset	220.877.286.578
Liabilitas Jangka Pendek	96.680.422.640
Liabilitas Jangka Panjang	65.714.893.751
Jumlah Liabilitas	162.395.316.391
Jumlah Ekuitas	58.481.970.187
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	220.877.286.578

2.2. PT Komala Tri Varia (“KTV”)

Riwayat Singkat

KTV didirikan dengan nama PT Komala Tri Varia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 23 Februari 2010 dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-16062.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor AHU-0023696.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 tanggal 18 Februari 2011, Tambahan Nomor 2136 (“**Akta Pendirian**”)

Anggaran Dasar KTV telah mengalami perubahan dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Komala Tri Varia No.23 tanggal 30 September 2017 dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor yang telah:

- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0021855.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2017;
- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sertad diterima dengan No.AHU-AH.01.03-0182933 tanggal 21 Oktober 2017;
- didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0132462.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2017.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan KTV adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa perusahaan angkutan udara niaga

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, KTV dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan (padat, cair, benda pos dan lain-lain) di dalam negeri dan di luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
- b) Menjalankan usaha penyewaan pesawat udara kepihak lain untuk menunjang jasa angkutan udara, perwakilan / owner representative perusahaan penerbangan luar negeri;
- c) Menjalankan usaha sebagai jasa penunjang dan membeli pesawat / angkutan udara untuk memenuhi kebutuhan transportasi dalam negeri dan diluar negeri;
- d) Melakukan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan suku cadang dan kelengkapan lainnya
- e) Melakukan jasa konsultasi, pendidikan, pelatihan dan simulator serta kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengangkutan udara;
- f) Menjalankan usaha jasa kebersihan dan jasaboga;
- g) Menjalankan usaha sebagai agen penjualan umum (General Sales Agen/GSA) guna mewakili kepentingan perusahaan Angkutan Udara Asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara asing.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan:

- Akta Pendirian; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Komala Tri Varia No. 26 tanggal 31 Oktober 2017 dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa S.H., Notaris di Bogor yang telah diberitahukan dan diterima pemberitahuan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah No. AHU-AH.01.03-0192830 tanggal 21 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0147343.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 November 2017 ("Akta No.26/2017"), dimana jual beli saham tersebut direalisasikan dengan Jual Beli Saham tertanggal 29 September 2017 yang dibukukan oleh Elizabeth Widyawati Santosa S.H., Notaris di Bogor dibawah No.35/Dibukukan/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, Jual Beli Saham tertanggal 30 Oktober 2017 dan Jual Beli Saham tertanggal 30 Oktober 2017 yang dibukukan oleh Elizabeth Widyawati Santosa S.H., Notaris di Bogor secara berturut-turut dibawah No.40/Dibukukan/X/2017 dan No.41/Dibukukan/X/2017 keduanya tertanggal 31 Oktober 2017;

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham KTV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000	6.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Edwin Widjaja	5.700	5.700.000.000	95%
2. Gouw Erene Goetama	300	300.000.000	5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000	6.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Komala Tri Varia Nomor 26 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah diberitahukan kepada Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dengan Nomor AHU-AH.01.03-0192830 tanggal 21 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0147343.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 November 2017, juga memuat mengenai susunan Komisaris dan Direksi KTV sebagai berikut:

Komisaris : Gouw Erene Goetama
 Direktur : Edwin Widjaja

Ikhtisar Data Keuangan PT Komala Tri Varia Posisi Keuangan per 30 September 2017

	Rp
Aset Lancar	13.775.201.628
Aset Tidak Lancar	590.094.764
Jumlah Aset	14.365.296.392
Liabilitas Jangka Pendek	0
Liabilitas Jangka Panjang	0
Jumlah Liabilitas	0
Jumlah Ekuitas	14.365.296.392
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.365.296.392

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan diangkat berdasarkan Akta No. 6 tanggal 5 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No.AHU-0000120.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gouw Erene Goetama
Komisaris Independen : Benny Sidarta

Direksi

Direktur Utama : Edwin Widjaja
Direktur Independen : Erwin Budi Satria

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



1. Gouw Erene Goetama Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, pendidikan terakhir SMA Don Bosco Taman Sari, Jakarta pada tahun 1972.

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan, juga menjabat sebagai Komisaris di PT Komala Indonesia (2017-sekarang) dan PT Komala Tri Varia (2017 – sekarang).

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris Utama Perseroan adalah RUPS tanggal 5 Januari 2018.



2. Benny Sidarta
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, pendidikan terakhir lulusan Universitas Tarumanegara SMII, jurusan Akuntansi tahun 1982.

Beberapa pelatihan dan seminar yang pernah diikuti antara lain Manajemen by Objektif (PPM, 1982), HP Financial Accounting (Hewlett Packard Hongkong, 1984), Penganggaran Perusahaan (IPPM, 1988), Analisa Manajemen Keuangan (PPM, 1991), Pemutahiran Pajak (PPA FEUI, 1992), Manajemen Valuta Asing (PPM, 1992).

Pengalaman kerja antara lain di KAP Drs. Utomo, Mulia & Co (Auditor, 1979-1982), PT Berca Indonesia (Manajer Akuntansi, 1982-1985), di Group Modern (1985-2005), PT Cahyagold Prasetya (Direktur, 2005-2009), PT Wahana Solusi (Partner, 2009-2012), PT Asia Citra Strategis (Komisaris, tahun 2017-sekarang), PT Sari Semesta Utama (Komisaris, tahun 2017 – sekarang).

Dasar hukum penunjukan sebagai Komisaris Independen Perseroan adalah RUPS tanggal 5 Januari 2018.

Direksi



1. Edwin Widjaja
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, pendidikan terakhir lulusan Australian National University jurusan Commerce tahun 1995.

Pengalaman sebagai Direktur di PT Komala Tri Varia (2010 – sekarang), PT Startel Communication (2017 – sekarang), PT Komala Indonesia (2012 – sekarang).

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Utama Perseroan adalah RUPS tanggal 5 Januari 2018.



2. Erwin Budi Satria
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, pendidikan terakhir lulusan STIE Malangkucecwara – Malang, jurusan Manajemen Keuangan tahun 1996.

Beberapa pelatihan dan seminar yang diikuti antara lain Fixed Income Trading System (Bursa Efek Surabaya, 2004), Fund Manager Training (Bina Insan, 2005), Managing Risk & Improving Performance (KPEI, 2006), Know Your Customer (Bina Insan, 2010), *Customer Protection Workshop* (OJK, 2015).

Pengalaman kerja di PT Barata Indonesia (Persero) (Staf Keuangan, Agustus 2003 – April 2004), PT Tiga Pilar Sekuritas (Koordinator Settlement, Mei 2004 – April 2012), PT Riau Baraharum (*Procurement Supervisor*, Mei 2012 – Januari 2013), PT Indoasia Aset Manajemen (Koordinator Pemasaran Januari 2013 – Desember 2017).

Dasar hukum penunjukan sebagai Direktur Independen Perseroan adalah RUPS tanggal 5 Januari 2018.

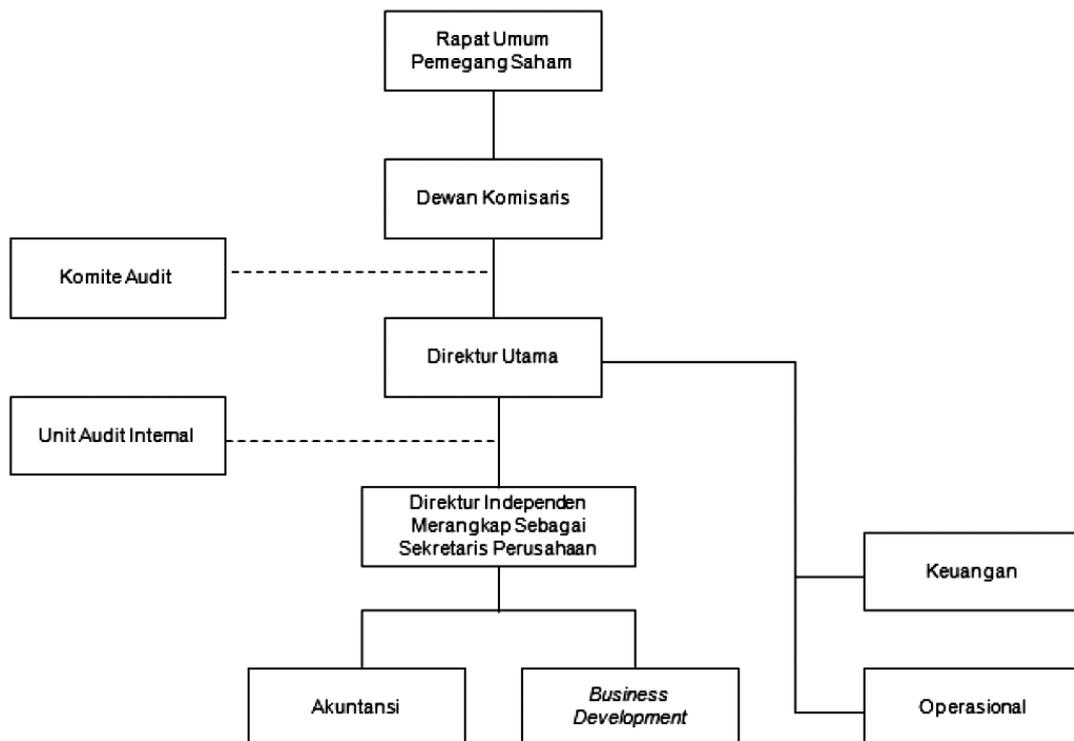
Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sifat Hubungan Kekeluargaan
Gouw Erene Goetama	Komisaris Utama	Ibu dan anak kandung
Edwin Widjaja	Direktur Utama dan Pihak Pengendali	

4. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

4.1. Struktur Organisasi Perseroan



4.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Benny Sidarta ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS tanggal 5 Januari 2018. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 5 Januari 2018.

Sesuai dengan Undang - Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (“UUPT 40/2007”) dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 33/2014), maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.3. Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur Independen. Erwin Budi Satria diangkat pertama kali sebagai Direktur Independen melalui RUPS tanggal 5 Januari 2018.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau *workshop* yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

4.4. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR-JT/SK/II/2018-01 tanggal 5 Januari 2018, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah:

Nama : Erwin Budi Satria
Alamat : Perkantoran Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1/1A
Jakarta Barat 11620
Nomor Telp / Fax : (021) 589 000 22 ; Faksimili : (021) 589 000 33
Email : corsec@jatigroup.com
Pengalaman kerja : Staf Finance di PT Barata Indonesia (Persero), kemudian menjadi Koordinator *Settlement* di PT Tiga Pilar Sekuritas, kemudian menjadi *Procurement Supervisor* di PTRiau Baraharum, terakhir sebagai Koordinator Pemasaran di PT Indoasia Aset Manajemen sebelum bergabung dengan Perseroan.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan / atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan / atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan Perseroan belum mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, dikarenakan pengangkatan Erwin Budi Satria baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Perseroan akan senantiasa mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam seminar atau program pelatihan yang diadakan oleh BEI, OJK, atau pihak lain yang relevan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan Perseroan.

4.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor KOM-JT/SK/I/2018-01 tanggal 5 Januari 2018, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Benny Sidarta
Riwayat hidup dan pengalaman kerja Benny Sidarta dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Anggota : Agus Cahyo Baskoro
Warga Negara Indonesia, lulusan dari Oklahoma City University, jurusan keuangan tahun 1994.

Pengalaman kerja mulai dari PT 3M Indonesia sebagai Junior Manager (1995-1997), kemudian sebagai Manajer *Investment Banking* di PT Bhakti Investama Tbk (1997-1999), kemudian sebagai Direktur di PT Makinta Sekuritas (1999-2004), kemudian VP *Investment Banking* di PT Kim Eng Sekuritas (2004-2006), Direktur di PT Masrai Capital (2006-2009), dan sebagai Komisaris Independen di PT Ratu Prabu Energi Tbk sampai sekarang.

Anggota : M. Ghufron
Warga Negara Indonesia, lulusan ITB jurusan teknik kimia (1981) dan MBA dari IPMI (1986).

Pengalaman kerja dibidang pasar modal mulai dari PT Rifan Financindo Sekuritas sebagai Komisaris (1997-2008), Komisaris Utama di PT Bapindo Bumi Sekuritas (2010-2012), Komisaris PT IRBA Pratama (2016 – sekarang)

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 9 Januari 2018, dan telah sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan pembentukan Komite Audit Perseroan baru dilakukan pada tanggal 5 Januari 2018.

4.6. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor DIR-JT/SK/II/2018-02 tanggal 5 Januari 2018, Perseroan telah mengangkat Rahmad Hidayat sebagai Kepala Unit Audit Internal

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan / atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

4.7. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi;
 - b) Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) Besaran atas Remunerasi;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4.8. Manajemen Risiko Perseroan dan Entitas Anak

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan dan Entitas Anak perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	Risiko Sebagai Perusahaan Induk	Perseroan sebelum memutuskan berinvestasi dalam bentuk penyertaan dalam perusahaan lain, selalu melakukan proses yang rasional, dengan pertimbangan visi, misi, dan strategi usaha Perseroan.
2	Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing	Dengan melakukan <i>hedging</i> nilai tukar Rupiah terhadap mata uang USD dan EUR melalui fasilitas <i>forward</i> dari bank.
3	Risiko Persaingan Usaha	Senantiasa meningkatkan mutu dan inovasi layanan jasa, seperti dengan menawarkan paket layanan jasa baru.

No	Risiko	Mitigasi Risiko
4	Risiko Pemilihan dan <i>Spare Parts</i> Pesawat	Meningkatkan kualitas para teknisi dengan mengikutsertakan dalam pelatihan secara berkala dan melakukan perjanjian dengan pabrik pembuat pesawat untuk mendukung penyediaan <i>spare parts</i> dengan waktu yang panjang, serta menunjuk beberapa <i>supplier spare parts</i> lainnya supaya tidak tergantung hanya pada satu <i>supplier</i> saja.
5	Risiko Tingkat Suku Bunga	Jangka waktu pinjaman untuk pembelian aset (helikopter) diusahakan untuk tidak lebih dari 6 (enam) tahun, hal ini bisa mengurangi beban bunga.
6	Risiko Pembiayaan Pesawat	Membina hubungan yang baik terus menerus dengan beberapa bank dan perusahaan pembiayaan.
7	Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku	Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha memahami dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
8	Risiko Pasokan Bahan Bakar Pesawat	Selalu menjaga persediaan bahan bakar yang cukup untuk beroperasi selama 2 (dua) minggu.
9	Risiko Kecelakaan Pesawat	Mengasuransikan seluruh pesawat kepada perusahaan asuransi yang mempunyai tingkat peringkat (<i>rating</i>) yang baik.
10	Risiko Sumber Daya Manusia Dibidang Penerbangan	Merekrut <i>crew</i> yang telah berpengalaman dan membuat kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu.
11	Risiko Perubahan Teknologi	Perseroan dan Entitas Anak senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang relevan dengan model kegiatan usaha yang dijalankan dan menerapkannya secara tepat guna.
12	Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro	Mengkaji dan mempertimbangkan setiap investasi dengan baik supaya tidak terjadi investasi yang berlebihan. Mendiversifikasi layanan jasa ke beberapa jenis industri.
13	Risiko Kebijakan Pemerintah (Departemen Perhubungan)	Selalu terus membuka jalur komunikasi yang baik dengan pihak berwenang dan mengikuti setiap sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan baru yang terkait dengan usaha Perseroan dan Entitas Anak.
14	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Setiap transaksi yang menurut Perseroan akan berdampak material selalu dibuat Perjanjian atau Kontrak dan berusaha untuk memenuhi semua apa yang telah dituangkan dalam Perjanjian atau Kontrak tersebut.

5. KETERANGAN MENGENAI SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia berperan penting terhadap keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset bagi Perseroan.

Perseroan senantiasa memperhatikan peraturan - peraturan pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, seperti telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR), telah menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan kematian, juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan, Perseroan juga menjadi peserta asuransi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), dengan program asuransi kematian akibat kecelakaan, cacat permanen dan tidak bisa terbang.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak, per tanggal 30 September 2017, termasuk Direksi, yang dikelompokkan berdasarkan Status Karyawan Tetap / Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Adalah Warga Negara Indonesia, tidak ada tenaga kerja asing.

Sumber Daya Manusia Perseroan

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	2	40%	5	100%	5	100%	1	100%
Tidak Tetap	3	60%	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	100%	5	100%	5	100%	1	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	20%	1	20%	1	20%	1	100%
Manajer	-	-	-	-	-	-	-	-
Staff	4	80%	4	80%	4	80%	-	-
Non - Staff	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	100%	5	100%	5	100%	1	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA / SMK	1	20%	1	20%	1	20%	-	-
D1	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	3	60%	3	60%	3	60%	-	-
S1	1	20%	1	20%	1	20%	1	100%
S2	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	100%	5	100%	5	100%	1	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21	-	-	-	-	1	20%	-	-
21-30	3	60%	3	60%	3	60%	-	-
31-35	1	20%	1	20%	-	-	-	-
36-40	-	-	-	-	-	-	-	-
41-45	1	20%	1	20%	1	20%	1	100%
46-50	-	-	-	-	-	-	-	-
51-55	-	-	-	-	-	-	-	-
56-60	-	-	-	-	-	-	-	-
> 60	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5	100%	5	100%	5	100%	1	100%

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	1	20%	1	20%	1	20%	1	100%
Akuntansi / Keuangan	1	20%	1	20%	1	20%	-	-
Teknisi	1	20%	1	20%	1	20%	-	-
Personalia	1	20%	1	20%	1	20%	-	-
Pemasaran	1	20%	1	20%	1	20%	-	-
Jumlah	5	100%	5	100%	5	100%	1	100%

Sumber Daya Manusia Entitas Anak

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	3	11,5%	4	15,4%	4	16,7%	6	27,3%
Tidak Tetap	23	88,5%	22	84,6%	20	83,3%	16	72,7%
Jumlah	26	100,0%	26	100,0%	24	100,0%	22	100,0%

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Jabatan

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	3,8%	1	3,8%	1	4,2%	1	4,5%
Manajer	4	15,4%	7	27,0%	6	25,0%	6	27,3%
Staff	21	80,8%	18	69,2%	17	70,8%	15	68,2%
Non - Staff	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100,0%	26	100,0%	24	100,0%	22	100,0%

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Jenjang Pendidikan

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA / SMK	7	27,0%	6	23,1%	8	33,3%	7	31,8%
D1	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	5	19,2%	7	26,9%	5	20,8%	5	22,7%
D3	5	19,2%	5	19,2%	4	16,7%	2	9,1%
S1	9	34,6%	8	30,8%	7	29,2%	8	36,4%
S2	-	-	-	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	100,0%	26	100,0%	24	100,0%	22	100,0%

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Kelompok Usia

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 21	-	-	-	-	-	-	1	4,5%
21-30	8	30,8%	7	27,0%	9	37,5%	6	27,3%
31-35	4	15,4%	2	7,7%	3	12,5%	3	13,6%
36-40	3	11,5%	4	15,4%	5	20,8%	5	22,7%
41-45	4	15,4%	4	15,4%	5	20,8%	4	18,2%
46-50	3	11,5%	4	15,4%	2	8,3%	3	13,6%
51-55	1	3,8%	1	3,8%	-	-	-	-
56-60	-	-	3	11,5%	-	-	-	-
> 60	3	11,5%	1	3,8%	-	-	-	-
Jumlah	26	100,0%	26	100,0%	24	100,0%	22	100,0%

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama

Status	30 September				31 Desember			
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	1	3,8%	1	3,8%	1	4,2%	1	4,5%
Akuntansi / Keuangan	4	15,4%	4	15,4%	4	16,7%	2	9,1%
Mekanik Helikopter	7	26,9%	11	42,3%	9	37,5%	9	40,9%
<i>Helicopter Landing Officer</i>	4	15,4%	2	7,7%	2	8,3%	2	9,1%
Personalia	4	15,4%	2	7,7%	2	8,3%	3	13,6%
Pilot	5	19,2%	5	19,2%	5	20,8%	4	18,2%
Pemasaran	1	3,8%	1	3,8%	1	4,2%	1	4,5%
Jumlah	26	100,0%	26	100,0%	24	100,0%	22	100,0%

Entitas Anak Perseroan yang bergerak dibidang usaha jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal, untuk pilot, mekanik pesawat dan *helicopter landing officer* harus memiliki izin secara orang perorangan.

Daftar pilot, mekanik pesawat dan *helicopter landing officer* Entitas Anak Perseroan pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pilot Pesawat Helikopter Entitas Anak :

1. Nama : I Wayan Pasek Krisna Yuda P
Umur : 35 tahun
Pengalaman Kerja : Pilot
Tugas : Pilot pesawat helikopter AS 350, Bell 412, Bell 206
Izin / Sertifikat : CPL / H 5764
2. Nama : Wino Pietarsono
Umur : 42 tahun
Pengalaman Kerja : Pilot
Tugas : Pilot pesawat helikopter AS 350 B3, Bell 412
Izin / Sertifikat : ATPL / H 6008
3. Nama : Dian Didik Arvianto
Umur : 39 tahun
Pengalaman Kerja : Pilot
Tugas : Pilot pesawat helikopter AS 350
Izin / Sertifikat : CPL / H 6245
4. Nama : Ahmad Fauzi
Umur : 39 tahun
Pengalaman Kerja : Pilot
Tugas : Pilot pesawat helikopter AS 350
Izin / Sertifikat : CPL/ H 7325
5. Nama : Agus Prayitno
Umur : 47 tahun
Pengalaman Kerja : Pilot
Tugas : Pilot pesawat helikopter AS 350
Izin / Sertifikat : CPL/ H 10429

Mekanik Pesawat Helikopter Entitas Anak :

1. Nama : Berris Julian Danu
Umur : 27 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik helikopter
Tugas : Mekanik helikopter AS 350 B3, Bell 412
Izin / Sertifikat : AMEL 7020

2. Nama : Shinta Sri Wahyuningsih
Umur : 41 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik helikopter
Tugas : Mekanik semua jenis helikopter
Izin / Sertifikat : AMEL 3267

3. Nama : Hendra Darmawan
Umur : 29 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik Helikopter
Tugas : Mekanik helikopter AS 350 B3, EC 130
Izin / Sertifikat : AMEL 6773

4. Nama : F Dedi Irawan
Umur : 28 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik Helikopter
Tugas : Mekanik Helikopter AS 350 B3, Bell 412
Izin / Sertifikat : AMEL 6603

5. Nama : Anjar Rosdiana
Umur : 27 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik helikopter
Tugas : Mekanik helikopter AS 350 B3, Bell 412
Izin / Sertifikat : AMEL 6602

6. Nama : Noor Choliq
Umur : 47 tahun
Pengalaman Kerja : Mekanik helikopter
Tugas : Mekanik helikopter AS 350 B3, Bell 412
Izin / Sertifikat : AMEL 2402

7. Nama : Eddy Rusli
Umur : 61 tahun
Pengalaman Kerja : Manajer Operasional
Tugas : Mekanik helikopter Bell 2016, Bell 412, Bell 407, Bell 429
Izin / Sertifikat : ATPL / H 1959

Helicopter Landing Officer Entitas Anak:

1. Nama : Eko Sri Mandiri
Umur : 32 tahun
Pengalaman Kerja : Helicopter Landing Officer
Tugas : Landing officer untuk semua jenis helikopter
Izin / Sertifikat : 2580 / HLO / XII /2016

2. Nama : Benny Nurbiyanto
Umur : 52 tahun
Pengalaman Kerja : Helicopter Landing Officer
Tugas : Landing officer untuk semua jenis helikopter
Izin/ Sertifikat : 2035 / HLO/ V/ 2015

3. Nama : Ady Prasetyono
Umur : 34 tahun
Pengalaman Kerja : Helicopter Landing Officer
Tugas : Landing officer untuk semua jenis helikopter
Izin / Sertifikat : 2254 / HLO / II / 2017
4. Nama : Rahmat Darmawan
Umur : 24 tahun
Pengalaman Kerja : Helicopter Landing Officer
Tugas : Landing officer untuk semua jenis helikopter
Izin / Sertifikat : 2609 / HLO / II / 2017

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan dan Entitas Anak, seperti:

- a) *Safety Management System*
- b) *Human Factor*
- c) *Recurrent AS 350 Airframe*
- d) *Recurrent Aviation English Proficiency*
- e) *Crew Resource Management Recurrent Training*
- f) *Dangerous Goods Recurrent Training*
- g) *Wind Shear Recurrent Training*
- h) *Required Inspection Item Training*

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan atau serikat pekerja.

6. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan dan Entitas Anak maupun ditempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perkara perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

7. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung pada 1 (satu) Entitas Anak, yaitu:

Nama Entitas Anak	Tahun Operasional	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
PT Komala Indonesia	2013	Pengangkutan udara niaga tidak berjadwal (penyewaan pesawat helikopter)	2012	99%	Beroperasi

Alamat kantor PT Komala Indonesia di Rukan Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1 No 1A, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan – Kota Administrasi Jakarta Barat 11620.

Telp: +62 21 – 589 00 300; Fax: +62 21 – 589 00 033

Website: www.flykomala.com

PT Komala Indonesia (“ KI ”)

Riwayat Singkat

KI didirikan dengan nama PT Komala Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 tanggal 15 Maret 2012 dibuat di hadapan Dirhamdan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah:

- Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-14325.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012;
- Didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 09.02.1.77.43101 tanggal 14 Februari 2017 di Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0023820.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012;
- Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 30 April 2013, Tambahan Nomor 21335.

(“Akta Pendirian KI”)

Anggar Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian KI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Komala Indonesia No.32 tanggal 22 Desember 2017 dibuat oleh Dahlia,S.H, pengganti dari Fathiah Helmi,S.H.,Notaris di Jakarta yang telah:

- disetujui oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-0028100.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0167775.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dibawah No. AHU-AH.01.03-0207274 tanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167775.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 (“**Akta 32/2017**”)

Yang mengatur mengenai:

- a. peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp.46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 46.000 (empat puluh enam ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi Rp.220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 220.000 (dua ratus dua puluh ribu);
- b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 46.000 (empat puluh enam ribu) saham dengan jumlah nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.46.000.000.000 (empat puluh enam miliar Rupiah) menjadi 57.000 (lima puluh tujuh ribu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 57.000.000.000 (lima puluh tujuh miliar Rupiah).

Peningkatan sebesar Rp.11.000.000.000 dilakukan dengan uang tunai secara proposional oleh pemegang saham KI.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian KI, maksud dan tujuannya adalah Pengangkutan Udara Niaga tidak terjadwal.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa Perusahaan Angkutan Udara Niaga, menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan (padat, cair, benda, pos, hewan dll) di dalam negeri dan luar negeri untuk suatu perjalanan atau lebih dengan penerbangan terjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
- b. Jasa Penyewaan Angkutan Udara, meliputi penyewaan pesawat udara dan helikopter ke pihak lain atau menyewakan ke pihak lain untuk menunjang jasa angkutan udara, perwakital / owner representative perusahaan penerbangan luar negeri;
- c. Melakukan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan suku cadang dan kelengkapan lainnya.

Dokumen Perizinan

No	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
1	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No.09.02.1.77.43101, tanggal 14 Februari 2017. Dengan klasifikasi usaha persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl.	Sampai dengan tanggal 14 Februari 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No.34/24.1PB.1/31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 14 Februari 2017. Dengan klasifikasi usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, jasa persewaan alat transportasi udara (non operator).	Sampai dengan tanggal 14 Februari 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No.63/27.1BU.1/31.73.08.1002/-071.562/e/2017 tanggal 20 Januari 2017	Sampai dengan tanggal 20 Januari 2022	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Utara
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.03.212.391.1-086.000	-	Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Jakarta Kembangan
5	Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (SIUAU/NTB) nomor SIUAU/NTB-057 tanggal 16 Maret 2017 (sebagai revisi 1 nomor SIUAU/NTB-057 tanggal 18 Juli 2012)	-	Kementerian Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
6	Sertifikat Operator Pesawat Udara (SOPU) (Air Operator Certificate) nomor AOC 135-051 tanggal 9 Januari 2017 (diterbitkan pertama kali tanggal 8 Januari 2013)	8 Januari 2019	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
7	Sertifikat Pendaftaran pesawat helikopter model Eurocopter AS 350B3 seri pesawat 3710, nomor pendaftaran 3245 tanggal 27 Desember 2014	26 Desember 2020	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
8	Sertifikat Kelaikudaraan Standard Airbus Helicopters AS350B3 seri pesawat 3710, nomor pendaftaran 3245 tanggal 27 Desember 2016	26 Desember 2018	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
9	Sertifikat Pendaftaran pesawat helikopter model Eurocopter AS 350B3 seri pesawat 7767, nomor pendaftaran 3637 tanggal 22 April 2016	21 April 2019	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
10	Sertifikat Kelaikudaraan Standard Airbus Helicopters AS350B3 seri pesawat 7767, nomor pendaftaran 3637 tanggal 22 April 2017	21 April 2018	Kementerian Perhubungan, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

No	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang menerbitkan
11	Sertifikat Pendaftaran pesawat helikopter model Airbus Helicopters AS 350B3e seri pesawat 8047, nomor pendaftaran 3910 tanggal 28 April 2017	27 April 2020	Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
12	Sertifikat Kelaikudaraan Standard Airbus Helicopters AS350B3e seri pesawat 8047 nomor pendaftaran 3910 tanggal 9 Mei 2017	8 Mei 2018	Kementerian Perhubungan, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 32/2017 struktur permodalan dan susunan pemegang saham KI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
	56.431	56.431.000.000	99%
1. PT Jaya Trishindo			
2. Edwin Widjaja	569	569.000.000	1%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	57.000	57.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	163.000	163.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Komala Indonesia No. 8 tanggal 9 Agustus 2017 dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa S.H., Notaris di Bogor, yang telah:

- diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No AHU-AH.01.03-0162983 tanggal 16 Agustus 2017
- didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0101360.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017

Susunan Komisaris dan Direksi KI adalah sebagai berikut:

Komisaris : Gouw Erene Goetama
Direktur : Edwin Widjaja

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan KI yang bersumber dari laporan keuangan auditan KI untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi pada tanggal 5 Januari 2018 sebagai Akuntan Publik dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	220.421.966.688	153.131.135.854	141.847.643.653
Jumlah Liabilitas	163.366.467.587	99.234.896.098	92.297.044.563
Jumlah Ekuitas	57.055.499.101	53.896.239.756	49.550.599.090

Aset

Perbandingan posisi aset pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah nilai aset pada posisi 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 67.290.830.834 atau naik 43,94% menjadi Rp 220.421.966.688 dibandingkan dengan jumlah nilai aset pada posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp 153.131.135.854.

Perbandingan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah nilai aset pada posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.283.492.201 menjadi Rp 153.131.135.854 atau naik 7,95% dibandingkan jumlah nilai aset pada posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 141.847.643.653.

Liabilitas

Perbandingan posisi liabilitas pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah nilai liabilitas pada posisi 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 64.131.571.489 atau naik 64,63% menjadi Rp 163.366.467.587 dibandingkan dengan jumlah nilai liabilitas pada posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp 99.234.896.098.

Perbandingan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah nilai liabilitas pada posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.937.851.535 menjadi Rp 99.234.896.098 atau naik 7,52% dibandingkan jumlah nilai liabilitas pada posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 92.297.044.563.

Ekuitas

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 30 September 2017 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016

Jumlah nilai ekuitas pada posisi 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.159.259.345 atau naik 5,86% menjadi Rp 57.055.499.101 dibandingkan dengan jumlah nilai ekuitas pada posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp 53.896.239.756.

Perbandingan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dengan posisi ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah nilai ekuitas pada posisi 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.345.640.666 menjadi Rp 53.896.239.756 atau naik 8,77% dibandingkan jumlah nilai ekuitas pada posisi 31 Desember 2015 sebesar Rp 49.550.599.090.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan	84.952.513.102	47.169.015.176	67.773.405.425	47.349.172.430
Beban Pokok Pendapatan	(64.494.814.937)	(37.925.071.681)	(51.228.884.032)	(27.029.805.501)
Laba Kotor	20.457.698.165	9.243.943.495	16.544.521.393	20.319.366.929
Laba Usaha	13.887.759.641	9.771.793.237	15.321.751.839	13.205.481.401
Laba Tahun Berjalan	3.116.098.684	3.210.045.840	4.360.479.625	4.014.408.045

Pendapatan

Perbandingan pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 37.783.497.926 menjadi Rp 84.952.513.102 atau naik 80,10% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 47.169.015.176.

Perbandingan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 20.424.232.995 menjadi Rp 67.773.405.425 atau naik 43,14% dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 47.349.172.430.

Beban Pokok Pendapatan

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban pokok pendapatan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.569.743.256 menjadi Rp 64.494.814.937 atau naik 70,06% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 37.925.071.681.

Perbandingan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.199.078.531 menjadi Rp 51.228.884.032 atau naik 89,53% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 27.029.805.501.

Laba Kotor

Perbandingan laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba kotor untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.213.754.670 menjadi Rp 20.457.698.165 atau naik 121,31% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 9.243.943.495.

Perbandingan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 3.774.845.536 menjadi Rp 16.544.521.393 atau turun 18,58% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 20.319.366.929.

Laba Usaha

Perbandingan laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba usaha untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.115.966.404 menjadi Rp 13.887.759.641 atau naik 42,12% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September sebesar Rp 9.771.793.237.

Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.116.270.438 menjadi Rp 15.321.751.839 atau naik 16,03% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 13.205.481.401.

Laba Periode / Tahun Berjalan

Perbandingan laba periode berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Laba tahun berjalan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sedikit mengalami penurunan sebesar Rp 93.947.156 menjadi Rp 3.116.098.684 atau turun 2,93% dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp 3.210.045.840.

Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 346.071.580 menjadi Rp 4.360.479.625 atau naik 8,62% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp 4.014.408.045.

8. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Umum

Perseroan melalui Entitas Anak yaitu PT Komala Indonesia, melakukan kegiatan usaha utama dibidang jasa angkutan udara niaga tidak berjadwal, yaitu menyewakan pesawat helikopter.

Pendapatan Entitas Anak menyumbang sekitar 95% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan, sementara sekitar 5% sisanya berasal dari kegiatan Perseroan sebagai agen pemasaran untuk menjual jasa penyewaan helikopter Entitas Anak Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak pemegang saham publik.

Kecenderungan

Pendapatan Perseroan sejak tahun 2015 sampai dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 terus meningkat, dari Rp 49.978.472.430 di tahun 2015 menjadi Rp 71.390.391.829 di tahun 2016, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat menjadi Rp 87.702.963.102. Kecenderungan peningkatan Pendapatan Perseroan ini karena semakin dipercayanya mutu jasa Perseroan oleh pelanggan tetap, baik dari Badan Pemerintah maupun pihak Swasta.

Beban pokok pendapatan Perseroan sejak tahun 2015 sampai dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 terus meningkat, dari Rp 29.544.896.284 di tahun 2015 menjadi Rp 53.830.373.315 di tahun 2016, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat menjadi Rp 66.780.085.714. Kecenderungan peningkatan beban pokok pendapatan Perseroan ini terutama karena beban sewa pesawat helikopter dari pihak ketiga meningkat.

Biaya keuangan Perseroan sejak tahun 2015 sampai dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 terus meningkat, dari Rp 8.963.151.874 di tahun 2015 menjadi Rp 9.702.879.064 di tahun 2016, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 meningkat menjadi Rp 9.890.370.655. Kecenderungan peningkatan biaya keuangan Perseroan ini terutama karena beban bunga sewa pembiayaan dan beban bunga pembiayaan.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Perjanjian Penting

Entitas Anak Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah membuat perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga. Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian penting tersebut yang ada adalah sebagai berikut ringkasannya:

PT BNI Multifinance

Perjanjian Modal Kerja Dengan Cara Anjak Piutang No. BNIMF/06/039 tanggal 16 Juni 2016 junctis No.BNIMF/6.3/067 tanggal 9 September 2016, No. BNIMF/6.3/024 tertanggal 21 Maret 2017, No.BNIMF/6.3/069 tanggal 10 Agustus 2017 dan yang terakhir Addendum Perjanjian Modal Kerja Dengan Cara Anjak Piutang tanggal 8 September 2017 yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak	: Entitas Anak (“KI”) PT BNI Multifinance (“Factor”)
Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan Modal Kerja dengan cara anjak piutang dengan jaminan dari KI (<i>factoring with recourse</i>). KI bertanggung jawab penuh atas setiap piutang yang tidak tertagih (<i>with recourse</i>) yaitu apabila piutang kepada customer tidak tertagih maka KI wajib mengambil alih kembali tanggung jawab atas piutang tersebut dan sekaligus melakukan pembayaran ke rekening Factor.
Customer	: Pelanggan yang disetujui Factor.
Jangka Waktu	: sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018.
Ketentuan <i>Factoring</i>	: - KI menyerahkan seluruh haknuya sebagai pemilik piutang yang sah kepada Factor, termasuk hak untuk menagih piutangnya dengan segala cara, hak KI atas bunga/keuntungan lain, atau hak yang timbul dari jaminan asuransi dalam kaitannya dengan utang dimaksud serta hak-hak KI yang lain yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara KI dengan Customer tanpa kecuali apapun. - KI menyetujui untuk mengalihkan seluruh keuntungan berkenaan dengan piutang-piutang dimaksud beserta dengan seluruh hak KI untuk menjaminkan sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli antara KI dengan Customer, namun Factor tidak berkewajiban untuk melengkapi atau melaksanakan ketentuan ketentuan/syarat-syarat dalam Perjanjian Jual Beli antara KI dengan Customer. - Kecuali dengan persetujuan Factor, tanggal jatuh tempo piutang yang akan dijual tidak melampaui tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pembatasan	<p>KI wajib untuk tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang dapat mengurangi hak Factor atas piutang yang telah dibeli; - Melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang menimbulkan berkurangnya Nilai atas harta benda milik KI - Apabila KI adalah badan hukum tidak mengadakan peleburan dengan atau penggabungan dengan atau pengambilalihan badan hukum atau perusahaan lain; - Memperluas atau mempersempit usaha KI - Mengalihkan dengan cara apapun asset KI; - Menimbulkan hutang baru kecuali hutang yang berkenaan dengan transaksi sehari-hari KI dalam menjalankan usahanya; - memohon likuidasi atau memperkecil modal - membebani asset kecuali untuk keperluan Perjanjian; - mengadakan perjanjian mengenai asset KI dengan pihak ketiga secara merugikan Factor atau pihak yang berpiutang; - KI tidak akan menagih dan/atau menerima pembayaran piutang setelah Piutang dijual kepada Factor; - Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atau apapun KI adalah badan hukum mengajukan permohonan pembubaran tanpa persetujuan Factor.
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PT PPA Finance

Perjanjian Sewa Guna Usaha

Perjanjian Sewa Guna Usaha No. S-335/PPAF-Dir/XII-2014 tanggal 11 Desember 2014 yang diaktakan dalam Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha No 8 tanggal 15 Desember 2014 dibuat dihadapan Ike Rahmawati, S.H.,M.Kn., Notaris di Tangerang yang pokoknya mengatur:

Para Pihak	: KI ("Lessee") PT PPA Finance ("Lessor")
Jenis Pembiayaan	: Lessor memberikan pembiayaan melalui Sewa guna Usaha atas Barang Modal (Fasilitas pembiayaan <i>Sale and lease back</i>) dan Lessee sepakat menerima dan terikat pada Sewa Guna Usaha tersebut dengan hak opsi membeli.
Jangka Waktu	: 60 (enam puluh) bulan/5 tahun. Sampai dengan Tanggal Pembayaran Terakhir yaitu tanggal 15 Desember 2019
Barang Modal	: 1 unit helikopter Eurocopter AS AS350 B3 Airbus Helicopter PK-KIA, No. Pendaftaran 3245.
Nilai Perolehan/Nilai Pembiayaan	: Nilai Perolehan adalah Rp10.400.000.000,00 Nilai Pembiayaan adalah Rp15.520.000.000,00
Pembatasan	: Tanpa ijin tertulis dari Lessor, Lessee berjanji untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian barang-barang yang menjadi objek pembiayaan; - Mengadakan dan/atau melakukan perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan;

Kewajiban	: Lessee berkewajiban untuk: <ul style="list-style-type: none"> - melaporkan/menginformasikan secara tertulis kepada Lessor apabila akan memindahkan objek pembiayaan - menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila akan melakukan perubahan atas objek pembiayaan. - menyampaikan laporan keuangan per semester segera setelah diminta selambatnya 30 hari setelah pelaporan dan laporan keuangan tahunan (audited) segera setelah diminta Lessor selambatnya 60 hari setelah pelaporan
Hak Opsi	: Lessee mempunyai hak opsi untuk memperpanjang periode Sewa Guna Usaha Barang Modal untuk 1 (satu) tahun berikutnya, namun Lessee dengan ini menyatakan secara tegas tidak akan mengambil hak opsi memperpanjang tersebut dan memilik untuk melaksanakan hak opsi membeli dan oleh karenanya Lessor menyetujui permintaan dari Lessee tersebut dan Lessee berhak untuk melaksanakan opsi membeli seluruh bagian dari Barang Modal.
Jaminan Pembiayaan	: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit helikopter AS350B3 Airbus Helicopter Inc - Personal Guarantee atas nama Edwin Widjaja
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Sewa Guna Usaha No. PPAF/PSLB-P/2015/II/036 tanggal 26 Februari 2015

Para Pihak	: Entitas Anak ("Lessee") PT PPA Finance ("Lessor")
Jenis Pembiayaan	: Pembiayaan Sewa Guna Usaha atas Barang Modal dengan hak opsi (<i>finance lease</i>)
Jangka Waktu	: 60 (enam puluh) bulan/5 tahun. Dimulai sejak Tanggal Efektif yaitu tanggal diterimanya Barang Modal atau sejak dilunasinya Harga Perolehan oleh Lessor kepada Penjual sampai dengan tanggal Pembayaran Sewa Guna Usaha pada Tanggal Jatuh Tempo/Tanggal Pembayaran Terakhir (Maret 2020)
Barang Modal	: Barang Modal berupa perlengkapan Helicopter AS350 B3 Airbus Helicopter dengan dengan jenis barang yaitu Partie Mobile sebanyak 1 unit, cargo hook sebanyak 1 unit, hour meter sebanyak 1 unit, KHF 950 HF Radio System sebanyak 1 unit dan EMS Kit sebanyak 1 unit.
Pembatasan	: Tanpa ijin tertulis dari Lessor, Lessee berjanji untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Mengalihkan kepemilikan mesin masih dalam pembiayaan Lessor ke pihak lain, baik dengan cara Leasing (sewa guna usaha) ataupun kepada Bank maupun perorangan - Menjaminkan piutang yang menjadi sumber pembayaran sewa guna kepada pihak lain baik yang termasuk dalam kontrak kerjasama maupun yang tidak termasuk dalam kontrak kerjasama; - Memindahkan Barang Modal ke lokasi ("Patal") atau tempat lain selain wilayah Republik Indonesia tanpa persetujuan Lessor; - Mengubah dan memodifikasi Barang Modal tanpa pemberitahuan ke Lessor - Membatalkan secara sepihak atau bersama-sama dengan pihak ketiga yang terkait dengan segala perikatan yang menjadi dasar pengadaan Barang Modal oleh Lessor selama Perjanjian ini masih berjalan dan berlaku.

Pembatasan	<p>KI wajib untuk tidak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang dapat mengurangi hak Factor atas piutang yang telah dibeli; - Melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang menimbulkan berkurangnya Nilai atas harta benda milik KI - Apabila KI adalah badan hukum tidak mengadakan peleburan dengan atau penggabungan dengan atau pengambilalihan badan hukum atau perusahaan lain; - Memperluas atau mempersempit usaha KI - Mengalihkan dengan cara apapun asset KI; - Menimbulkan hutang baru kecuali hutang yang berkenaan dengan transaksi sehari-hari KI dalam menjalankan usahanya; - memohon likuidasi atau memperkecil modal - membebani asset kecuali untuk keperluan Perjanjian; - mengadakan perjanjian mengenai asset KI dengan pihak ketiga secara merugikan Factor atau pihak yang berpiutang; - KI tidak akan menagih dan/atau menerima pembayaran piutang setelah Piutang dijual kepada Factor; - Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran atau apapun KI adalah badan hukum mengajukan permohonan pembubaran tanpa persetujuan Factor.
Jaminan Pembiayaan	: - Perlengkapan Helicopter AS350B3 Airbus Helicopter Inc - 1(satu) unit helicopter AS350B3 Airbus Helicopter Inc - Personal Guarantee
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Penyelesaian Hutang

Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang No.11 tanggal 12 Juni 2017 juncto Akta Addendum Perjanjian Penyelesaian Hutang No. 01 tanggal 4 Januari 2018, keduanya dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya mengatur:

Pokok Perjanjian	: Entitas Anak ("KI") untuk membayar dan menyelesaikan utangnya atas pemakaian <i>charter</i> pesawat sebesar USD 166.897 (seratus enam puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) ("Utang"). Pembayaran akan diselesaikan KI dengan cara angsuran.
Cara Pembayaran	: KI akan membayar Utang dengan cara angsuran sebanyak 9 (Sembilan) tahap. Dalam hal terjadi keterlambatan atas tahapan angsuran sebagaimana disebut di atas, maka KI berkewajiban untuk membayar denda sebesar 3% per bulan dari nilai angsuran yang tertunggak.
Jaminan	: KI memberikan jaminan berupa 9 (Sembilan) lembar cek
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Perjanjian Sewa Dengan Opsi Beli

Perjanjian Sewa Bare Hull (Dry Lease) Airbus Helicopter H125 No. 17012/VNHS-KOMALA/II2017 tanggal 2 Februari 2017 juncto Perjanjian Perubahan (Amandement) Opsi Beli yang pada pokoknya mengatur:

Metode Sewa Dengan Opsi Beli	: Transaksi sewa helikopter Eurocopter Ecureuil AS 350 B3e Seri SN 8047 dilakukan berjenjang dimana KI ("Sub Lease") menyewa dari Telewest Ventures ("Lessee") dimana Lessee menyewa dari Penyewa ("Lessor")
Ruang Lingkup	: Objek Sewa disewakan secara eksklusif untuk terbang di area Indonesia
Objek Sewa	: Eurocopter Ecureuil AS350 B3e Seri SN 8047
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun
Ketentuan-ketentuan	: <ul style="list-style-type: none"> - Sub-leasing hanya diperbolehkan kepada KI - Lessee atau Sub-lease hanya diperbolehkan menerbangkan helikopter di wilayah Republik Indonesia - Lessee setuju untuk melaksanakan operasi sesuai dengan regulasi Eropa dan Perancis sebagaimana diminta oleh Lessor - Pada akhir masa sewa KI dapat membeli Helikopter
Hukum Yang berlaku	: Perancis
Penyelesaian Perselisihan	: Commerce Court of Chambery-Perancis

Perjanjian Sewa atas Dua Helikopter MI 172 Registrasi VN 8427 dan VN 8428 No.8297/KOMALAINONESIA/VIII/2017 tanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya mengatur:

Ruang Lingkup	: Lessor menyewakan 2 (dua) unit Helikopter MI 172 No. VN8427 dan VN8428 berikut peralatan opsional, data, dokumentasi teknologi, piranti lunak dan pelayanan-pelayanan kepada KI ("Lessee"). Sewa Helikopter akan diadakan dengan dasar <i>dry lease</i> (sewa tanpa awak/crew) standar. Helikopter yang disewa akan diterima di Indonesia, oleh karenanya Lessee akan mengatur dan menanggung seluruh biaya Helikopter ke Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Objek Sewa	: 2 (dua) unit Helikopter tipe MI-172 No. VN8427 dan VN8428
Biaya Sewa	: Lessee wajib membayar: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Bulanan tetap/<i>Fixed monthly fee</i> (FMF) dan (dalam mata uang USD) - Biaya Operasi per jam/<i>Hourly Operating Rate</i> (HOR) (dalam mata uang USD)
Jangka Waktu	: 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pada Sertifikat Penerimaan (<i>Acceptance Certificate</i>)
Hak Untuk Membeli	: Lessee diberikan hak eksklusif oleh Lessor untuk membeli Helikopter MI 172 dengan No.VN8427 dan VN 8428 pada akhir masa sewa
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	: Hukum Hongkong SAR. Dalam hal terdapat sengketa, maka akan diselesaikan pada Arbitrase Hongkong.

Perjanjian Sewa Kantor

Perjanjian No 002/Monica-Komala/IX/2017, Tanggal 1 September 2017

Para Pihak	: Monica Chendrawati (“Pihak Pertama”) Entitas Anak (“KI”) (Pihak Kedua)
Ruang Lingkup	: Pihak Pertama selaku pemilik tanah dan bangunan setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua tanah berikut bangunan ruko di Rukan Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1 No. 1 A Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat
Objek Sewa	: Tanah dan Bangunan ruko di Rukan Grand Aries Niaga Jl. Taman Aries Blok E1 No. 1 A Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat
Jangka Waktu	: 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 September 2017.
Ketentuan Sewa	: - Dalam hal jangka waktu sewa berakhir maka Pihak Kedua mendapat prioritas dari Pihak Pertama untuk memperpanjang masa sewa sebelum Pihak Pertama menawarkan kepada pihak ketiga; - Selama jangka waktu sewa Pihak Kedua tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh hak sewa atas objek sewa kepada pihak lain kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

Perjanjian sewa menyewa kantor tersebut adalah merupakan perjanjian dengan pihak terafiliasi.

Perjanjian Untuk Pembelian Helikopter

Perjanjian Pendahuluan Pembelian (Premilinary Sale Contract) yang telah ditandatangani secara lengkap tanggal 22 September 2017 antara Entitas Anak dengan Leonardo S.p.a (“Penjual”), yang mengatur mengenai type unit helikopter yang akan dibeli, harga, hak pembatalan, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.

Perjanjian Entitas Anak dengan Pengguna Jasa Layanan dan Penyediaan Helikopter

- Perjanjian Jasa Pelayanan dan Penyediaan Helicopter No. 073/IKPP-KI/KS/IV/2015 tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya mengatur ruang lingkup jasa pelayanan, objek sewa helikopter, jangka waktu, kewajiban, wilayah operasi, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.
- Perjanjian Sewa Menyewa Helikopter AS 350 B3e No. 001/KI-PJHC/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya mengatur mengenai, ruang lingkup jasa pelayanan, objek sewa helikopter, wilayah operasional, kewajiban, hukum yang berlaku, dan penyelesaian sengketa.
- Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8427) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-10/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT-TD/DE.II/BNPB/5/2017 tanggal 26 Mei 2017 *Junctis*:
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8427) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-10Ad/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/6/2017 tanggal 28 Juni 2017;
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8427) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-11.1/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/6/2017 tanggal 29 Juni 2017;
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8427) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-11.2/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017;

yang pada pokoknya mengatur mengenai ruang lingkup, hak dan kewajiban, objek sewa, jangka waktu hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.

- Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Typer MI-172 Reg.VN-8428) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-11/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT-TD/DE.II/BNPB/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 *Junctis*:
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8428) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-11Ad/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/6/2017 tanggal 28 Juni 2017;
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8428) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-10.1/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/6/2017 tanggal 29 Juni 2017;
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8428) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-10.1Ad/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/6/2017 tanggal 3 Agustus 2017;
 - Perjanjian Pengadaan Jasa Angkutan Udara (Sewa Helikopter Type MI-172 Reg.VN-8428) dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi riau No.Kontrak-10.2/KOMALA-SUMATERA/PPK-DIT.TD/DE.II/BNPB/8/2017 tanggal 4 Agustus 2017;yang pada pokoknya mengatur mengenai ruang lingkup, objek sewa, jangka waktu, hak dan kewajiban, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.

Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Armada Pesawat Helikopter

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Entitas Anak Perseroan saat ini memiliki 5 pesawat helikopter dengan tipe sebagai berikut:

- a. 2 (dua) unit helikopter dengan tipe AS350 B3, dan 1 (satu) unit helikopter dengan tipe AS350 B3e, semuanya buatan Airbus Helicopter yaitu perusahaan pembuat pesawat asal Perancis. Helikopter ini mempunyai spesifikasi antara lain kapasitas mengangkut 6 (enam) penumpang, daya angkut sebesar 1,4 ton dan kecepatan maksimum 140 knot (259 km/jam).

Dengan spesifikasi tersebut diatas, helikopter ini cocok digunakan seperti untuk *aerial work*, pemadam kebakaran (*fire fighting*), pengawasan polisi (*police surveillance*), dan transportasi penumpang (*passanger transport*).



- b. 2 (dua) unit helikopter dengan tipe MI-172 buatan Kazan Helicopter yaitu perusahaan pembuat pesawat asal Rusia. Helikopter ini mempunyai spesifikasi antara lain kapasitas mengangkut 22 (dua puluh dua) penumpang, daya angkut 4 ton dan kecepatan maksimum 135 knot (250 km/jam).



2. Perizinan Usaha

Entitas Anak Perseroan dalam menjalankan operasinya, telah memiliki izin-izin yaitu:

- Izin Usaha: SIUP dan TDP
- Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Nomor SIUAU/NTB-057 dari Kementerian Perhubungan
- Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) Nomor 135-051 dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara
- Perizinan untuk masing-masing pesawat yang dimiliki sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Helikopter dari Kementerian Perhubungan Indonesia:
 - Sertifikat Pendaftaran no 3245, untuk helikopter PK-KIA seri 3710, AS350 B3;
 - Sertifikat Pendaftaran no 3637, untuk helikopter PK-KIE seri 7767, AS350 B3;
 - Sertifikat Pendaftaran no 3910, untuk helikopter PK-KIF seri 8047, AS350 B3e;
 - Izin Khusus Pengoperasian Helikopter Asing, untuk helikopter VN-8427 seri 704C08 dan VN-8428 seri 704C09, model MI-172.
 - b. Sertifikat Kelaikudaraan Standard Pesawat Helikopter dari Kementerian Perhubungan Indonesia:
 - Sertifikat Kelaikudaraan Standard no 3245, untuk helikopter PK-KIA seri 3710;
 - Sertifikat Kelaikudaraan Standard no 3637, untuk helikopter PK-KIE seri 7767;
 - Sertifikat Kelaikudaraan Standard no 3910, untuk helikopter PK-KIF seri 8047;

Sementara untuk helikopter VN-8427 dan VN-8428, masing-masing telah mendapatkan Sertifikat Kelaikudaraan Standard (*Certificate of Airworthiness*) dari *Vietnam Ministry of Transport*.

3. Pelanggan Penyewa Helikopter

Pelanggan penyewa helikopter dari Entitas Anak Perseroan sekarang ini terutama masih dari badan usaha, baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah, dengan sistem sewa kontrak.

Badan usaha swasta menyewa helikopter diantaranya untuk bisa cepat menjangkau lokasi perkebunan sawit perusahaan atau konsesi hutan kayu yang jauh dipelosok dan/atau tersebar di beberapa lokasi, transportasi bagi VIP perusahaan, dan mengatasi keadaan darurat seperti membawa orang sakit ke rumah sakit.

Lembaga pemerintah menyewa helikopter diantaranya untuk menanggulangi bencana seperti bencana kebakaran hutan dan lahan.

4. Sewa Kontrak

Ada dua model Sewa Kontrak yang dibuat antara Entitas Anak Perseroan dengan Penyewa, yaitu:

a. Sewa Kontrak Dengan Helikopter Didedikasikan Penuh

Pesawat milik Entitas Anak Perseroan didedikasikan hanya digunakan oleh pihak Penyewa yang bersangkutan saja sampai berakhirnya kontrak. Biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak Penyewa kepada Entitas Anak Perseroan terdiri dari biaya sewa bulanan per helikopter dan biaya terbang per jam per helikopter.

b. Sewa Kontrak Tanpa Helikopter Didedikasikan Penuh

Pesawat milik Entitas Anak Perseroan tidak didedikasikan hanya digunakan untuk Penyewa yang bersangkutan saja, jadi bisa digunakan untuk Penyewa yang lainnya.

Meskipun tidak didedikasikan penuh, Entitas Anak Perseroan harus selalu mengatur sedemikian rupa dan memastikan bahwa sewaktu-waktu helikopter yang diperjanjikan dalam kontrak akan digunakan oleh Penyewa, maka helikopter tersebut harus tersedia.

Sewa Kontrak model ini berakhir sampai dengan jumlah jam terbang yang ditetapkan dalam Kontrak telah habis, misal untuk 100 jam terbang.

Biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak Penyewa kepada Entitas Anak Perseroan dihitung berdasarkan tarif per jam dikali jumlah jam terbang per helikopter. Tidak ada biaya sewa bulanan per helikopter.

5. Layanan *Spot Charter* Helikopter

Entitas Anak Perseroan juga melayani sewa helikopter dengan waktu pemakaian yang pendek, seperti beberapa jam atau beberapa hari saja.

6. Pengadaan dan Pembiayaan Helikopter

Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pengadaan dan pembiayaan helikopter, melakukan beberapa cara sebagai berikut:

a. Kredit Investasi dari bank

Pada saat prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kredit investasi dari Bank.

- b. *Sales and Lease Back* dengan Perusahaan Pembiayaan
Entitas Anak Perseroan melakukan perjanjian *sales and lease back* dengan PPA Finance untuk membeli 1 (satu) unit helikopter tipe AS350 B3 buatan Airbus Helicopters;
- c. *Financial Lease* dengan Perusahaan Pembiayaan
 - Entitas Anak Perseroan melakukan perjanjian *financial lease* dengan perusahaan pembiayaan di Eropa, untuk pengadaan 1 (satu) unit helikopter tipe AS350 B3e buatan Airbus Helicopters;
 - Entitas Anak Perseroan melakukan perjanjian *financial lease* dengan perusahaan pembiayaan di Hong Kong, untuk pengadaan 2 (dua) unit helikopter tipe MI-172 buatan Kazan Helicopter.

7. Sewa dari Operator Helikopter Lain

Entitas Anak Perseroan menyewa helikopter dari Operator helikopter lain untuk disewakan kembali kepada pelanggannya.

Entitas Anak Perseroan saat ini melakukan transaksi menyewa helikopter dari Operator asal Republic of Kazakhstan dan asal Virgin Islands untuk pelanggan Entitas Anak Perseroan di Palembang.

8. Pembiayaan Modal Kerja

Untuk membiaya modal kerja, Entitas Anak Perseroan melakukan *factoring* piutang usahanya dengan perusahaan pembiayaan, seperti dengan BNI Multifinance dan PPA Finance.

9. Kontrak dengan Pilot Helikopter

Entitas Anak Perseroan mengadakan perjanjian kontrak dengan Pilot helikopter yang telah berpengalaman dan mempunyai izin sebagai Pilot dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia.

Saat ini Entitas Anak Perseroan melakukan kontrak dengan 6 pilot berpengalaman dan berizin untuk mengoperasikan helikopter – helikopter milik Entitas Anak Perseroan.

10. Kontrak dengan Aircraft Maintenance Engineers

Untuk kelancaran pemeliharaan helikopter – helikopter nya, Entitas Anak Perseroan melakukan kontrak dengan para *aircraft maintenance engineers* yang sudah berpengalaman dan berizin. Saat ini sudah mengadakan kontrak dengan 6 orang AMEL (*Aircraft Maintenance Engineers License*).

11. Kontrak dengan Helicopter Landing Officer

Untuk keperluan pendaratan helikopter, Entitas Anak Perseroan melakukan kontrak dengan *Helicopter Landing Officer* (HLO) yang telah memiliki izin dari Dirjen Perhubungan Udara. Saat ini sudah mengadakan kontrak dengan 5 orang HLO berpengalaman dan berizin.

12. Asuransi

Sebagai bagian dari mitigasi risiko usaha, Entitas Anak Perseroan mengasuransikan setiap armada helikopternya. Saat ini perjanjian asuransi dilakukan dengan Asuransi Jasindo.

13. Strategi Usaha

Berdasarkan data dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada tahun 2016, Entitas Anak Perseroan untuk kategori *light helicopter* memiliki jumlah armada yang lebih banyak dibandingkan dengan operator lain.

Strategi Perseroan dan Entitas Anak untuk tumbuh dan menghadapi persaingan usaha adalah sebagai berikut:

a. Menambah Armada Helikopter

Untuk mengejar pertumbuhan, Perseroan dan Entitas Anak perlu menambah armada helikopter. Penambahan ini tidak harus selalu dengan cara membeli sendiri (baik baru maupun bekas), bisa juga dengan sewa dari Operator helikopter lain, atau mengoperasikan helikopter pihak lain yang dititipkan untuk dioperasikan (*joint operation*).

Mengingat pembiayaan helikopter cukup besar, manajemen senantiasa menjalin hubungan baik dengan lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan pembiayaan, untuk mendapat akses kredit investasi atau pembiayaan sewa guna usaha.

Penambahan armada helikopter dilakukan dengan perhitungan yang rasional, dengan memperhatikan kondisi permintaan pasar, peluang dan kecenderungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga tidak menimbulkan masalah investasi yang berlebihan.

b. Memperluas Cakupan Wilayah Kegiatan Pemasaran

Wilayah operasi armada helikopter milik Entitas Anak Perseroan bisa diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu cakupan wilayah kegiatan pemasaran bisa luas untuk memperbanyak pelanggan penyewa.

Salah satu cara efektif memperluas cakupan wilayah pemasaran yaitu dengan membuat *website*. Melalui *website* tersebut, calon pelanggan penyewa dapat melihat informasi mengenai berbagai layanan jasa yang disediakan dan mempermudah calon pelanggan menghubungi Perseroan dan Entitas Anak.

c. Terus menerus meningkatkan mutu layanan

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa, Perseroan dan Entitas Anak berusaha memberikan layanan yang terbaik baik dan terus-menerus meningkatkan mutu layanan terhadap pelanggan penyewa helikopter.

Supaya dapat memberikan mutu layanan yang baik bagi pelanggan, Entitas Anak senantiasa:

- memelihara dan merawat setiap helikopter dengan sangat baik sesuai dengan standar prosedur pemeliharaan dari setiap jenis helikopter, dan dilakukan oleh *aircraft maintenance engineers* yang berpengalaman dan mempunyai izin.
- Untuk *spare part* helikopter yang rusak, penggantian dilakukan secepat mungkin dan langsung dengan pabrikan pembuat pesawat helikopter. Pabrikan pembuat helikopter telah berkomitmen mendukung penuh untuk mengganti setiap *spare parts* yang rusak dengan cepat.
- Senantiasa mengingatkan Pilot dan *crew* pesawat helikopter untuk melayani pelanggan penyewa dengan baik, ramah, sopan, dan menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan prosedur keselamatan penerbangan sipil agar penyewa merasa aman.

Perseroan dan Entitas Anak juga terbuka untuk menerima tanggapan dan/atau masukan dari pelanggan penyewa atas pelayanan jasa yang diberikan.

d. Perjanjian Sewa Kontrak Yang Fleksibel

Perseroan dan Entitas Anak tidak kaku dalam melakukan perjanjian sewa kontrak dengan calon pelanggan penyewa, bisa fleksibel, bisa di-*customized* dengan prinsip *win-win* untuk kedua belah pihak.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan rasio sebanyak-banyaknya **30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan konsolidasi setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2018**, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sejak berdiri tahun 2007 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 13 tanggal 12 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	250.000.000	27.500.000.000	100
Total		250.000.000	27.500.000.000	100

PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Pasar Modal.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari – 5 Maret 2018 dengan kisaran Harga Penawaran Rp 110 (seratus sepuluh Rupiah) sampai dengan Rp 125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan kegiatan penajakan kepada para Investor, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada harga Rp 110 (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sepakat menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp 110 (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Penentuan Harga Penawaran ini, juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan dari calon Investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dan perkembangan terakhir Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Uraian tata cara pemesanan saham berikut ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017.

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan / atau Lembaga atau Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-003/SHM/KSEI/0118 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham-saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"), tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 26 Maret 2018.
- b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan atas saham – saham dalam penitipan kolektif;
- c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening Efek;
- d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening Efek di KSEI;

- e. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening Efek berhak atas dividen, bonus, HMETD, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari penitipan kolektif di KSEI, setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian melalui C-BEST yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS") selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- k. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, yaitu pada tanggal 19 -20 Maret 2018. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjataan

Tanggal penjataan dimana penjataan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah tanggal 22 Maret 2018.

8. Syarat – Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah serta dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang : UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta 10230
Atas nama: PT UOB KAY HIAN SEKURITAS QQ IPO JAYA TRISHINDO
No. Rekening : 327-305-303-2

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, cek tersebut harus merupakan cek atas nama atau milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Seluruh pembayaran harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 15:00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjataan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama masa Penawaran Umum Perdana.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjataan Saham

Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjataan dengan sistem kombinasi yaitu Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*) dan Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

A. Penjataan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjataan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjataan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjataan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjataan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum;
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Dalam Penawaran Umum Perdana ini, Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; danterdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional (menurut jumlah yang dipesan) kepada para pemesan:
 - 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;
- b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham dari:
 - 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2. Direktur, komisaris, dan / atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga; dan

terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- ii. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-17/PM/2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

4. Penundaan Masa Penawaran Umum Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - a) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan/atau
 - b) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 Lampiran 11; dan
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah Indeks Hara Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit

50% (lima puluh persen) dari total penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi dasar penundaan;

- 2) Dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham.;
- 3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

5. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan saham yang ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, jika pesanan saham sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai tanggal pengembalian uang pemesanan. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

6. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut in adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.03ADD2/PH-JT/MI-SS/III/2018

Jakarta, 8 Maret 2018

Kepada Yang Terhormat

PT JAYA TRISHINDO Tbk

Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No.1A
Jl. Taman Aries, Meruya-Kembangan
Jakarta Barat

u.p. Direksi

PERIHAL: Pendapat Hukum terhadap PT JAYA TRISHINDO Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham ("Go Public")

Sehubungan dengan rencana **PT JAYA TRISHINDO Tbk**, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan Jakarta Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp110,00; dengan disertai penerbitan Waran Seri I sejumlah sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Waran Seri I, dimana setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham berhak memperoleh 1 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham biasa atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan Rp400,00 ("**Penawaran Umum**"); kami Konsultan Hukum **Irma & Solomon**, selaku konsultan hukum independen terdaftar dengan STTD No.383/PM/STTD-KH/2001 dan STTD No.564/PM/STTD-KH/2005 serta anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dengan nomor anggota 200131 dan 200609, telah ditunjuk oleh Perseroan, untuk melakukan pemeriksaan atau uji tuntas dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") hingga tanggal laporan atas hasil Pemeriksaan Hukum ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek hukum dari Perseroan serta aspek hukum dari Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang berwenang di Indonesia.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam:

- Laporan Pemeriksaan Hukum No.02ADD/LPH-JT/MI-SS/II/2018 tanggal 8 Februari 2018;
- Tambahan Laporan Pemeriksaan Hukum No.02ADD2/LPH-JT/MI-SS/II/2018 tanggal 21 Februari 2018; dan
- Tambahan Laporan pemeriksaan Hukum No.02ADD3/LPH-JT/MI-SS/III/2018 tanggal 8 Maret 2018

(Selanjutnya seluruhnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").

Seluruh dana yang diperoleh dari:

- hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal di PT Komala Indonesia sebagai anak perusahaan Perseroan pada nilai nominal. Selanjutnya oleh PT Komala Indonesia akan digunakan untuk kebutuhan investasi (*capital expenditures*) sebesar 60% berupa:
 - a) uang muka pembelian 1 unit helikopter bekas tipe AS 350 B3;
 - b) uang muka pembelian 1 unit helikopter baru tipe AW 109 Trekker dan
 - c) pembuatan hanggardan untuk kebutuhan modal kerja (*working capital*) sebesar 40% antara lain untuk pembelian bahan bakar avtur, spareparts helikopter, biaya pemeliharaan helikopter, gaji pilot dan crew, biaya asuransi, biaya pelatihan pilot dan crew dan lainnya yang berhubungan dengan modal kerja; serta
 - dan untuk kebutuhan modal kerja (*working capital*) sebesar 40% antara lain untuk pembelian bahan bakar avtur, spareparts helikopter, biaya pemeliharaan helikopter, gaji pilot dan crew, biaya asuransi, biaya pelatihan pilot dan crew dan lainnya yang berhubungan dengan modal kerja; serta
 - hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk meningkatkan penyertaan modal di PT Komala Indonesia sebagai anak perusahaan Perseroan pada nilai nominal. Selanjutnya oleh PT Komala Indonesia akan digunakan seluruhnya untuk kebutuhan modal kerja
- ("Penggunaan Dana").

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

I. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN HUKUM

- A. Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami telah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang kami peroleh hingga tanggal 8 Maret 2018 berupa:
 - 1. Dokumen asli dan/atau salinan dan/atau fotokopi dari:
 - a. Akta Pendirian Perseroan;
 - b. Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa lainnya, dan Akta-akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sejak pendirian Perseroan;
 - c. surat-surat izin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - d. bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan baik harta tetap maupun harta bergerak;
 - e. perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan saham ("Anak Perusahaan");
 - f. perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak lain;

- g. dokumen-dokumen yang menerangkan mengenai ada tidaknya gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara yang wilayah hukumnya mencakup domisili Perseroan, permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia serta pengadilan pajak, baik yang melibatkan atau diajukan oleh/terhadap Perseroan ataupun anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dalam jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, perselisihan perburuhan di pengadilan hubungan industrial yang menyangkut Perseroan, maupun sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan;
 - h. dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;
2. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik yang diberikan secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak lain yang berwenang di Perseroan;
 3. Selain pemeriksaan atas hal-hal di atas, kami juga melakukan pemeriksaan fisik atas lokasi kantor yang dipergunakan Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.
- B. Pemeriksaan Hukum ini tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Anak Perusahaan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Republik Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan Pemeriksaan Hukum dan memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

- A. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- B. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- C. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh pihak yang berwenang dari Perseroan kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;

- D. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

IV. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, kami sampaikan Pendapat Hukum yang menggantikan pendapat hukum kami No.03/PH-JT/MI-SS-LW/II/2018 tanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut:

Pendapat Hukum atas Perseroan

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT JAYA TRISHINDO No.19 tanggal 16 April 2007 *juncto* Akta Perubahan No.17 tanggal 18 Januari 2008, keduanya dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, Citeureup, yang telah:
 - a. disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-06130.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 8 Februari 2008.
 - b. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009205.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008; dan
 - c. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6845.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah dalam rangka Penawaran Umum yaitu berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAYA TRISHINDO No.6 tanggal 5 Januari 2018, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:

- a. disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0000120.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000758.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018; dan
- b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 5 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0003516 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000758.AH.01.11.Tahun 2018 tertanggal 5 Januari 2018 (“**Akta No.6/2018**”).

Ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (“**Peraturan IX.J.1**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).

Pendirian Perseroan dan perubahan anggaran dasar Perseroan berdasarkan akta-akta perubahan anggaran dasar yang dibuat setelah pendirian Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Maksud dan tujuan Perseroan hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa dan penyewaan alat transportasi udara dengan atau tanpa operatornya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. kegiatan usaha utama:

- i) melakukan penyewaan alat transportasi udara dengan atau tanpa operatornya seperti pesawat udara dan helikopter;
- ii) memberikan jasa pemasaran atau marketing khususnya untuk memasarkan kegiatan jasa angkutan udara niaga tak berjadwal;
- iii) melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
- iv) menjalankan usaha dalam bidang jasa agen perjalanan.

b. kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah:

- i) melakukan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan suku cagang dan kelengkapan lainnya dari alat transportasi udara;
- ii) mengadakan perjanjian dengan pihak lain sehubungan penyewaan pesawat dan helikopter serta pemasaran kegiatan jasa angkutan udara niaga tak berjadwal;
- iii) melakukan kegiatan perdagangan, termasuk ekspor impor interinsular dan lokal baik atas perhitungan sendiri maupun atas pihak lain, secara komisi serta menjadi grosir, leveransir, dealer, distributor ageb, perwakilan dari perusahaan lain di dalam negeri maupun di luar negeri ;
- iv) menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-hal yang menunjang kegiatan usaha utama;

- v) melakukan reservasi atau pemesanan termasuk pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- vi) melakukan kegiatan sebagai perantara penjualan paket wisata termasuk paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
- vii) melakukan pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek wisata dan daya tarik wisata dan termasuk melakukan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- viii) menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan dan/atau yang berkaitan serta menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disebutkan pada butir (a) di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan anggaran dasarnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur permodalan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah berdasarkan:

- a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAYA TRISHINDO No.31 tanggal 22 Desember 2017, dibuat oleh Dahlia, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
 - 1) disetujui oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0028099.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167774.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
 - 2) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah diterima dibawah No. AHU-AH.01.03-0207273 tanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167774.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017; dan

b. Akta No.6/2018; yaitu:

Permodalan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.200.000.000	220.000.000.000
Modal Ditempatkan	569.000.000	56.900.000.000
Modal Disetor	569.000.000	56.900.000.000
Portepel	1.631.000.000	163.100.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Startel Communication	398.300.000	39.830.000.000	70
PT Komala Tri Varia	170.700.000	17.070.000.000	30
Jumlah	569.000.000	56.900.000.000	100

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan telah dilakukan penyetorannya oleh para pemegang saham Perseroan, yang dilakukan secara penuh dengan uang tunai, konversi hutang Perseroan kepada pemegang saham Perseroan serta kapitalisasi saldo laba Perseroan sampai dengan tahun buku 31 Desember 2016. Konversi hutang tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesinambungan struktur permodalan Perseroan sejak pendirian hingga saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan perolehan saham dari Perseroan oleh PT Startel Communication sebanyak 7.777 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) saham dan PT Komala Tri Varia sebanyak 3.333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, PT Startel Communication dan PT Komala Tri Varia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

5. PT Startel Communication dan PT Komala Tri Varia selaku pemegang saham utama Perseroan berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan berdasarkan Akta No.6/2018, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Edwin Widjaja
Direktur Independen : Erwin Budi Satria

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gouw Erena Goetama
Komisaris Independen : Benny Sidarta

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Direktur Independen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No.1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Direksi Perseroan telah mengadakan Daftar Khusus sebagai pemenuhan atas kewajiban Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UUPT.

Perseroan telah mengangkat Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Fungsi Komite Nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, hal mana sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 8 Januari 2018:
 - a. Perseroan maupun aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
 - b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
 - c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - d. Perseroan tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
 - f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh masing-masing Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 8 Januari 2018, masing-masing Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material.

8. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah:
 - a. melakukan pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
 - b. mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 - c. membuat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - d. memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.7 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Upah Minimum.
10. Hingga tanggal pendapat hukum ini Perseroan tidak memiliki harta kekayaan dalam bentuk harta tetap maupun bergerak kecuali penyertaan saham pada PT Komala Indonesia ("KI") sebanyak 56.431 (lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 99,002% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan dalam KI.

Penyertaan Perseroan pada KI telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam KI hingga tanggal Pendapat

Hukum ini tidak menjadi obyek perkara atau sengketa.

Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam KI hingga tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain.

11. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memperoleh fasilitas pinjaman maupun pembiayaan dari bank, perusahaan pembiayaan maupun institusi keuangan lainnya.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha Perseroan telah dibuat secara sah, mengikat Perseroan dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pendapat Hukum atas Anak Perusahaan

KI

KI didirikan, adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KOMALA INDONESIA No.08 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah:

1. disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-14325.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 19 Maret 2012;
2. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0023820.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012;
3. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.35 tanggal 30 April 2013, Tambahan No.21335.

Anggaran Dasar KI telah mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Komala Indonesia No.32 tanggal 22 Desember 2017, dibuat oleh Dahlia, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah:

- disetujui oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0028100.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167775.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017;
- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 Desember 2017 dengan No.AHU-AH.01.03-0207274 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0167775.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 (“**Akta No.32/2017**”).

Perubahan anggaran dasar KI telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UUPT.

Struktur permodalan KI adalah berdasarkan Akta No.32/2017, yaitu:

Permodalan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	220.000	220.000.000.000
Modal Ditempatkan	57.000	57.000.000.000
Modal Disetor	57.000	57.000.000.000
Portepel	163.000	163.000.000.000

Susunan pemegang saham KI dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Perseroan	56.431	56.431.000.000	99,002
Edwin Widjaja	569	569.000.000	0,008
Jumlah	57.000	57.000.000.000	100

Riwayat struktur permodalan dan perubahan susunan pemegang saham KI adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Anggaran Dasar KI.

Atas setiap peningkatan modal ditempatkan dan disetor KI telah dilakukan penyetorannya oleh para pemegang saham Perseroan, yang dilakukan secara penuh dengan uang tunai.

Maksud dan tujuan KI hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah Pengangkutan udara Niaga tidak berjadwal. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa perusahaan angkutan udara niaga, menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang muatan (padat, cair, benda pos, hewan dll) didalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
- b. Jasa penyewaan angkutan udara, meliputi penyewaan pesawat udara dan helikopter kepihak lain atau menyewakan ke pihak lain untuk menunjang jasa angkutan udara, perwakilan/owner representative perusahaan penerbangan luar negeri;
- c. Melakukan pemeliharaan, perbaikan serta pengadaan suku cadang dan kelengkapan lainnya.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh KI hingga tanggal Pendapat Hukum ini tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan KI sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar KI serta sesuai dengan izin-izin yang dimiliki KI.

KI telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatannya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan izin-izin tersebut, dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, KI telah:

- a. melakukan pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- b. mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- c. membuat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- d. memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.7 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Upah Minimum.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KI pada tanggal Pendapat Hukum ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Komala Indonesia No.8 tanggal 9 Agustus 2017, dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor, yang telah:

- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan NoAHU-AH.01.03-0162983; dan
- didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0101360.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017,

adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur : Edwin Widjaja

Komisaris
Komisaris : Gouw Erene Goetama

Anggota Direksi dan Komisaris KI tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar KI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Direksi KI telah mengadakan Daftar Khusus sebagai pemenuhan atas kewajiban Direksi KI berdasarkan Pasal 50 ayat 2 UUPA.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan Direksi KI tertanggal 8 Januari 2018:

1. KI maupun aset-aset yang dimiliki oleh KI tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
2. KI maupun perizinan dan aset-aset yang dimiliki oleh KI tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi;
3. KI tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

4. KI tidak sedang/telah mengajukan maupun terhadap KI tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan KI tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. KI tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
6. KI tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
7. KI tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia;
8. KI tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia;
9. KI tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. KI maupun perizinan dan aset-aset KI tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi /klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha KI.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan dengan didukung oleh Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Komisaris KI tertanggal 8 Januari 2018, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris KI tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material.

Hingga tanggal Pendapat Hukum ini, KI memiliki harta kekayaan berupa 1 (satu) helikopter yang terdaftar atas nama KI dan menguasai 4 (empat) helikopter. Seluruh helikopter tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa dengan pihak manapun. Kepemilikan dan atau penguasaan atas seluruh helikopter tersebut adalah benar dan sah serta telah didukung pula oleh dokumen-dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah.

Aset-aset atau harta kekayaan KI baik yang dimiliki berupa 1 (satu) helikopter PK-KIE dan 2 (dua) helikopter yang dikuasainya yaitu PK-KIA dan PK KIF telah diasuransikan dengan polis asuransi dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh KI dengan pihak lain sehubungan dengan kegiatan usaha KI serta yang diperlukan untuk kelancaran usaha KI telah dibuat secara sah, mengikat KI dan sesuai dengan anggaran dasar KI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tidak mengandung pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam Perseroan, tidak saling bertentangan satu sama lain serta tidak mengandung pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Pendapat Hukum atas Rencana Penawaran Umum

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta No.6/2018. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan korporasi yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum.
2. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (*portepel*) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam rangka Penawaran Umum, telah dibuat dan ditandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.13 tanggal 12 Januari 2018 *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 16 tanggal 7 Februari 2018 *juncto* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.21 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Dahlia, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek;
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.14 tanggal 12 Januari 2018, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek;
 - c. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.15 tanggal 12 Januari 2018 *juncto* Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No. 17 tanggal 7 Februari 2018 *juncto* Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.22 tanggal 8 Maret 2018 dibuat dihadapan Dahlia, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Jaya Trishindo Tbk No.15 tanggal 12 Januari 2018, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek;

yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Terkait dengan Penggunaan Dana:
 - a. KI adalah Perusahaan Terkendali Perseroan dan peningkatan modal yang akan dilakukan oleh Perseroan pada KI tersebut adalah transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, (“Peraturan No.IX.E.1”), namun mengingat penyertaan Perseroan pada KI telah dilakukan sebelum Penawaran Umum dan peningkatan modal yang akan dilakukan oleh Perseroan pada KI sebagai pelaksanaan Penggunaan Dana merupakan transaksi berkelanjutan serta telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum, maka berdasarkan butir 2 huruf c Peraturan No.IX.E.1, transaksi peningkatan modal tersebut dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Peraturan No.IX.E.1;
 - b. Dalam hal nilai transaksi peningkatan modal/penyertaan Perseroan pada KI melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan setelah Penawaran Umum, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No.IX.E.2”), namun mengingat Perseroan akan melakukan transaksi peningkatan modal pada KI selaku Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor KI, maka berdasarkan angka 3 huruf a Peraturan No.IX.E.2, transaksi peningkatan modal pada KI tersebut dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam angka 2 Peraturan No.IX.E.2.
 - c. KI telah memperoleh persetujuan dari PT PPA Finance (“PPAF”) sebagaimana ternyata dalam Surat PPAF kepada KI No.S-069/PPAF-DIR/I-2018 tanggal 16 Januari 2018 sehubungan dengan adanya pembatasan atas peningkatan modal dalam perjanjian fasilitas pembiayaan dari PPAF.
 - d. Perseroan wajib mematuhi Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu:
 - 1) wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
 - 2) wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
 - 3) apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib:
 - a) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK; dan
 - b) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
 - 4) dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.
5. Berkenaan dengan rencana Penawaran Umum, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh ijin atau persetujuan dari instansi yang berwenang atau pihak ketiga

lain maupun pemberitahuan kepada instansi yang berwenang atau pihak ketiga lain selain dari PPAF berkenaan dengan Penggunaan Dana.

6. Aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum telah sesuai dengan dokumen hukum yang diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.
7. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Irma & Solomon



Mathilda Irma Untadi, S.H.
STTD No.383/PM/STTD-KH/2001



Sihar Solomon Siahaan, S.H.
STTD No.564/PM/STTD-KH/2005

Tembusan:

1. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang Terhormat Direksi PT UOB Kay Hian Sekuritas.

XI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DAN
31 DESEMBER 2016 DAN 2015 DAN
UNTUK PERIODE SEMBILAN BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 DAN 2016
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

No. 006/SK/JT/II/2018

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Edwin Widjaja
Alamat Kantor : Rukan Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E1 No. 1A, Meruya Utara
Kembangan - Jakarta Barat
Alamat Domisili : Puri Indah Blok J.2/15 RT/RW 010/03
Kembangan Selatan - Jakarta Barat
Nomor Telepon : (021) 58900300
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Erwin Budi Satria
Alamat Kantor : Rukan Grand Aries Niaga
Jl. Taman Aries Blok E1 No. 1A, Meruya Utara
Kembangan - Jakarta Barat
Alamat Domisili : Jl. Deplu Raya No.21, Rt.001/Rw.003 Bintaro Pesanggrahan
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 58900300
Jabatan : Direktur Independen

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2018






Edwin Widjaja
Direktur Utama

Erwin Budi Satria
Direktur Independen

Halaman ini sengaja dikosongkan



Morison KSi
Independent member

TJAHJADI & TAMARA

Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Gedung Jaya 4th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia
Phone : (62-21) 31908550
Fax : (62-21) 31908502

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 0099/T&T-GA/JT-1/2018

Pemegang Saham, Komisaris dan Direktur PT Jaya Trishindo Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk dan entitas anaknya tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disajikan sebagai angka-angka komparatif terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat atau bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Jaya Trishindo Tbk di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 0095/T&T-GA/JT-1/2018 tanggal 8 Januari 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Jaya Trishindo Tbk dan entitas anaknya untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan perubahan atas penyesuaian penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta perubahan pada laporan arus kas konsolidasian dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

TJAHJADI & TAMARA



Juparto Tjahjadi
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168

7 Februari 2018

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	30 September	31 Desember	
		2017	2016	2015
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	2d,2f,4,30	8.911.160.695	12.504.549.964	4.738.231.034
Piutang usaha - pihak ketiga	2f,5,30	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848
Piutang lain-lain - pihak ketiga	2f,30	-	122.500.000	122.500.000
Biaya dibayar di muka	2g,6	949.646.506	904.311.803	728.445.072
Bank garansi	2f,30	1.403.168.000	429.952.000	441.440.000
JUMLAH ASET LANCAR		54.851.679.279	17.380.887.780	10.349.425.954
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang lain-lain - pihak berelasi	2e,2f,26,30	665.301.295	5.180.085.219	1.990.211.119
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 18.314.265.935 pada tanggal 30 September 2017, Rp 14.983.400.111 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 11.935.987.606 pada tanggal 31 Desember 2015	2h,2i,2j,7	148.235.974.581	89.841.840.489	78.360.807.994
Uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang	8	12.184.019.948	41.330.572.744	51.002.753.187
Aset pajak tangguhan	2m,12b	3.715.373	-	-
Setoran jaminan	2f,9,30	3.970.093.603	-	606.980.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		165.059.104.800	136.352.498.452	131.960.752.300
JUMLAH ASET		219.910.784.079	153.733.386.232	142.310.178.254

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>30 September 2017</u>	<u>31 Desember</u>	
			<u>2016</u>	<u>2015</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	2f,10,30	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845
Utang pembiayaan	2f,2k,11,30	32.528.421.174	24.925.626.250	17.096.454.401
Utang pajak	2m,12a	567.465.683	1.709.815.482	210.182.425
Beban akrual	2f,13,30	2.785.264.960	368.051.573	678.735.214
Setoran dari pelanggan	2i,14	13.064.825.900	2.565.883.414	1.761.526.268
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	2f,30			
Utang bank	15	16.300.832.020	21.103.145.912	28.333.798.810
Sewa pembiayaan	2i,16	10.891.781.768	9.922.059.469	26.375.007.880
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		96.665.884.040	62.305.804.172	80.530.956.843
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang lain-lain - pihak berelasi	2e,2f,26,30	-	45.542.500.000	45.540.000.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	2n,17	91.273.865	112.304.571	65.365.851
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2m,12b	107.216.243	343.102.958	281.633.361
Utang jangka panjang - setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun:				
Sewa pembiayaan	2f,2i,16,30	65.516.403.643	36.602.147.652	11.429.996.258
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		65.714.893.751	82.600.055.181	57.316.995.470
JUMLAH LIABILITAS		162.380.777.791	144.905.859.353	137.847.952.313

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<u>Catatan</u>	<u>30 September 2017</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal			
Rp 1.000.000 per saham			
Modal dasar - 46.540 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 45.790 saham pada tanggal 30 September 2017 dan 250 saham pada tanggal - tanggal 31 Desember 2016 dan 2015	18	45.790.000.000	250.000.000
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya		11.169.451.295	7.916.446.680
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		56.959.451.295	8.166.446.680
Kepentingan nonpengendali	2b,19	570.554.993	661.080.199
		57.530.006.288	8.827.526.879
		8.827.526.879	4.462.225.941
JUMLAH EKUITAS		57.530.006.288	8.827.526.879
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		219.910.784.079	142.310.178.254

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
		2017	2016	2016	2015
PENDAPATAN	2l,20	87.702.963.102	50.786.001.580	71.390.391.829	49.978.472.430
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2l,21	(66.780.085.714)	(40.826.560.964)	(53.830.373.315)	(29.544.896.284)
LABA BRUTO		20.922.877.388	9.959.440.616	17.560.018.514	20.433.576.146
Beban usaha	2l,22	(4.468.858.616)	(3.567.359.758)	(5.258.966.067)	(4.400.783.331)
Pendapatan operasi lain	2i,2l,23	1.113.604.791	3.834.046.556	3.834.046.556	-
Beban operasi lain	2i,2l,7	(360.441.574)	-	-	-
Rugi selisih kurs -neto	2d	(3.173.111.236)	(367.284.753)	(726.338.368)	(2.738.247.816)
LABA USAHA		14.034.070.753	9.858.842.661	15.408.760.635	13.294.544.999
Penghasilan keuangan	2l	27.430.228	9.428.203	20.106.993	20.581.412
Biaya keuangan	2l,24	(9.890.370.655)	(5.817.780.031)	(9.702.879.064)	(8.963.151.874)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		4.171.130.326	4.050.490.833	5.725.988.564	4.351.974.537
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2m,12b				
Kini		(1.181.312.875)	(765.212.875)	(1.279.432.750)	(893.885.122)
Tangguhan		253.396.505	(54.815.602)	(66.415.917)	632.961.614
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(927.916.370)	(820.028.477)	(1.345.848.667)	(260.923.508)
LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		3.243.213.956	3.230.462.356	4.380.139.897	4.091.051.029
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali program pensiun manfaat pasti	2n,17	55.177.670	(14.838.959)	(19.785.279)	9.447.289
Pajak penghasilan terkait	2m,12b	(13.794.417)	3.709.740	4.946.320	(2.361.822)
Penghasilan komprehensif lain - neto setelah pajak		41.383.253	(11.129.219)	(14.838.959)	7.085.467
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		3.284.597.209	3.219.333.137	4.365.300.938	4.098.136.496

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk				
Kepentingan nonpengendali	3.212.052.969 31.160.987	3.198.525.558 31.936.798	4.336.736.981 43.402.916	4.051.040.229 40.010.800
Jumlah	3.243.213.956	3.230.462.356	4.380.139.897	4.091.051.029
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk				
Kepentingan nonpengendali	3.253.004.615 31.592.594	3.187.343.971 31.989.166	4.322.046.410 43.254.528	4.058.054.841 40.081.655
Jumlah	3.284.597.209	3.219.333.137	4.365.300.938	4.098.136.496
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	93.360	12.794.102	17.346.948	16.204.161
20,25				

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Jumlah Ekuitas - Neto
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	
Saldo 1 Januari 2015	250.000.000	(463.654.571)	(213.654.571)	577.744.016	364.089.445
Jumlah laba komprehensif tahun 2015	-	4.058.054.841	4.058.054.841	40.081.655	4.098.136.496
Saldo 31 Desember 2015	250.000.000	3.594.400.270	3.844.400.270	617.825.671	4.462.225.941
Jumlah laba komprehensif periode Januari - September 2016	-	3.187.343.971	3.187.343.971	31.989.166	3.219.333.137
Saldo 30 September 2016	250.000.000	6.781.744.241	7.031.744.241	649.814.837	7.681.559.078

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas - Neto
Saldo 1 Januari 2016	250.000.000	3.594.400.270	3.844.400.270	617.825.671	4.462.225.941
Jumlah laba komprehensif tahun 2016	-	4.322.046.410	4.322.046.410	43.254.528	4.365.300.938
Saldo 31 Desember 2016	250.000.000	7.916.446.680	8.166.446.680	661.080.199	8.827.526.879
Penambahan modal saham melalui konversi pinjaman	18, 32	45.540.000.000	-	-	45.540.000.000
Pelepasan Entitas Anak	1b	-	-	(122.117.800)	(122.117.800)
Jumlah laba komprehensif periode Januari - September 2017	-	3.253.004.615	3.253.004.615	31.592.594	3.284.597.209
Saldo 30 September 2017	45.790.000.000	11.169.451.295	56.959.451.295	570.554.993	57.530.006.288

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan	58.033.775.523	30.811.418.605	73.093.984.810	48.150.157.067
Penerimaan dari pendapatan operasi lain	1.113.206.991	813.912.977	813.912.977	-
Penerimaan kas dari pendapatan bunga	27.430.228	9.428.203	20.106.993	20.581.412
Pembayaran kas kepada pemasok	(39.936.139.380)	(26.202.971.659)	(48.616.087.479)	(26.945.289.975)
Pembayaran kas kepada karyawan	(4.010.595.908)	(2.703.679.565)	(4.268.002.264)	(4.907.690.728)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(2.071.449.449)	(1.826.229.200)	(2.591.860.656)	(3.182.825.878)
Pembayaran biaya keuangan	(9.230.940.212)	(5.817.780.031)	(10.193.359.259)	(8.632.240.890)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.019.318.952)	(765.212.875)	(1.226.463.674)	(881.665.974)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	2.905.968.841	(5.681.113.545)	7.032.231.448	3.621.025.034
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	8 (7.044.972.908)	(844.703.812)	(1.978.248.314)	(40.410.923.500)
Pencairan (pembayaran) setoran jaminan	9 (3.970.093.603)	606.980.000	606.980.000	(358.180.000)
Penempatan bank garansi	(973.216.000)	-	-	(441.440.000)
Perolehan aset tetap	7 (33.500.000)	-	(9.145.000)	(31.012.711.045)
Pengembalian uang muka perolehan helikopter	8 -	7.170.554.159	7.511.928.757	4.104.522.955
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(12.021.782.511)	6.932.830.347	6.131.515.443	(68.118.731.590)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan utang pembiayaan	11 7.602.794.924	6.791.458.618	7.829.171.849	13.870.735.823
Kenaikan (penurunan) piutang lain-lain - pihak berelasi	4.265.563.925	1.330.609.202	(3.189.874.100)	(1.781.850.921)
Pelepasan entitas anak	1b 127.500.000	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka panjang	15 (4.802.313.892)	(6.348.188.732)	(7.230.652.898)	(5.000.094.315)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(1.668.620.556)	(976.921.828)	(2.808.572.812)	(4.203.378.995)
Kenaikan (penurunan) utang lain-lain - pihak berelasi	(2.500.000)	-	2.500.000	32.665.652.851
Penerimaan utang bank jangka panjang	15 -	-	-	33.333.893.125
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	5.522.424.401	796.957.260	(5.397.427.961)	68.884.957.568

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
		2017	2016	2016	2015
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK		(3.593.389.269)	2.048.674.062	7.766.318.930	4.387.251.012
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN		12.504.549.964	4.738.231.034	4.738.231.034	350.980.022
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	4	8.911.160.695	6.786.905.096	12.504.549.964	4.738.231.034

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jaya Trishindo Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 16 April 2007, yang kemudian diubah dengan Akta No. 17 tanggal 18 Januari 2008, yang keduanya dibuat di hadapan Elizabeth Widyawati Santosa, SH, Notaris di Bogor. Akta pendirian Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-06130.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tambahan No. 6845 tanggal 23 Mei 2008. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH No. 14 tanggal 13 Maret 2017 mengenai peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006574.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 (Catatan 18).

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang agen perjalanan wisata. Sesuai dengan perubahan anggaran dasar Perusahaan pada tanggal 20 November 2017, kegiatan usaha Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan, jasad an penyewaan alat transportasi udara (Catatan 35a). Perusahaan berkedudukan di Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No. 1A, Jalan Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Perusahaan beroperasi secara komersial pada bulan November 2015.

PT Startel Communication adalah entitas induk terakhir Perusahaan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut “Grup”).

b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Tahun Operasi Komersial	Persentase Kepemilikan Efektif			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)		
				30 September 2017	31 Desember		30 September 2017	31 Desember	
				2017	2016	2015	2017	2016	2015
PT Komala Indonesia	Jakarta	Pengangkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal	2013	99%	99%	99%	220.422	153.131	141.848
PT Eksekutif Anugerah Transportasi (EAT)*	Jakarta	Perdagangan dan Jasa	-	-	51%	51%	-	259	259

*) EAT telah dijual dan tidak dikonsolidasikan sejak 25 September 2017.

PT Komala Indonesia (“Komala”)

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Dirhamdan, SH, Perusahaan dan Edwin Widjaja mendirikan Komala dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 75% dan 25%. Akta pendirian Komala tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14325.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012.

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 53 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH, Perusahaan mengakuisisi 11.040 saham atau setara dengan 24% kepemilikan saham Komala dari Edwin Widjaja dengan harga perolehan sebesar Rp 11.040.000.000, sehingga persentase kepemilikan meningkat dari 75% menjadi 99%.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

PT Komala Indonesia ("Komala") (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017, Komala memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal No. SIUAU/NTB-057 tanggal 16 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berlaku selama Komala masih menjalankan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan Sertifikat Operator Pesawat Udara ("AOC") No. 135-051 tanggal 9 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berlaku hingga tanggal 8 Januari 2019.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Komala mengoperasikan helikopter dengan jumlah sebagai berikut:

	<u>30 September</u> <u>2017</u>	<u>31 Desember</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kepemilikan langsung	1 unit	1 unit	1 unit
Sewa pembiayaan dengan hak opsi	4 unit	2 unit	2 unit
Sewa operasi	1 unit	2 unit	1 unit

PT Eksekutif Anugerah Transportasi ("EAT")

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dirhamdan, SH, Perusahaan dan Rudy Gunawan mendirikan EAT dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 51% dan 49%. Akta pendirian EAT tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-14524.40.10.2014 tanggal 24 Juni 2014.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 25 September 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH, para pemegang saham EAT menyetujui penjualan seluruh saham EAT milik Perusahaan sebanyak 1.275 saham kepada Steve Indrawan. Penjualan saham tersebut telah dinyatakan dalam perjanjian jual beli saham tanggal 25 September 2017, dimana Perusahaan menjual seluruh kepemilikan saham EAT kepada Steve Indrawan, pihak ketiga, dengan harga jual sebesar Rp 127.500.000. Sehubungan dengan penjualan tersebut, Perusahaan membukukan laba pelepasan entitas anak sebesar Rp 397.800 (Catatan 23) dan Perusahaan tidak lagi mengkonsolidasikan laporan keuangan EAT sejak tanggal 25 September 2017.

c. Komisaris, Direktur dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Amastasia Dau, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-15262.40.22.2014 tanggal 23 Juni 2014, susunan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Leonard Chendra

Direktur : Edwin Widjaja

Manajemen kunci meliputi Komisaris dan Direktur Grup.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Komisaris, Direktur dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan Grup masing-masing adalah sejumlah 28, 27 dan 26 karyawan (tidak diaudit).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 7 Februari 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh Grup secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntans Indonesia dan Peraturan Bapepam dan LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013, No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Grup menerapkan PSAK 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan menggunakan metode langsung.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi;
- jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode/tahun pelaporan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan dalam Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Perusahaan menerapkan PSAK 65 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Konsolidasian". PSAK 65 (Revisi 2013) mendasarkan prinsip yang telah ada dengan mengidentifikasi konsep pengendalian sebagai faktor utama dalam menentukan apakah entitas harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk. Standar ini memberikan petunjuk tambahan untuk membantu dalam kondisi penentuan pengendalian sulit untuk dinilai. Dalam prinsip yang baru, Entitas Induk mengendalikan suatu entitas ketika Entitas Induk terekspos terhadap, atau memiliki hak atas, pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Efektif tanggal 1 Januari 2016, PSAK 65 telah diperbaharui melalui amandemen PSAK 65 (Revisi 2015), "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 67 (2015) "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain". Amandemen ini, antara lain, memperkenankan entitas-entitas untuk penggunaan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan mereka tersendiri.

Penerapan amandemen PSAK 65 (Revisi 2015) dan PSAK 67 (Revisi 2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anaknya seperti diungkapkan dalam Catatan 1b. Kendali diperoleh bila Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Dengan demikian, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perusahaan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila Perusahaan tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee* termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan.

Perusahaan menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada periode tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Laporan keuangan entitas anak dibuat untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra group yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset, liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah perubahan atas standar dan interpretasi standar akuntansi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia yang relevan pada Grup dan berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017:

- Amandemen PSAK 1 (2015), "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Prakarsa Pengungkapan;
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim";
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja";
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan";
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan - Pengungkapan";
- ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi";
- ISAK 32, "Definisi dan Hirarki Standar Akuntansi Keuangan".

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah tanggal transaksi perbankan terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha periode/tahun berjalan.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>30 September</u>	<u>31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1 Dolar Amerika Serikat	13.492	13.436	13.795
1 Euro Eropa	15.495	14.162	15.070

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7 (Revisi 2010).

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup ("entitas pelapor").

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Revisi 2012), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

i. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi kembali pada setiap akhir periode/tahun keuangan.

Pengakuan awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Grup memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang yaitu kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, bank garansi dan setoran jaminan.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Grup memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi yaitu utang usaha, utang pembiayaan, beban akrual, setoran jaminan (yang disajikan sebagai bagian dari setoran dari pelanggan), utang lain-lain - pihak berelasi, utang bank dan utang sewa pembiayaan jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Grup memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Grup menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
- Tingkat 2: teknik valuasi dimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan
- Tingkat 3: teknik valuasi dimana seluruh input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

v. Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

vi. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Nilai tercatat aset keuangan diturunkan melalui penggunaan pos penyisihan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Grup. Jika, pada periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos penyisihan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba atau rugi.

vii. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir, atau (2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berliabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*passthrough*"; dan baik (a) Grup telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

f. Instrumen Keuangan (lanjutan)

vii. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat.

h. Aset Tetap

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap".

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan amandemen PSAK 16 (Revisi 2015) "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi". Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 bahwa pendapatan mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang berdasarkan pada pendapatan tidak dapat digunakan.

Penerapan amandemen PSAK 16 (Revisi 2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tarif	Tahun
Helikopter	6,25%	16
Rangka helikopter	8,33%	12
Perlengkapan helikopter	10%	10
Peralatan dan perabotan kantor	25%	4

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Aset Tetap (lanjutan)

Entitas Anak menghitung penyusutan untuk mesin helikopter dengan metode jam pemakaian, berdasarkan basis estimasi durasi pemakaian atas mesin helikopter sejumlah 3.000 jam.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian di periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pengeluaran yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti biaya perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Dalam situasi dimana dapat dibuktikan secara jelas bahwa pengeluaran tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis yang diharapkan diperoleh dari penggunaan aset tetap tersebut di masa datang yang melebihi kinerja normalnya, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, nilai residu, manfaat ekonomis dan metode penyusutan dievaluasi, dan jika sesuai keadaan, disesuaikan secara prospektif.

i. Sewa

Grup menerapkan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa".

Grup mengklasifikasikan sewa sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

Sewa Pembiayaan - Entitas Anak sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa pembiayaan. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi periode/tahun berjalan.

Aset sewa pembiayaan yang dimiliki oleh Entitas Anak disusutkan secara konsisten dengan metode yang sama dengan aset kepemilikan langsung, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur masa manfaat sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Entitas Anak akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Sewa Pembiayaan - Entitas Anak sebagai Lessee (lanjutan)

Dalam hal Entitas Anak tidak menggunakan hak opsi untuk membeli aset sewa pembiayaan maka selisih antara nilai buku aset sewa pembiayaan dengan nilai buku utang sewa pembiayaan diakui sebagai laba atau rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode/tahun berjalan.

Sewa Operasi - Entitas Anak sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Dengan demikian, pembayaran sewa dalam sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset". Perubahan PSAK 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset" adalah tentang pengungkapan atas nilai terpulihkan untuk aset nonkeuangan. Perubahan ini menghilangkan pengungkapan tertentu untuk nilai terpulihkan atas Unit Penghasil Kas yang disyaratkan oleh PSAK 48 melalui penerbitan PSAK 68.

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar dari nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ada, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut diakui sebagai laba rugi, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

k. Anjak Piutang

Anjak piutang dengan *recourse* diakui sebagai utang pembiayaan sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi, diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), "Pendapatan".

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Pendapatan jasa diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Jasa yang sudah diberikan namun belum ditagih kepada pelanggan dicatat sebagai pendapatan dan piutang usaha belum ditagih (*unbilled services*). Jasa yang sudah diberikan dan ditagih kepada pelanggan dicatat sebagai pendapatan dan piutang usaha sudah ditagih (*billed services*).

Kas yang telah diterima tetapi jasa belum diberikan kepada pelanggan diakui sebagai uang muka pelanggan dan dicatat sebagai bagian dari akun "Setoran dari Pelanggan".

Kas yang telah diterima atau hak yang telah diperoleh dari pelanggan sebagai setoran jaminan atas sewa pemakaian helikopter dicatat sebagai setoran jaminan dan disajikan sebagai bagian dari akun "Setoran dari Pelanggan".

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

m. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK revisi ini juga menghapuskan pengaturan mengenai pajak final.

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" yang memberikan opsi dalam akuntansi untuk entitas yang memilih untuk menerapkan pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak untuk memilih menggunakan PSAK 25 (pendekatan umum) atau menggunakan ketentuan khusus dalam paragraf 10 sampai dengan 23 dari PSAK 70 (pendekatan opsional).

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas atau penghasilan komprehensif lain. Dalam hal ini, pajak tersebut diakui langsung pada ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode/tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode/tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada periode saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Grup bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Imbalan Kerja

Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan amandemen PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja" tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja".

Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebagai liabilitas pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan pasca kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau,
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

o. Laba per Saham

Grup menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011), "Laba per Saham".

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode/tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 34.405 saham untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 250 saham untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Perubahan jumlah saham tanpa mengubah sumber daya diperlakukan secara retrospektif, sehingga jumlah saham yang beredar pada tahun yang disajikan sebelumnya disesuaikan secara proporsional seolah-olah perubahan jumlah saham tersebut telah terjadi sejak permulaan periode paling awal yang disajikan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

p. Informasi Segmen

Grup menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" yang mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Informasi Segmen (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, informasi segmen pada laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pelayanan sebagai segmen geografis. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 28.

q. Provisi

Grup menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi", yang menetapkan kriteria pengakuan dan dasar pengukuran untuk provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, dan untuk memastikan bahwa informasi yang memadai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian untuk memungkinkan pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi ini sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

r. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

s. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian serta pengungkapan liabilitas kontinjensi. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode/tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya adalah Rupiah.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2f.

Sewa

Grup mempunyai perjanjian sewa dimana Entitas Anak bertindak sebagai *lessee* untuk sewa helikopter, rangka helikopter, mesin dan perlengkapan helikopter. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan asset sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2i.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup menyusun asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang usaha, Grup mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang usaha yang secara khusus diidentifikasi ragu-ragu untuk ditagih. Tingkat cadangan ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Grup menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia dan situasi-situasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, lama hubungan Grup dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mengakui pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang Grup ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih. Pencadangan secara spesifik ini ditelaah dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai piutang usaha dan piutang usaha dapat tertagih seluruhnya sehingga manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

Estimasi Umur Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap (kecuali mesin helikopter) disusutkan berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya, sedangkan untuk biaya perolehan mesin helikopter disusutkan dengan metode jam pemakaian. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2h, yang merupakan umur ekonomis dan metode jam pemakaian yang secara umum berlaku dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai buku aset tetap pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 148.235.974.581, Rp 89.841.840.489 dan Rp 78.360.807.994. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 7.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Seperti dijelaskan pada Catatan 2n, hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Dikarenakan kompleksitas dari penilaian, asumsi dan periode jangka panjang, kewajiban manfaat pasti sangat sensitif terhadap perubahan asumsi. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 91.273.865, Rp 112.304.571 dan Rp 65.365.851. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 17.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan. Nilai tercatat utang pajak penghasilan badan pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 271.676.786, Rp 104.692.480 dan Rp 59.431.064. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 12a.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Kas - Rupiah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Bank			
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.258.411.147	763.846.104	332.530.702
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.766.340.017	32.970.010	2.688.044.967
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.942.888	19.030.068	5.297.062
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.545.930	3.691.789.200	571.611.764
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	6.307.240	6.595.120	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	4.317.184	13.537.184	12.986.684
PT Bank Central Asia Tbk	1.355.000	1.675.000	-
PT Bank Bukopin Tbk	1.310.042	3.500.308.259	-
Dolar Amerika Serikat			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.393.801.382	4.252.795.404	1.058.784.770
PT Bank Pan Indonesia Tbk	29.323.490	178.952.718	24.382.915
PT Bank OCBC NISP Tbk	19.494.995	19.997.336	21.342.796
Euro Eropa			
PT Bank Pan Indonesia Tbk	97.584.062	-	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.427.318	3.053.561	3.249.374
Jumlah bank	8.891.160.695	12.484.549.964	4.718.231.034
Jumlah kas dan bank	8.911.160.695	12.504.549.964	4.738.231.034

Semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak ketiga.

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat saldo kas dan bank yang dijamin atau dibatasi penggunaannya.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian piutang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Piutang usaha belum ditagih (<i>unbilled services</i>):			
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	8.603.491.770	-	-
Piutang usaha sudah ditagih (<i>billed services</i>):			
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	20.677.001.800	-	-
Perusahaan di Indonesia	12.837.931.708	3.419.574.013	4.318.809.848
Perkumpulan	1.469.278.800	-	-
Sub-jumlah	34.984.212.308	3.419.574.013	4.318.809.848
Jumlah	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848

b. Berdasarkan umur

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	41.186.958.154	1.782.903.112	1.005.412.500
Telah jatuh tempo:			
1 sampai dengan 30 hari	1.866.462.724	1.615.818.861	1.723.106.208
31 sampai dengan 60 hari	534.283.200	20.852.040	1.590.291.140
Jumlah	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848

c. Berdasarkan mata uang

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Rupiah	29.368.904.070	37.492.040	35.570.500
Dolar Amerika Serikat	14.218.800.008	3.382.081.973	4.283.239.348
Jumlah	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, piutang usaha dijaminan atas fasilitas pembiayaan anjak piutang yang diperoleh dari PT PPA Finance dan PT BNI Multifinance (Catatan 11).

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan piutang usaha tersebut dapat tertagih seluruhnya (Catatan 35f).

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini merupakan pembayaran di muka atas asuransi helikopter untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kepada perusahaan asuransi pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 949.646.506, Rp 904.311.803 dan Rp 728.445.072 pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

7. ASET TETAP

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

	2017			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	43.839.980.900	-	-	43.839.980.900
Mesin	-	1.995.565.916	-	1.995.565.916
Peralatan dan perabotan kantor	359.140.914	33.500.000	-	392.640.914
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	38.764.300.000	98.460.234.000	38.764.300.000	98.460.234.000
Rangka helikopter	13.150.000.000	-	-	13.150.000.000
Mesin	5.084.163.876	-	-	5.084.163.876
Perlengkapan helikopter	3.627.654.910	-	-	3.627.654.910
Jumlah biaya perolehan	104.825.240.600	100.489.299.916	38.764.300.000	166.550.240.516
Akumulasi penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	5.023.331.145	2.054.999.105	-	7.078.330.250
Mesin	-	206.507.813	-	206.507.813
Peralatan dan perabotan kantor	211.318.835	66.352.462	-	277.671.297
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	1.817.076.562	1.523.599.844	1.817.076.562	1.523.599.844
Rangka helikopter	4.109.375.000	821.875.000	-	4.931.250.000
Mesin	3.126.998.045	202.534.044	-	3.329.532.089
Perlengkapan helikopter	695.300.524	272.074.118	-	967.374.642
Jumlah akumulasi penyusutan	14.983.400.111	5.147.942.386	1.817.076.562	18.314.265.935
Nilai buku	89.841.840.489			148.235.974.581

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2016			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	43.839.980.900	-	-	43.839.980.900
Peralatan dan perabotan kantor	349.995.914	9.145.000	-	359.140.914
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	24.245.000.000	38.764.300.000	24.245.000.000	38.764.300.000
Rangka helikopter	13.150.000.000	-	-	13.150.000.000
Mesin	5.084.163.876	-	-	5.084.163.876
Perlengkapan helikopter	3.627.654.910	-	-	3.627.654.910
Jumlah biaya perolehan	90.296.795.600	38.773.445.000	24.245.000.000	104.825.240.600
Akumulasi penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	2.283.332.339	2.739.998.806	-	5.023.331.145
Peralatan dan perabotan kantor	120.058.607	91.260.228	-	211.318.835
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	4.040.833.333	1.943.352.604	4.167.109.375	1.817.076.562
Rangka helikopter	3.013.541.666	1.095.833.334	-	4.109.375.000
Mesin	2.145.686.628	981.311.417	-	3.126.998.045
Perlengkapan helikopter	332.535.033	362.765.491	-	695.300.524
Jumlah akumulasi penyusutan	11.935.987.606	7.214.521.880	4.167.109.375	14.983.400.111
Nilai buku	78.360.807.994			89.841.840.489
2015				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya perolehan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	-	43.839.980.900	-	43.839.980.900
Peralatan dan perabotan kantor	294.501.289	55.494.625	-	349.995.914
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	24.245.000.000	-	-	24.245.000.000
Rangka helikopter	13.150.000.000	-	-	13.150.000.000
Mesin	5.084.163.876	-	-	5.084.163.876
Perlengkapan helikopter	-	3.627.654.910	-	3.627.654.910
Jumlah biaya perolehan	42.773.665.165	47.523.130.435	-	90.296.795.600
Akumulasi penyusutan				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Helikopter	-	2.283.332.339	-	2.283.332.339
Peralatan dan perabotan kantor	36.812.662	83.245.945	-	120.058.607
<u>Aset sewa pembiayaan</u>				
Helikopter	2.525.520.833	1.515.312.500	-	4.040.833.333
Rangka helikopter	1.917.708.333	1.095.833.333	-	3.013.541.666
Mesin	1.538.925.563	606.761.065	-	2.145.686.628
Perlengkapan helikopter	-	332.535.033	-	332.535.033
Jumlah akumulasi penyusutan	6.018.967.391	5.917.020.215	-	11.935.987.606
Nilai buku	36.754.697.774			78.360.807.994

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pada bulan Januari 2017, PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, dan operator helikopter dari Malaysia menyetujui untuk membatalkan perjanjian sewa pembiayaan (Catatan 16) karena ketidaksesuaian spesifikasi helikopter dengan tujuan operasional Komala. Sehubungan dengan pembatalan perjanjian tersebut, Komala mengakui rugi pembatalan transaksi sewa pembiayaan sebagai berikut:

	30 September 2017
Nilai buku utang sewa pembiayaan (Catatan 16)	33.760.863.864
Kompensasi uang muka perolehan suku cadang yang diberikan oleh operator helikopter dari Malaysia (Catatan 8)	2.825.918.000
Nilai buku aset sewa pembiayaan	(36.947.223.438)
Rugi pembatalan transaksi sewa pembiayaan	(360.441.574)

Rugi pembatalan transaksi sewa pembiayaan disajikan sebagai beban operasi lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada bulan Februari 2016, Komala memutuskan untuk tidak menggunakan hak opsi untuk membeli helikopter sesuai perjanjian sewa pembiayaan dengan operator helikopter dari Thailand (Catatan 16) sehingga helikopter yang dibukukan sebagai aset sewa pembiayaan dikembalikan dan diperhitungkan dengan utang sewa pembiayaan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Komala mengakui laba penyelesaian transaksi sewa pembiayaan sebagai berikut:

	31 Desember 2016
Nilai buku utang sewa pembiayaan (Catatan 16)	23.098.024.204
Nilai buku aset sewa pembiayaan	(20.077.890.625)
Laba penyelesaian transaksi sewa pembiayaan (Catatan 23)	3.020.133.579

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	5.081.589.924	5.202.577.544	7.123.261.652	5.833.774.270
Beban usaha (Catatan 22)	66.352.462	65.624.234	91.260.228	83.245.945
Jumlah	5.147.942.386	5.268.201.778	7.214.521.880	5.917.020.215

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan.

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya kepada perusahaan asuransi pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) pada tanggal 30 September 2017 dan PT Tugu Pratama Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar EUR 6.000.000, USD 8.500.000 dan USD 8.000.000. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016 dan 2015, helikopter dari kepemilikan langsung digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka panjang (Catatan 15).

Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, dan 2015, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara atau dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap pada tanggal 30 September 2017 telah diungkapkan dalam Catatan 29a.

Pada tanggal 30 September 2017, berdasarkan penelaahan atas estimasi umur manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan atas estimasi masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap.

Berdasarkan penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan ("KJPP"), penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, dalam laporannya No. RSR-K/R/A.091117.01 tanggal 9 November 2017, nilai wajar helikopter milik Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 158.747.700.000. Metode penilaian yang digunakan oleh penilai independen adalah metode rekonsiliasi pendekatan biaya dan pendekatan pasar. Berdasarkan laporan KJPP tersebut, tidak terdapat penurunan nilai atas jumlah tercatat helikopter pada tanggal 30 September 2017.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat kondisi atau peristiwa yang mengindikasikan penurunan nilai atas jumlah tercatat aset tetap pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

8. UANG MUKA PEROLEHAN ASET TETAP DAN SUKU CADANG

Rincian uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pihak ketiga			
Aset tetap			
- Mesin	7.733.439.548	3.955.626.956	1.977.378.642
- Helikopter	1.271.594.400	37.374.945.788	49.025.374.545
Suku cadang	3.178.986.000	-	-
Jumlah	12.184.019.948	41.330.572.744	51.002.753.187

Mesin

Akun ini merupakan uang muka dari PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, kepada pemasok pihak ketiga sehubungan dengan kesepakatan perjanjian penggantian mesin helikopter milik Komala pada saat mencapai jumlah jam mesin tertentu.

Rincian uang muka perolehan mesin adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
VNG Holding Pte. Ltd., Singapura	5.156.384.568	-	-
Turbomeca Asia Pacific Pte. Ltd., Singapura	2.577.054.980	3.955.626.956	1.977.378.642
Jumlah	7.733.439.548	3.955.626.956	1.977.378.642

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PEROLEHAN ASET TETAP DAN SUKU CADANG (lanjutan)

Mutasi uang muka perolehan mesin adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Saldo awal	3.955.626.956	1.977.378.642	1.977.378.642	1.323.352.642
Penambahan uang muka	5.773.378.508	844.703.812	1.978.248.314	654.026.000
Reklasifikasi ke aset tetap (Catatan 7)	(1.995.565.916)	-	-	-
Saldo akhir	7.733.439.548	2.822.082.454	3.955.626.956	1.977.378.642

Manajemen memperkirakan penggantian mesin akan terjadi antar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Helikopter

Akun ini merupakan uang muka dari Komala kepada pemasok pihak ketiga sehubungan dengan pemesanan helikopter. Uang muka tersebut akan direklasifikasikan ke aset tetap pada saat helikopter tersebut diterima oleh Komala atau dikembalikan oleh pemasok dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan pemesanan.

Rincian uang muka perolehan helikopter adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Leonardo S.p.a., Italia (Catatan 29a)	1.271.594.400	-	-
Pemasok luar negeri lainnya	-	37.374.945.788	49.025.374.545
Pemasok dalam negeri	-	-	-
Jumlah	1.271.594.400	37.374.945.788	49.025.374.545

Mutasi uang muka perolehan helikopter adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Saldo awal	37.374.945.788	49.025.374.545	49.025.374.545	26.255.764.480
Pembayaran uang muka	1.271.594.400	-	-	39.756.897.500
Pengembalian uang muka	-	(7.170.554.159)	(7.511.928.757)	(4.104.522.955)
Reklasifikasi ke aset tetap (Catatan 7)	(37.374.945.788)	(4.138.500.000)	(4.138.500.000)	(12.882.764.480)
Saldo akhir	1.271.594.400	37.716.320.386	37.374.945.788	49.025.374.545

Manajemen memperkirakan uang muka perolehan helikopter akan diselesaikan pada akhir tahun 2018.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA PEROLEHAN ASET TETAP DAN SUKU CADANG (lanjutan)

Suku cadang

Akun ini merupakan kompensasi yang diperoleh Komala sehubungan dengan pembatalan perjanjian sewa pembiayaan dengan operator helikopter dari Malaysia berupa nota kredit untuk pembelian suku cadang helikopter sebesar EUR 200.000 atau setara dengan Rp 3.178.986.000 pada tanggal 30 September 2017.

Mutasi uang muka perolehan suku cadang adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Saldo awal	-	-	-	-
Penambahan dari kompensasi pembatalan perjanjian sewa pembiayaan (Catatan 7)	2.825.918.000	-	-	-
Laba selisih kurs	353.068.000	-	-	-
Saldo akhir	3.178.986.000	-	-	-

Manajemen memperkirakan uang muka perolehan suku cadang akan diselesaikan pada tahun 2018.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian uang muka perolehan aset tetap dan suku cadang.

9. SETORAN JAMINAN

Akun ini merupakan setoran jaminan atas sewa operasi dan pembiayaan helikopter kepada pihak ketiga yang akan dikembalikan pada saat berakhirnya masa sewa, dengan rincian sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Sewa operasi	2.833.320.000	-	-
Sewa pembiayaan (Catatan 16)	1.136.773.603	-	606.980.000
Jumlah	3.970.093.603	-	606.980.000

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Operator helikopter dari Vietnam (Catatan 29b)	17.710.990.225	-	-
Pemasok dalam negeri	2.749.245.415	1.711.222.072	3.447.021.985
Pemasok luar negeri lainnya	67.056.895	-	2.628.229.860
Jumlah	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845

b. Berdasarkan umur

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Belum jatuh tempo	8.704.346.030	1.301.519.792	5.435.163.845
Telah jatuh tempo:			
1 sampai dengan 30 hari	8.746.043.286	409.702.280	640.088.000
31 sampai dengan 60 hari	3.076.903.219	-	-
Jumlah	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845

c. Berdasarkan mata uang

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Dolar Amerika Serikat	20.460.235.640	1.301.519.792	3.481.788.938
Euro Eropa	67.056.895	409.702.280	2.593.462.907
Jumlah	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, utang usaha tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Grup atas perolehan utang usaha.

11. UTANG PEMBIAYAAN

Akun ini merupakan utang pembiayaan modal kerja anjak piutang yang terdiri dari:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
PT BNI Multifinance	24.979.986.174	9.961.716.250	3.000.000.000
PT PPA Finance	7.548.435.000	14.963.910.000	14.096.454.401
Jumlah	32.528.421.174	24.925.626.250	17.096.454.401

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

PT BNI Multifinance

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja dengan Cara Anjak Piutang tanggal 10 Agustus 2017, PT BNI Multifinance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang *with recourse* kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 25.000.000.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah selama 1(satu) tahun sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun. Pada tanggal 30 September 2017, jumlah saldo fasilitas pembiayaan anjak piutang adalah sebesar Rp 24.979.986.174. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha Entitas Anak (Catatan 5), tanah milik pihak berelasi dan jaminan pribadi dari Direktur Entitas Anak.

Berdasarkan Perjanjian Modal Kerja dengan Cara Anjak Piutang tanggal 9 September 2016, PT BNI Multifinance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang *with recourse* kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah selama 1(satu) tahun sampai dengan tanggal 9 September 2017 dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah saldo fasilitas pembiayaan anjak piutang adalah sebesar Rp 9.961.716.250. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha Entitas Anak (Catatan 5) dan jaminan pribadi dari Direktur Entitas Anak.

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Anjak Piutang tanggal 17 Desember 2015, PT BNI Multifinance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang *with recourse* kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3.000.000.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah selama 1(satu) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo fasilitas pembiayaan anjak piutang adalah sebesar Rp 3.000.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha Entitas Anak (Catatan 5) dan jaminan pribadi dari Direktur Entitas Anak.

PT PPA Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Anjak Piutang tanggal 1 Desember 2016, PT PPA Finance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang *with recourse* kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah pembiayaan sebesar USD 1.110.000 atau setara dengan Rp 14.963.910.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun. Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah saldo fasilitas pembiayaan anjak piutang masing-masing adalah sebesar Rp 7.548.435.000 dan Rp 14.963.910.000. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha Entitas Anak (Catatan 5) dan jaminan pribadi dari Direktur Entitas Anak.

Berdasarkan Surat Penawaran Fasilitas Pembiayaan tanggal 5 Oktober 2015, PT PPA Finance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan anjak piutang *with recourse* kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 15.000.000.000. Jangka waktu fasilitas tersebut adalah selama 1 (satu) tahun dan dikenakan tingkat suku bunga sebesar 17% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah saldo fasilitas pembiayaan anjak piutang adalah sebesar Rp 14.096.454.401. Fasilitas ini dijamin dengan piutang usaha Entitas Anak (Catatan 5) dan jaminan pribadi dari Direktur Entitas Anak.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
<u>Perusahaan</u>			
Pajak penghasilan badan			
Periode/tahun berjalan	19.437.125	54.987.689	10.907.750
Tahun 2016 (Catatan 12b)	46.408.630	-	-
Pajak penghasilan lainnya:			
Pasal 21	37.600	189.000	-
Pasal 25	-	8.180.811	-
Pasal 4 (2)	-	65.105.755	-
<u>Entitas Anak</u>			
Pajak penghasilan badan			
Periode/tahun berjalan	205.831.031	49.704.791	48.523.314
Tahun 2013	-	-	-
Pajak penghasilan lainnya:			
Pasal 21	32.998.281	13.683.851	17.192.024
Pasal 25	8.781.528	5.591.100	1.784.550
Pajak Pertambahan Nilai	253.971.488	1.512.372.485	131.774.787
Jumlah	567.465.683	1.709.815.482	210.182.425

b. Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan terdiri dari:

	Periode sembilan bulan yang		Tahun yang berakhir pada	
	berakhir pada tanggal-tanggal		tanggal-tanggal 31 Desember	
	30 September		2016	2015
	2017	2016	2016	2015
Pajak kini				
Perusahaan	(19.437.125)	(63.265.375)	(63.168.500)	(10.907.750)
Entitas Anak	(1.161.875.750)	(701.947.500)	(1.216.264.250)	(882.977.372)
Jumlah pajak kini	(1.181.312.875)	(765.212.875)	(1.279.432.750)	(893.885.122)
Pajak tangguhan				
Perusahaan	3.122.903	-	-	-
Entitas Anak	250.273.602	(54.815.602)	(66.415.917)	632.961.614
Jumlah pajak tangguhan	253.396.505	(54.815.602)	(66.415.917)	632.961.614
Beban pajak penghasilan - neto	(927.916.370)	(820.028.477)	(1.345.848.667)	(260.923.508)

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran laba fiskal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.171.130.326	4.050.490.833	5.725.988.564	4.351.974.537
Dikurangi: laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan - Entitas Anak	(4.027.700.831)	(3.966.474.942)	(5.642.747.792)	(4.264.151.803)
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan - Perusahaan	143.429.495	84.015.891	83.240.772	87.822.734
Beda waktu: Imbalan kerja	12.491.613	-	-	-
Beda tetap: Laba pelepasan entitas anak	(397.800)	-	-	-
Penghasilan keuangan	(25.816)	(464.910)	(464.910)	(560.151)
Beban yang tidak dapat dikurangkan	-	422.572.815	422.572.815	-
Laba selisih kurs	-	-	-	-
Taksiran laba fiskal periode/tahun berjalan - Perusahaan	155.497.492	506.123.796	505.348.677	87.262.583
Taksiran laba fiskal periode/tahun berjalan - Perusahaan (dibulatkan)	155.497.000	506.123.000	505.348.000	87.262.000
Taksiran laba fiskal periode/tahun berjalan - Entitas Anak	4.647.503.000	2.807.790.000	4.865.057.000	3.720.491.000

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan, seperti yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran laba fiskal untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Beban pajak penghasilan kini:				
Perusahaan	19.437.125	63.265.375	63.168.500	10.907.750
Entitas Anak	1.161.875.750	701.947.500	1.216.264.250	882.977.372
Jumlah beban pajak penghasilan kini	1.181.312.875	765.212.875	1.279.432.750	893.885.122
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:				
Perusahaan	-	(8.180.811)	(8.180.811)	-
Entitas Anak	(956.044.719)	(688.896.825)	(1.166.559.459)	(834.454.058)
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	(956.044.719)	(697.077.636)	(1.174.740.270)	(834.454.058)
Utang pajak penghasilan badan:				
Perusahaan	19.437.125	55.084.564	54.987.689	10.907.750
Entitas Anak	205.831.031	13.050.675	49.704.791	48.523.314
Jumlah utang pajak penghasilan badan	225.268.156	68.135.239	104.692.480	59.431.064

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Taksiran laba fiskal hasil rekonsiliasi untuk periode sembilan bulan berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi.

Taksiran laba fiskal Perusahaan hasil rekonsiliasi untuk tahun 2016 dan 2015 menjadi dasar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang telah dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Utang pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun 2016 sebesar Rp 54.987.689 telah dibayar dan dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 16 September 2017 dan 8 Januari 2018 masing-masing sebesar Rp 8.579.059 dan Rp 46.408.630 (Catatan 12a).

Tidak terdapat Surat Ketetapan Pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 25% atas laba sebelum beban pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.171.130.326	4.050.490.833	5.725.988.564	4.351.974.537
Dikurangi: laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan - Entitas Anak	(4.027.700.831)	(3.966.474.942)	(5.642.747.792)	(4.264.151.803)
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan - Perusahaan	<u>143.429.495</u>	<u>84.015.891</u>	<u>83.240.772</u>	<u>87.822.734</u>
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	17.928.687	10.501.986	10.405.097	10.977.842
Pengaruh pajak penghasilan dari beda tetap	<u>(1.614.465)</u>	<u>52.763.389</u>	<u>52.763.403</u>	<u>(70.092)</u>
Beban pajak penghasilan:				
Perusahaan	16.314.222	63.265.375	63.168.500	10.907.750
Entitas Anak	911.602.148	756.763.102	1.282.680.167	250.015.758
Jumlah	<u>927.916.370</u>	<u>820.028.477</u>	<u>1.345.848.667</u>	<u>260.923.508</u>

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>1 Januari 2017</u>	<u>Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>30 September 2017</u>
Perusahaan				
Imbalan pasca kerja	-	3.122.903	592.470	3.715.373
Entitas Anak				
Imbalan pasca kerja	28.076.143	5.413.838	(14.386.887)	19.103.094
Penyusutan aset tetap	(371.179.101)	244.859.764	-	(126.319.337)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - neto	(343.102.958)	250.273.602	(14.386.887)	(107.216.243)
Jumlah		253.396.505	(13.794.417)	
	<u>1 Januari 2016</u>	<u>Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi</u>	<u>Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>31 Desember 2016</u>
Entitas Anak				
Imbalan pasca kerja	16.341.463	6.788.360	4.946.320	28.076.143
Penyusutan aset tetap	(297.974.824)	(73.204.277)	-	(371.179.101)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - neto	(281.633.361)	(66.415.917)	4.946.320	(343.102.958)
	<u>1 Januari 2015</u>	<u>Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi</u>	<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Entitas Anak				
Imbalan pasca kerja	54.571.164	(35.867.879)	(2.361.822)	16.341.463
Penyusutan aset tetap	(966.804.317)	668.829.493	-	(297.974.824)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - neto	(912.233.153)	632.961.614	(2.361.822)	(281.633.361)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pengampunan Pajak

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak ("SPH") kepada Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") pada tanggal 30 Desember 2016, selanjutnya KPP telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk Perusahaan dengan No. KET-2567/PP/WPJ.05/2017 tanggal 4 Januari 2017.

PT Komala Indonesia, Entitas Anak, telah menyampaikan SPH kepada KPP pada tanggal 9 Desember 2016, selanjutnya KPP telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk Entitas Anak dengan No. KET-52760/PP/WPJ.05/2016 tanggal 13 Desember 2016.

Administrasi

Grup menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri ("*self assessment*"). Sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

13. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari akrual untuk:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Bunga	820.662.443	161.232.000	651.712.195
Operasional dan pemeliharaan	768.946.644	-	-
Gaji dan tunjangan karyawan	463.780.720	120.000.000	-
Sewa helikopter	243.167.400	-	-
Jasa profesional	185.000.000	-	-
Asuransi karyawan	99.556.885	-	-
Transportasi dan perjalanan dinas	90.286.030	-	-
Lain-lain	113.864.838	86.819.573	27.023.019
Jumlah	2.785.264.960	368.051.573	678.735.214

Bunga

Pada tanggal 30 September 2017, akrual bunga terutama merupakan akrual bunga pembiayaan dari PT PPA Finance yang telah dilunasi seluruhnya pada bulan Oktober 2017.

Operasional dan pemeliharaan

Pada tanggal 30 September 2017, akrual operasional dan pemeliharaan merupakan akrual biaya pemeliharaan atas helikopter yang sedang dalam proses pemeliharaan sampai dengan tanggal 30 September 2017. Tagihan biaya pemeliharaan tersebut telah diterima dan dilunasi seluruhnya pada bulan Oktober 2017. Tidak terdapat akrual biaya pemeliharaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 karena biaya pemeliharaan tersebut telah dilunasi.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. SETORAN DARI PELANGGAN

Akun ini terdiri dari:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pihak ketiga			
Setoran jaminan (Catatan 2l)	11.151.138.000	1.209.240.000	1.241.550.000
Uang muka pelanggan (Catatan 2l)	1.913.687.900	1.356.643.414	519.976.268
Jumlah	13.064.825.900	2.565.883.414	1.761.526.268

Rincian setoran dari pelanggan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Dolar Amerika Serikat	11.151.138.000	1.209.240.000	1.241.550.000
Rupiah	1.913.687.900	1.356.643.414	519.976.268
Jumlah	13.064.825.900	2.565.883.414	1.761.526.268

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Saldo awal periode/tahun	21.103.145.912	28.333.798.810	-
Penambahan periode/tahun berjalan	-	-	33.333.893.125
Pembayaran periode/tahun berjalan	(4.802.313.892)	(7.230.652.898)	(5.000.094.315)
Saldo akhir periode/tahun	16.300.832.020	21.103.145.912	28.333.798.810

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 2015/PCC/005 tanggal 2 Februari 2015, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi kepada PT Komala Indonesia, Entitas Anak, dengan jumlah maksimum sebesar USD 2.416.375 untuk pembelian 1 (satu) unit helikopter buatan Airbus Helicopters AS350B3E tahun 2013 No. Seri 7767 dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,75% per tahun. Pinjaman ini dibayar melalui angsuran pokok sebesar USD 40.273 per bulan sejak April 2015 sampai dengan Januari 2020 dan sebesar USD 80.541 pada Februari 2020. Pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit helikopter tersebut di atas, tanah dan bangunan milik pihak berelasi, serta jaminan pribadi dari Komisaris dan Direktur Entitas Anak.

Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Entitas Anak harus memenuhi pembatasan terhadap tindakan tertentu (*negative covenant*) antara lain berkaitan dengan tindakan penggabungan usaha (*merger*), akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga dan pembagian dividen, serta Entitas Anak harus memenuhi rasio keuangan seperti *current ratio*, *debt service coverage ratio* dan *debt to equity ratio*.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Entitas Anak belum dapat memenuhi ketentuan rasio keuangan seperti yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut sehingga seluruh saldo pinjaman disajikan sebagai liabilitas jangka pendek.

Pada tanggal 3 Januari 2018, saldo utang bank jangka panjang telah dilunasi seluruhnya oleh Entitas Anak dengan menggunakan dana hasil operasional Entitas Anak dan Entitas Anak telah memperoleh Surat Keterangan Lunas No. PCC/6/004/R tanggal 4 Januari 2018 dari BNI (Catatan 35g).

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG

Entitas Anak memiliki komitmen sewa pembiayaan sehubungan dengan perolehan helikopter, rangka dan mesin helikopter, serta perlengkapan helikopter dengan jangka waktu sewa mulai dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada berbagai tanggal dengan rincian sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pihak ketiga			
Euro Eropa			
Operator helikopter dari Perancis	32.981.357.380	-	-
Dolar Amerika Serikat			
Perusahaan pembiayaan dari			
Hong Kong	32.071.900.252	-	-
Operator helikopter dari			
Malaysia (Catatan 7)	-	33.760.863.864	-
Operator helikopter dari			
Thailand (Catatan 7)	-	-	23.439.480.503
Rupiah			
PT PPA Finance	11.354.927.779	12.763.343.257	14.365.523.635
Jumlah	76.408.185.411	46.524.207.121	37.805.004.138
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.891.781.768)	(9.922.059.469)	(26.375.007.880)
Bagian jangka panjang	65.516.403.643	36.602.147.652	11.429.996.258

Pembayaran minimum sewa berdasarkan perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Dalam satu tahun	16.630.225.622	12.427.596.000	29.713.215.264
Lebih dari satu tahun tapi tidak lebih dari tiga tahun	52.889.914.245	23.722.941.000	10.666.776.000
Lebih dari tiga tahun	34.501.117.989	15.048.320.000	4.201.137.000
Jumlah pembayaran sewa masa depan	104.021.257.856	51.198.857.000	44.581.128.264
Dikurangi beban keuangan di masa depan	(27.613.072.445)	(4.674.649.879)	(6.776.124.126)
Nilai kini pembayaran minimum sewa	76.408.185.411	46.524.207.121	37.805.004.138
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(10.891.781.768)	(9.922.059.469)	(26.375.007.880)
Bagian jangka panjang	65.516.403.643	36.602.147.652	11.429.996.258

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga tahunan berkisar antara 3% sampai dengan 20% untuk pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, 6% untuk pinjaman dalam mata uang Euro Eropa dan 16% untuk pinjaman dalam mata uang Rupiah.

Sesuai perjanjian sewa pembiayaan antara PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, dengan operator helikopter dari Perancis, serta dengan operator helikopter dari Malaysia, maka Komala melakukan pembayaran setoran jaminan yang dibukukan pada akun setoran jaminan (Catatan 9).

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada karyawan tetap yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja". Imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja tersebut pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sejumlah 5, 6 dan 6 karyawan.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dan liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Pointera Aktuarial Strategis, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 28 November 2017 untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 19 Mei 2017 dan 2 Mei 2016 dan 18 Juni 2015 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

a. Beban Imbalan Pasca Kerja

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Biaya jasa kini	29.718.336	15.265.919	20.354.559	113.756.603
Biaya bunga	4.428.628	5.099.162	6.798.882	21.266.637
Kurtailmen	-	-	-	(259.834.756)
Beban (Manfaat) - Neto	34.146.964	20.365.081	27.153.441	(124.811.516)

b. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Nilai kini kewajiban manfaat pasti	91.273.865	112.304.571	65.365.851

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan manfaat pasti untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Saldo awal periode/tahun	112.304.571	65.365.851	218.284.656
Biayajasa kini	29.718.336	20.354.559	113.756.603
Biaya bunga	4.428.628	6.798.882	21.266.637
Kurtailmen	-	-	(259.834.756)
Pembayaran manfaat	-	-	(18.660.000)
(Keuntungan) kerugian aktuarial	(55.177.670)	19.785.279	(9.447.289)
Saldo akhir periode/tahun	91.273.865	112.304.571	65.365.851

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Saldo awal periode/tahun	112.304.571	65.365.851	218.284.656
Beban (manfaat) periode/tahun berjalan (Catatan 22)	34.146.964	27.153.441	(124.811.516)
Pembayaran periode/tahun berjalan	-	-	(18.660.000)
Kerugian (keuntungan) aktuarial di periode/ tahun berjalan yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	(55.177.670)	19.785.279	(9.447.289)
Saldo akhir periode/tahun	91.273.865	112.304.571	65.365.851

Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Saldo awal periode/tahun	14.323.578	34.108.857	34.108.857	24.661.568
Keuntungan (kerugian) aktuarial di periode/tahun berjalan	55.177.670	(14.838.959)	(19.785.279)	9.447.289
Saldo akhir periode/tahun	69.501.248	19.269.898	14.323.578	34.108.857

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Usia pensiun	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat diskonto per tahun	7,13% - 7,33%	8,30% - 8,49%	9,00% - 9,15%
Tingkat kenaikan gaji	6%	6%	6%
Tingkat mortalita	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Rincian dari nilai kini kewajiban manfaat pasti, defisit program dan penyesuaian pengalaman pada liabilitas program untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan empat tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember			
	2017	2016	2015	2014	2013
Nilai kini kewajiban manfaat pasti	91.273.865	112.304.571	65.365.851	218.284.656	122.761.834
Defisit program	91.273.865	112.304.571	65.365.851	218.284.656	122.761.834
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	(55.177.670)	19.785.279	(9.447.289)	(24.661.568)	-

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti karyawan adalah 19,11 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Kurang dari satu tahun	-	-	-
Antara satu dan dua tahun	-	-	-
Antara dua dan lima tahun	-	-	-
Lebih dari lima tahun	91.273.865	112.304.571	65.365.851
Jumlah	91.273.865	112.304.571	65.365.851

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban manfaat pasti pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, dan 2015:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Kenaikan 1%	(6.736.556)	(9.516.802)	(6.894.434)
Penurunan 1%	7.377.556	10.187.704	7.411.822

Manajemen telah mereviu asumsi yang digunakan dan berpendapat bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk memenuhi liabilitas imbalan pasca kerja Grup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham pada tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Startel Communication	32.053	70%	32.053.000.000
PT Komala Tri Varia	13.737	30%	13.737.000.000
Jumlah	45.790	100%	45.790.000.000

Susunan pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan saham pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Kepemilikan	Jumlah
Edwin Widjaja	225	90%	225.000.000
Leonard Chendra	25	10%	25.000.000
Jumlah	250	100%	250.000.000

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 10 Maret 2017, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH, No. 14 tanggal 13 Maret 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar dari Rp 1.000.000.000 atau 1.000 saham menjadi Rp 46.540.000.000 atau 46.540 saham.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 250.000.000 atau 250 saham menjadi Rp 45.790.000.000 atau 45.790 saham.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sejumlah Rp 45.540.000.000 atau 45.540 saham diambil bagian seluruhnya oleh Edwin Widjaja melalui konversi pinjaman menjadi setoran modal (Catatan 26).

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006574.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 17 Maret 2017.

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 5 Juli 2017, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH, No. 04 tanggal 10 Juli 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pengalihan saham Perusahaan sebagai berikut:

- a. Pengalihan saham milik Edwin Widjaja sebanyak 45.765 saham masing-masing kepada:
 - PT Startel Communication sebanyak 32.053 saham
 - PT Komala Tri Varia sebanyak 13.712 saham
- b. Pengalihan saham milik Leonard Chendra sebanyak 25 saham kepada PT Komala Tri Varia.

Perubahan tersebut telah dilaporkan dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0152494 tanggal 13 Juli 2017.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perjanjian jual beli saham antara Edwin Widjaja dengan PT Startel Communication serta Edwin Widjaja dengan PT Komala Tri Varia telah dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 5 Juli 2017 dan telah dicatat dalam Daftar Surat di Bawah Tangan yang Dibukukan masing-masing No. 22/Dibukukan/VII/2017 dan No. 23/Dibukukan/VII/2017, keduanya tertanggal 10 Juli 2017 oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH, Notaris di Bogor.

Perjanjian jual beli saham antara Leonard Chendra dengan PT Komala Tri Varia telah dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 5 Juli 2017 dan dicatat dalam Daftar Surat di Bawah Tangan yang Dibukukan No. 24/Dibukukan/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 oleh Elizabeth Widyawati Santosa, SH, Notaris di Bogor.

19. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Rincian kepentingan nonpengendali atas masing-masing ekuitas entitas anak pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	30 September 2017	31 Desember	
		2016	2015
PT Komala Indonesia	570.554.993	538.962.399	495.505.991
PT Eksekutif Anugerah Transportasi ("EAT")	-	122.117.800	122.319.680
Jumlah	570.554.993	661.080.199	617.825.671

Perubahan kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak untuk periode/tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Saldo awal periode/tahun	661.080.199	617.825.671	617.825.671	577.744.016
Laba komprehensif	31.592.594	31.989.166	43.254.528	40.081.655
Pelepasan entitas anak EAT	(122.117.800)	-	-	-
Pendirian entitas anak EAT	-	-	-	-
Saldo akhir periode/tahun	570.554.993	649.814.837	661.080.199	617.825.671

20. PENDAPATAN

Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pemakaian helikopter	82.553.027.642	43.252.683.640	61.344.007.039	41.617.789.560
Tagihan avtur	3.084.060.460	5.010.532.940	5.354.843.190	5.410.876.120
Lain-lain	2.065.875.000	2.522.785.000	4.691.541.600	2.949.806.750
Jumlah	87.702.963.102	50.786.001.580	71.390.391.829	49.978.472.430

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PENDAPATAN (lanjutan)

Seluruh pendapatan dilakukan dengan pihak ketiga.

Rincian pendapatan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	62.917.650.495	23.029.542.445	23.183.278.809	4.788.166.295
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	13.985.509.360	14.651.292.027	19.365.508.747	32.536.414.265
Jumlah	76.903.159.855	37.680.834.472	42.548.787.556	37.324.580.560

Seluruh perjanjian dengan pelanggan yang signifikan telah diungkapkan dalam Catatan 29c.

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Sewa	30.208.044.728	12.205.747.882	15.605.563.184	3.381.499.570
Operasional dan pemeliharaan	24.292.044.855	19.780.813.424	25.720.482.573	13.883.548.628
Penyusutan (Catatan 7)	5.081.589.924	5.202.577.544	7.123.261.652	5.833.774.270
Gaji dan tunjangan karyawan	2.947.285.947	1.670.014.304	2.455.053.957	3.772.979.220
Pengiriman	2.914.860.040	592.901.506	750.919.072	345.509.869
Asuransi	1.224.579.220	1.374.506.304	2.094.544.877	1.885.551.803
Lain-lain	111.681.000	-	80.548.000	442.032.924
Jumlah	66.780.085.714	40.826.560.964	53.830.373.315	29.544.896.284

Rincian pembelian yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
<u>Sewa</u>				
Operator helikopter dari Vietnam (Catatan 29b)	27.466.990.227	9.446.304.029	12.451.960.371	-
<u>Operasional dan pemeliharaan</u>				
Pemasok dari Hong Kong	7.601.003.179	4.959.940.000	7.956.618.250	-
PT Pertamina (Persero)	-	5.507.518.511	7.245.904.723	5.866.411.211
PT Airbus Helicopters Indonesia	-	-	-	3.318.563.880
Jumlah	35.067.993.406	19.913.762.540	27.654.483.344	9.184.975.091

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Gaji dan tunjangan karyawan	1.407.090.681	1.153.665.261	1.812.948.307	1.134.711.508
Pajak dan perijinan	1.009.996.000	938.094.515	1.455.327.775	736.454.978
Transportasi dan perjalanan dinas	671.165.208	593.299.353	832.056.651	1.196.074.002
Jasa profesional	657.555.000	429.083.979	490.845.349	659.723.114
Komunikasi	187.592.857	119.996.144	172.379.353	163.178.264
Listrik dan air	71.327.245	46.867.100	65.787.036	77.986.625
Penyusutan (Catatan 7)	66.352.462	65.624.234	91.260.228	83.245.945
Keperluan kantor	64.860.370	44.473.515	124.275.911	402.828.167
Imbalan (manfaat) pasca kerja (Catatan 17)	34.146.964	20.365.081	27.153.441	(124.811.516)
Sewa (Catatan 26)	25.000.000	-	-	-
Lain-lain	273.771.829	155.890.576	186.932.016	71.392.244
Jumlah	4.468.858.616	3.567.359.758	5.258.966.067	4.400.783.331

23. PENDAPATAN OPERASI LAIN

Rincian pendapatan operasi lain adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan klaim asuransi	1.113.206.991	813.912.977	813.912.977	-
Laba pelepasan entitas anak (Catatan 1b)	397.800	-	-	-
Laba penyelesaian transaksi sewa pembiayaan (Catatan 7)	-	3.020.133.579	3.020.133.579	-
Jumlah	1.113.604.791	3.834.046.556	3.834.046.556	-

24. BIAYA KEUANGAN

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Beban bunga				
Sewa pembiayaan	4.273.301.590	2.438.085.969	3.683.042.390	3.747.127.975
Pembiayaan	3.915.137.827	1.746.194.692	3.593.720.264	2.395.142.068
Utang bank jangka panjang	1.364.888.993	1.487.825.539	2.048.182.861	2.335.480.408
Utang bank	-	-	-	-
Biaya administrasi bank	337.042.245	145.673.831	377.933.549	485.401.423
Jumlah	9.890.370.655	5.817.780.031	9.702.879.064	8.963.151.874

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Perhitungan laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.212.052.969	3.198.525.558	4.336.736.981	4.051.040.229
Rata-rata tertimbang jumlah saham untuk perhitungan laba per saham dasar	34.405	250	250	250
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	93.360	12.794.102	17.346.948	16.204.161

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha yang normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Piutang lain-lain			
Edwin Widjaja	665.301.295	-	-
Telewest Ventures Communication Pte. Ltd., Singapura	-	5.180.085.219	1.990.211.119
Jumlah	665.301.295	5.180.085.219	1.990.211.119
Persentase terhadap jumlah aset	0,30%	3,37%	1,40%
Utang lain-lain			
Edwin Widjaja (Catatan 18)	-	45.540.000.000	45.540.000.000
PT Komala Tri Varia	-	2.500.000	-
Telewest Ventures Communication Pte. Ltd., Singapura	-	-	-
Jumlah	-	45.542.500.000	45.540.000.000
Persentase terhadap jumlah liabilitas	-	31,43%	33,04%

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Beban sewa				
Monica Chendrawati (Catatan 22)	25.000.000	-	-	-
Persentase dari jumlah beban usaha	0,56%	-	-	-

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi: (lanjutan)

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Beban gaji dan tunjangan karyawan				
Imbalan kerja jangka pendek				
Komisaris	147.000.000	117.000.000	156.000.000	144.000.000
Direktur	540.000.000	522.000.000	696.000.000	672.000.000
Imbalan pasca kerja				
Komisaris	-	-	-	-
Direktur	-	-	-	-
Jumlah	687.000.000	639.000.000	852.000.000	816.000.000
Persentase dari jumlah beban gaji dan tunjangan karyawan	15,78%	22,63%	19,96%	16,63%

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham kepada personel manajemen kunci Grup.

Sewa Kantor - Entitas Anak

Pada tanggal 1 September 2017, PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan seluas 310 meter persegi untuk digunakan sebagai kantor, yang terletak di Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No. 1A, Jalan Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dengan Monica Chendrawati, pihak berelasi. Jangka waktu sewa adalah sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2018. Komala diwajibkan untuk membayar sewa sebesar Rp 300.000.000 untuk periode sewa tersebut.

Sewa Kantor - Perusahaan

Pada tanggal 25 September 2017, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa bangunan seluas 24 meter persegi untuk digunakan sebagai kantor, yang terletak di Rukan Grand Aries Niaga Blok E1 No. 1A, Jalan Taman Aries, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dengan Monica Chendrawati, pihak berelasi. Jangka waktu sewa adalah sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 24 September 2018. Perusahaan diwajibkan untuk membayar sewa sebesar Rp 12.500.000 untuk periode sewa tersebut.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Jenis Transaksi
Edwin Widjaja	Direktur	Piutang dan utang tanpa bunga
Telewest Ventures Communication Pte. Ltd., Singapura	Entitas di bawah pengendalian yang sama	Piutang dan utang tanpa bunga
PT Komala Tri Varia	Pemegang saham	Utang tanpa bunga
Komisaris dan Direktur	Manajemen kunci	Imbalan kerja jangka pendek
Monica Chendrawati	Memiliki hubungan keluarga dengan manajemen kunci	Sewa kantor

Seluruh saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam mata uang Rupiah.

Seluruh saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 September 2017		
	USD	Euro	Setara dengan Rupiah
<u>Aset</u>			
Kas dan bank	329.278	6.355	4.543.631.247
Piutang usaha - pihak ketiga	1.053.869	-	14.218.800.008
Bank garansi	104.000	-	1.403.168.000
Setoran jaminan	210.000	71.518	3.970.093.603
Jumlah Aset	1.697.147	77.873	24.135.692.858
<u>Liabilitas</u>			
Utang usaha - pihak ketiga	1.516.472	4.328	20.527.292.535
Setoran dari pelanggan	826.500	-	11.151.138.000
Utang bank	1.208.185	-	16.300.832.020
Utang sewa pembiayaan	2.377.105	2.074.961	65.053.257.632
Jumlah Liabilitas	5.928.262	2.079.289	113.032.520.187
Liabilitas - Neto	(4.231.115)	(2.001.416)	(88.896.827.329)
	31 Desember 2016		
	USD	Euro	Setara dengan Rupiah
<u>Aset</u>			
Kas dan bank	331.330	216	4.454.799.019
Piutang usaha - pihak ketiga	251.718	-	3.382.081.973
Bank garansi	32.000	-	429.952.000
Setoran jaminan	-	-	-
Jumlah Aset	615.048	216	8.266.832.992
<u>Liabilitas</u>			
Utang usaha - pihak ketiga	96.868	28.930	1.711.222.072
Setoran dari pelanggan	90.000	-	1.209.240.000
Utang bank	1.570.642	-	21.103.145.912
Utang sewa pembiayaan	2.512.717	-	33.760.863.863
Jumlah Liabilitas	4.270.227	28.930	57.784.471.847
Liabilitas - Neto	(3.655.179)	(28.714)	(49.517.638.855)

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2015		
	USD	Euro	Setara dengan Rupiah
<u>Aset</u>			
Kas dan bank	80.066	216	1.107.759.855
Piutang usaha - pihak ketiga	310.492	-	4.283.239.348
Bank garansi	32.000	-	441.440.000
Setoran jaminan	44.000	-	606.980.000
Jumlah Aset	466.558	216	6.439.419.203
<u>Liabilitas</u>			
Utang usaha - pihak ketiga	252.395	172.094	6.075.251.845
Setoran dari pelanggan	90.000	-	1.241.550.000
Utang bank	2.053.918	-	28.333.798.810
Utang sewa pembiayaan	1.699.129	-	23.439.480.503
Jumlah Liabilitas	4.095.442	172.094	59.090.081.158
Liabilitas - Neto	(3.628.884)	(171.878)	(52.650.661.955)

Pada tanggal 7 Februari 2018, kurs tengah masing-masing adalah sebesar Rp 13.533 untuk setiap 1 USD dan Rp 16.757 untuk setiap 1 EUR, yang dihitung berdasarkan kurs rata-rata jual dan beli untuk uang kertas asing dan/atau transaksi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 30 September 2017 dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal 7 Februari 2018 tersebut, maka proforma laba selisih kurs dan jumlah laba komprehensif periode berjalan akan menurun sebesar Rp 1.897.995.811.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen Grup berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

	30 September 2017			Jumlah
	Sumatera	Papua	Lain-lain	
Pendapatan	76.903.159.855	3.510.950.000	7.288.853.247	87.702.963.102
Hasil segmen	18.493.439.540	465.179.224	1.964.258.624	20.922.877.388
Beban dan pendapatan yang tidak dapat dialokasikan				
Beban usaha				(4.468.858.616)
Pendapatan operasi lain				1.113.604.791
Beban operasi lain				(360.441.574)
Rugi selisih kurs - neto				(3.173.111.236)
Laba usaha				14.034.070.753
Penghasilan keuangan				27.430.228
Biaya keuangan				(9.890.370.655)
Beban pajak penghasilan - neto				(927.916.370)
Laba periode berjalan				3.243.213.956
Penghasilan komprehensif lain - neto				41.383.253
Jumlah laba komprehensif periode berjalan				3.284.597.209
ASET				
Aset segmen	175.210.926.885	11.762.439.890	2.075.062.000	189.048.428.775
Aset yang tidak dapat dialokasikan				30.862.355.304
Jumlah Aset				219.910.784.079
LIABILITAS				
Liabilitas segmen	140.194.651.051	11.435.672.627	-	151.630.323.678
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				10.750.454.113
Jumlah Liabilitas				162.380.777.791

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen Grup berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2016			Jumlah
	Sumatera	Papua	Lain-lain	
Pendapatan	56.775.049.516	5.130.364.768	9.484.977.545	71.390.391.829
Hasil segmen	14.097.479.652	1.236.621.022	2.225.917.840	17.560.018.514
Beban dan pendapatan yang tidak dapat dialokasikan				
Beban usaha				(5.258.966.067)
Pendapatan operasi lain				3.834.046.556
Rugi selisih kurs - neto				(726.338.368)
Laba usaha				15.408.760.635
Penghasilan keuangan				20.106.993
Biaya keuangan				(9.702.879.064)
Beban pajak penghasilan - neto				(1.345.848.667)
Laba tahun berjalan				4.380.139.897
Penghasilan komprehensif lain - neto				(14.838.959)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan				4.365.300.938
ASET				
Aset segmen	79.053.763.566	12.993.356.747	129.683.640	92.176.803.953
Aset yang tidak dapat dialokasikan				61.556.582.279
Jumlah Aset				153.733.386.232
LIABILITAS				
Liabilitas segmen	79.789.636.025	12.891.806.513	-	92.681.442.538
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				52.224.416.815
Jumlah Liabilitas				144.905.859.353

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen Grup berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember 2015			Jumlah
	Sumatera	Papua	Lain-lain	
Pendapatan	45.536.763.430	2.629.300.000	1.812.409.000	49.978.472.430
Hasil segmen	19.582.284.022	114.209.217	737.082.907	20.433.576.146
Beban dan pendapatan yang tidak dapat dialokasikan				
Beban usaha				(4.400.783.331)
Rugi selisih kurs - neto				(2.738.247.816)
Laba usaha				13.294.544.999
Penghasilan keuangan				20.581.412
Biaya keuangan				(8.963.151.874)
Beban pajak penghasilan - neto				(260.923.508)
Laba tahun berjalan				4.091.051.029
Penghasilan komprehensif lain - neto				7.085.467
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan				4.098.136.496
ASET				
Aset segmen	66.068.805.076	13.074.935.582	10.820.000	79.154.560.658
Aset yang tidak dapat dialokasikan				63.155.617.596
Jumlah Aset				142.310.178.254
LIABILITAS				
Liabilitas segmen	68.163.954.918	15.071.302.432	-	83.235.257.350
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan				54.612.694.963
Jumlah Liabilitas				137.847.952.313

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PERJANJIAN PENTING

a. Perjanjian Pembelian Helikopter

Pada tanggal 18 September 2017, PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Penjualan Pendahuluan (*Preliminary Sale Contract*) dengan Leonardo S.p.a ("Leonardo"), Italia, untuk pembelian helikopter dari Leonardo dengan harga pembelian sebesar EUR 4.848.800. Harga pembelian tersebut harus dilunasi pada saat helikopter dikirim kepada Komala. Manajemen memperkirakan pengiriman helikopter akan dilakukan pada akhir tahun 2018. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Komala harus membayar uang muka pemesanan sebesar EUR 80.0000 pada tanggal 28 September 2017 dan sebesar EUR 200.000 pada bulan November 2017. Pada tanggal 30 September 2017, jumlah uang muka yang telah dibayar oleh Komala adalah sebesar EUR 80.000 atau setara dengan Rp 1.271.594.400 dan disajikan sebagai uang muka perolehan helikopter (Catatan 8).

b. Perjanjian Sewa Helikopter

Pada berbagai tanggal di tahun 2017 dan 2016, Komala mengadakan perjanjian sewa operasi helikopter dengan salah satu operator helikopter di Vietnam untuk menyewa helikopter selama periode sewa tertentu. Jumlah pembayaran sewa kepada operator tersebut untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 27.466.990.227, Rp 9.446.304.029 dan Rp 12.451.960.371 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan - Beban Sewa" (Catatan 21), sedangkan saldo utang usaha pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar Rp 17.710.990.225 (Catatan 10a).

c. Perjanjian dengan Pelanggan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana ("BNPB")

Entitas Anak memberikan jasa pengadaan helikopter kepada BNPB dalam rangka penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia. Perjanjian pengadaan helikopter dilakukan sesuai dengan transaksi pengadaan yang dilakukan. Jumlah pendapatan atas pemakaian helikopter oleh BNPB untuk periode sembilan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 62.917.650.495, Rp 23.029.542.445, Rp 23.183.278.809 dan Rp 4.788.166.295 (Catatan 20). Pada tanggal 30 September 2017, saldo piutang usaha sudah ditagih dan piutang usaha belum ditagih kepada BNPB masing-masing adalah sebesar Rp 20.677.001.800 dan Rp 8.603.491.770. BNPB telah melunasi seluruh piutang usaha tersebut masing-masing pada bulan November dan Desember 2017 (Catatan 35f).

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Indah Kiat")

Pada tanggal 23 April 2015, Komala menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan dan Penyediaan Helikopter dengan Indah Kiat untuk menyediakan jasa pelayanan dan penyediaan helikopter tipe AS 350 B3e milik Komala selama periode dari tanggal 23 April 2015 sampai dengan 22 April 2018. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis dari Indah Kiat kepada Komala selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian. Jumlah pendapatan atas pemakaian helikopter oleh Indah Kiat untuk periode sembilan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 13.985.509.360, Rp 14.651.292.027, Rp 19.365.508.747 dan Rp 32.536.414.265 (Catatan 20). Pada tanggal 30 September 2017, saldo piutang usaha yang sudah ditagih kepada Indah Kiat adalah sebesar Rp 3.630.998.508. Indah Kiat telah melunasi seluruh piutang usaha tersebut pada bulan Oktober dan November 2017 (Catatan 35f).

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Instrumen keuangan di atas jatuh tempo dalam jangka pendek, maka nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati estimasi nilai wajarnya.

Aset keuangan tidak lancar lainnya

Nilai wajar dari piutang pihak berelasi dan setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutangnya karena instrumen keuangan tersebut tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar utang sewa pembiayaan diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan menggunakan tingkat suku bunga saat ini bagi pinjaman, yang mempersyaratkan risiko kredit dan sisa masa jatuh tempo yang serupa. Nilai wajar dari utang pihak berelasi diasumsikan sama dengan nilai terutangnya karena instrumen keuangan tersebut tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

	<u>30 September</u>	<u>31 Desember</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aset Keuangan			
Aset Keuangan Lancar			
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			
Kas dan bank	8.911.160.695	12.504.549.964	4.738.231.034
Piutang usaha - pihak ketiga	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	122.500.000	122.500.000
Bank garansi	1.403.168.000	429.952.000	441.440.000
Jumlah aset keuangan lancar	<u>53.902.032.773</u>	<u>16.476.575.977</u>	<u>9.620.980.882</u>
Aset Keuangan Tidak Lancar			
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>			
Piutang lain-lain - pihak berelasi	665.301.295	5.180.085.219	1.990.211.119
Setoran jaminan	3.970.093.603	-	606.980.000
Jumlah aset keuangan tidak lancar	<u>4.635.394.898</u>	<u>5.180.085.219</u>	<u>2.597.191.119</u>
Jumlah Aset Keuangan	<u>58.537.427.671</u>	<u>21.656.661.196</u>	<u>12.218.172.001</u>

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015: (lanjutan)

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			
<u>Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>			
Utang usaha - pihak ketiga	20.527.292.535	1.711.222.072	6.075.251.845
Utang pembiayaan	32.528.421.174	24.925.626.250	17.096.454.401
Beban akrual	2.785.264.960	368.051.573	678.735.214
Setoran jaminan	11.151.138.000	1.209.240.000	1.241.550.000
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	16.300.832.020	21.103.145.912	28.333.798.810
Sewa pembiayaan	10.891.781.768	9.922.059.469	26.375.007.880
Jumlah liabilitas keuangan jangka pendek	94.184.730.457	59.239.345.276	79.800.798.150
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			
<u>Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>			
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	45.542.500.000	45.540.000.000
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Sewa pembiayaan	65.516.403.643	36.602.147.652	11.429.996.258
Jumlah liabilitas keuangan jangka panjang	65.516.403.643	82.144.647.652	56.969.996.258
Jumlah Liabilitas Keuangan	159.701.134.100	141.383.992.928	136.770.794.408

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Grup terdiri dari utang usaha, utang pembiayaan, beban akrual, utang lain-lain kepada pihak berelasi, utang bank dan utang sewa pembiayaan jangka panjang. Grup juga mempunyai aset keuangan yang terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, bank garansi, piutang lain-lain kepada pihak berelasi dan setoran jaminan. Tujuan utama dari instrumen keuangan ini adalah untuk membiayai kegiatan operasional Grup.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi, pengembangan bisnis serta untuk mengelola risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup yaitu risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko kegagalan rekanan dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit yang dihadapi Grup terutama berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengurangi risiko ini, Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya, memiliki kondisi keuangan yang kuat serta terbukti mempunyai reputasi dan sejarah kredit yang baik. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang ingin bertransaksi secara kredit harus tunduk pada prosedur verifikasi kredit. Grup memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk pelanggan tertentu dan mengharuskan adanya setoran jaminan untuk pelanggan tertentu. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan belum dapat melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menindaklanjuti melalui jalur hukum. Berdasarkan pada penilaian Grup, penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk meringankan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran kredit kepada pelanggan jika terjadi keterlambatan dan/atau gagal bayar dan akan menggunakan setoran jaminan sebagai pembayaran atas gagal bayar tersebut.

Grup juga menghadapi risiko kredit yang berasal dari penempatan dana di bank dalam bentuk rekening saldo bank. Untuk mengatasi risiko ini, Grup memiliki kebijakan untuk menempatkan dananya hanya di bank-bank yang mempunyai reputasi yang baik.

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Grup pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

	30 September	31 Desember	
	2017	2016	2015
Pinjaman yang diberikan dan piutang			
Kas dan bank	8.911.160.695	12.504.549.964	4.738.231.034
Piutang usaha - pihak ketiga	43.587.704.078	3.419.574.013	4.318.809.848
Piutang lain-lain - pihak ketiga	-	122.500.000	122.500.000
Bank garansi	1.403.168.000	429.952.000	441.440.000
Setoran jaminan	3.970.093.603	-	606.980.000
Jumlah	57.872.126.376	16.476.575.977	10.227.960.882

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut memberikan kualitas kredit dan analisis umur aset keuangan Grup sesuai dengan peringkat kredit pelanggan pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015:

	30 September 2017					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Belum Mengalami Penurunan Nilai			Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penu- runan Nilai	
		Sampai dengan 30 hari	31 hari sampai dengan 60 hari	Lebih dari 60 hari		
Pinjaman yang diberikan dan piutang						
Kas dan bank	8.911.160.695	-	-	-	-	8.911.160.695
Piutang usaha- pihak ketiga	41.186.958.154	1.866.462.724	534.283.200	-	-	43.587.704.078
Bank garansi	1.403.168.000	-	-	-	-	1.403.168.000
Setoran jaminan	3.970.093.603	-	-	-	-	3.970.093.603
Jumlah aset keuangan	55.471.380.452	1.866.462.724	534.283.200	-	-	57.872.126.376
	31 Desember 2016					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Belum Mengalami Penurunan Nilai			Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penu- runan Nilai	
		Sampai dengan 30 hari	31 hari sampai dengan 60 hari	Lebih dari 60 hari		
Pinjaman yang diberikan dan piutang						
Kas dan bank	12.504.549.964	-	-	-	-	12.504.549.964
Piutang usaha - pihak ketiga	1.782.903.112	1.615.818.861	20.852.040	-	-	3.419.574.013
Piutang lain-lain - pihak ketiga	122.500.000	-	-	-	-	122.500.000
Bank garansi	429.952.000	-	-	-	-	429.952.000
Jumlah aset keuangan	14.839.905.076	1.615.818.861	20.852.040	-	-	16.476.575.977
	31 Desember 2015					Jumlah
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Telah Jatuh Tempo tetapi Belum Mengalami Penurunan Nilai			Telah Jatuh Tempo dan Mengalami Penu- runan Nilai	
		Sampai dengan 30 hari	31 hari sampai dengan 60 hari	Lebih dari 60 hari		
Pinjaman yang diberikan dan piutang						
Kas dan bank	4.738.231.034	-	-	-	-	4.738.231.034
Piutang usaha - pihak ketiga	1.005.412.500	1.723.106.208	1.590.291.140	-	-	4.318.809.848
Piutang lain-lain - pihak ketiga	122.500.000	-	-	-	-	122.500.000
Bank garansi	441.440.000	-	-	-	-	441.440.000
Setoran jaminan	606.980.000	-	-	-	-	606.980.000
Jumlah aset keuangan	6.914.563.534	1.723.106.208	1.590.291.140	-	-	10.227.960.882

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit instrumen keuangan dikelola oleh Grup menggunakan peringkat kredit internal. Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai “Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai” meliputi instrumen dengan kualitas kredit tinggi karena ada sedikit atau tidak ada pengalaman kegagalan (*default*) pada kesepakatan berdasarkan surat kuasa, surat jaminan atau *promissory note*. “Telah jatuh tempo tetapi belum mengalami penurunan nilai” adalah akun-akun dengan pengalaman kegagalan (*default*) yang sering namun demikian jumlah terhutang masih tertagih. Terakhir, “Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai” adalah akun yang telah lama belum dilunasi dan telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang.

b. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan risiko fluktuasi nilai wajar dari arus kas masa depan yang berasal dari instrumen keuangan akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing secara terus menerus sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing.

Jumlah aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Catatan 27.

Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba periode/tahun berjalan dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kenaikan 1%	(888.985.708)	(586.201.884)	(495.176.327)	(526.506.562)
Penurunan 1%	888.985.708	586.201.884	495.176.327	526.506.562

c. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan tingkat suku bunga pasar terutama terkait dengan utang pembiayaan, utang bank jangka panjang dan utang sewa pembiayaan. Fluktuasi tingkat suku bunga mempengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Grup yang dikenakan tingkat suku bunga mengambang.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai formal atas risiko tingkat suku bunga. Untuk pinjaman bank, Grup berusaha mengurangi risiko tingkat suku bunga dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan tingkat suku bunga kompetitif. Untuk utang pembiayaan dan sewa pembiayaan, Grup mengelola risiko tingkat suku bunga dengan mengalihkannya kepada para pelanggan. Grup melakukan pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Grup.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga

Analisis Sensitivitas

Pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016, 31 Desember 2016 dan 2015, jika tingkat suku bunga turun/naik sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2017 dan 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 akan lebih tinggi/rendah masing-masing sebesar Rp 1.252.374.386, Rp 948.363.612, Rp 925.529.793 dan Rp 832.352.573.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan liabilitas keuangan.

Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan bank yang mencukupi untuk memungkinkan Grup memenuhi komitmen terhadap kewajiban likuiditas dan operasi normal Grup. Selain itu, Grup juga melakukan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas kontraktual (tidak termasuk pembayaran bunga) pada tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015.

	30 September 2017				
	Jumlah	Jatuh tempo			
		Dalam 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Utang usaha - pihak ketiga	20.527.292.535	20.527.292.535	-	-	-
Utang pembiayaan	32.528.421.174	32.528.421.174	-	-	-
Beban akrual	2.785.264.960	2.785.264.960	-	-	-
Setoran jaminan	11.151.138.000	11.151.138.000	-	-	-
Utang bank jangka panjang	16.300.832.020	16.300.832.020	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	76.408.185.411	10.891.781.768	38.718.505.081	26.797.898.562	-
Jumlah liabilitas keuangan	159.701.134.100	94.184.730.457	38.718.505.081	26.797.898.562	-
	31 Desember 2016				
	Jumlah	Jatuh tempo			
		Dalam 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Utang usaha - pihak ketiga	1.711.222.072	1.711.222.072	-	-	-
Utang pembiayaan	24.925.626.250	24.925.626.250	-	-	-
Beban akrual	368.051.573	368.051.573	-	-	-
Setoran jaminan	1.209.240.000	1.209.240.000	-	-	-
Utang bank jangka panjang	21.103.145.912	21.103.145.912	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	46.524.207.121	9.922.059.469	22.232.888.685	14.369.258.967	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	45.542.500.000	-	45.542.500.000	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	141.383.992.928	59.239.345.276	67.775.388.685	14.369.258.967	-

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

d. Risiko likuiditas

	31 Desember 2015				
	Jumlah	Jatuh tempo			
		Dalam 1 tahun	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Utang usaha - pihak ketiga	6.075.251.845	6.075.251.845	-	-	-
Utang pembiayaan	17.096.454.401	17.096.454.401	-	-	-
Beban akrual	678.735.214	678.735.214	-	-	-
Setoran jaminan	1.241.550.000	1.241.550.000	-	-	-
Utang bank jangka panjang	28.333.798.810	28.333.798.810	-	-	-
Utang sewa pembiayaan	37.805.004.138	26.375.007.880	7.697.805.363	3.732.190.895	-
Utang lain-lain - pihak berelasi	45.540.000.000	-	45.540.000.000	-	-
Jumlah liabilitas keuangan	136.770.794.408	79.800.798.150	53.237.805.363	3.732.190.895	-

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mengeluarkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama periode/tahun penyajian.

32. TRANSAKSI NONKAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Perolehan aset tetap - helikopter melalui utang sewa pembiayaan	61.085.288.212	34.625.800.000	34.625.800.000	-
Penambahan modal saham dari konversi utang lain-lain - pihak berelasi	45.540.000.000	-	-	-
Reklasifikasi uang muka perolehan aset tetap - helikopter ke aset tetap	37.374.945.788	4.138.500.000	4.138.500.000	12.882.764.480
Reklasifikasi uang muka perolehan aset tetap - mesin ke aset tetap	1.995.565.916	-	-	-
Perolehan aset tetap - perlengkapan helikopter melalui utang sewa pembiayaan	-	-	-	3.627.654.910

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. TUJUAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

34. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan standar akuntansi baru dan revisi, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 2 (2016), "Laporan Arus Kas" tentang Prakarsa Pengungkapan;
- Amandemen PSAK 46 (2016), "Pajak Penghasilan" tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi;
- PSAK 69, "Agrikultur";
- Amandemen PSAK 16 (2016), "Aset Tetap" tentang Agrikultur: Tanaman Produktif.
- Amandemen PSAK 62 (2017), "Kontrak Konstruksi".
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan".
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- PSAK 73, "Sewa".

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar baru dan revisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan ("RUPSLB")

- RUPSLB - 20 November 2017

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 20 November 2017, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, SH, No. 18 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa dan penyewaan alat transportasi udara.
- ii. Perubahan Direktur dan Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 20 November 2017 menjadi sebagai berikut:
Komisaris : Gouw Erene Goetama
Direktur: Edwin Widjaja

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0024465.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 22 November 2017.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan ("RUPSLB") (lanjutan)

- RUPSLB - 22 Desember 2017

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai Notaris pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, serta dinyatakan dalam Akta No. 31 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 46.540.000.000 atau 46.540 saham menjadi Rp 220.000.000.000 atau 220.000 saham.
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dari Rp 45.790.000.000 atau 45.790 saham menjadi Rp 56.900.000.000 atau 56.900 saham.
- iii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sebesar Rp 11.110.000.000 diambil bagian secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham melalui:

- Kapitalisasi saldo laba sampai dengan tanggal 31 Desember 2016	7.860.000.000
- Setoran tunai para pemegang saham	<u>3.250.000.000</u>

Jumlah **11.110.000.000**

- iv. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham setelah adanya peningkatan modal tersebut di atas menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Disetor Penuh	Jumlah Saham Ditempatkan dan	Persentase Kepemilikan	Jumlah
PT Startel Communication		39.830	70%	39.830.000.000
PT Komala Tri Varia		17.070	30%	17.070.000.000
Jumlah		<u>56.900</u>	<u>100%</u>	<u>56.900.000.000</u>

Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028099.AH.01.02.Tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan ("RUPSLB") (lanjutan)

- RUPSLB - 5 Januari 2018

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 5 Januari 2018, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 6 pada tanggal yang sama, para pemegang saham Perusahaan menyetujui dan memutuskan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- i. Perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka.
- ii. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan perubahan-perubahan lainnya.
- iii. Perubahan nilai nominal per saham yaitu semula sebesar Rp 1.000.000 menjadi Rp 100.
- iv. Pengeluaran saham dalam simpanan Perusahaan sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100, disertai sebanyak-banyaknya 125.000.000 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai saham tersebut, melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.
- v. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Utama : Gouw Erene Goetama	Direktur Utama : Edwin Widjaja
Komisaris Independen : Benny Sidarta	Direktur Independen : Erwin Budi Satria

Perubahan anggaran dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000129.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018 dan telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0003516 dan No. AHU-AH.01.03-0003517 masing-masing tanggal 5 Januari 2018.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Seluruh Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 21 Desember 2017, para pemegang saham Perusahaan menyetujui dan memutuskan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan persetujuan dan menerima serta meratifikasi laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, dan 2008 serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun-tahun buku tersebut sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun buku tersebut.
- Menyetujui saldo laba Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 7.916.446.680 digunakan masing-masing sebesar Rp 56.446.680 sebagai penyisihan untuk cadangan sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan sebesar Rp 7.860.000.000 sebagai laba ditahan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

c. Pembagian Dividen Interim

Berdasarkan Keputusan Direksi, Persetujuan Dewan Komisaris dan Pernyataan Pemegang Saham Perusahaan tanggal 21 Desember 2017, para pemegang saham, Direktur dan Komisaris Perusahaan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Direktur Perusahaan memutuskan dan Komisaris Perusahaan menyetujui pembagian dividen tunai interim sebesar Rp 3.250.000.000 yang berasal dari laba interim periode berjalan sampai dengan tanggal 30 September 2017.
- Para pemegang saham, Komisaris dan Direktur Perusahaan menyatakan sebagai berikut:
 - i. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham wajib mengembalikan seluruh dividen interim yang telah diterimanya dalam jumlah penuh paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang menyetujui laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 - ii. Dalam hal pemegang saham Perusahaan tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Komisaris dan Direktur bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan karena pembagian dividen interim tersebut.
 - iii. Sehubungan dengan rencana penawaran saham umum perdana Perusahaan kepada masyarakat, maka para pemegang saham, Komisaris dan Direktur Perusahaan menegaskan untuk membebaskan pemegang saham masyarakat atau publik dari gugatan dan/atau tuntutan apapun, kerugian dan/atau kewajiban membayar suatu ganti kerugian apapun dalam bentuk dan cara apapun serta yang ditimbulkan sehubungan dengan pembagian dividen interim.

Selanjutnya, dividen interim ini telah dibayarkan secara penuh kepada para pemegang saham pada tanggal 21 Desember 2017.

d. Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KOM-JT/SK/II/2018-01 tanggal 5 Januari 2018, Perusahaan telah membentuk Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Benny Sidarta
Anggota : Agus Cahyo Baskoro
Anggota : M. Ghufron

e. Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DIR-JT/SK/II/2018-01 tanggal 5 Januari 2018, Direktur memutuskan pengangkatan Erwin Budi Satria sebagai Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No. DIR-JT/SK/II/2018-02 tanggal 5 Januari 2018, Direktur memutuskan pengangkatan Rahmad Hidayat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perusahaan.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

f. Pelunasan Piutang Usaha

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana ("BNPB")

PT Komala Indonesia ("Komala"), Entitas Anak, telah memperoleh pelunasan piutang usaha dari BNPB atas piutang usaha yang sudah ditagih per 30 September 2017 sebesar Rp 20.677.001.800 pada bulan November 2017.

Komala telah memperoleh pelunasan piutang usaha dari BNPB atas piutang usaha yang belum ditagih per 30 September 2017 sebesar Rp 8.603.491.770 pada bulan Desember 2017.

- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Indah Kiat")

Komala telah memperoleh pelunasan piutang usaha dari Indah Kiat atas piutang usaha yang sudah ditagih per 30 September 2017 sebesar Rp 3.630.998.508 pada bulan Oktober dan November 2017.

- PT Berkah Bumi Semesta ("BBS")

Komala telah memperoleh pelunasan piutang usaha dari BBS atas piutang usaha yang sudah ditagih per 30 September 2017 sebesar Rp 8.601.150.000 pada bulan November 2017.

g. Pelunasan Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 3 Januari 2018, Komala telah melunasi seluruh saldo utang bank jangka panjang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), selanjutnya atas pelunasan tersebut BNI telah menerbitkan Surat Keterangan Lunas No. PCC/6/004/R tanggal 4 Januari 2018 (Catatan 15). Pelunasan tersebut berasal dari sumber dana internal Komala.

h. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas yang dinyatakan dalam Akta No. 13 tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diubah berdasarkan Akta No. 16 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, sehubungan dengan penjaminan emisi efek Perusahaan dalam rangka rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham disertai dengan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 125.000.000.

i. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pada tanggal 22 Januari 2018, Perusahaan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum saham perdana Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan sebanyak-banyaknya 250.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan sebanyak-banyaknya 125.000.000 Waran Seri I yang diterbitkan melalui penawaran umum saham perdana kepada masyarakat.

PT JAYA TRISHINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal-tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit) dan
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
30 September 2017 (Diaudit) dan 2016 (Tidak Diaudit) dan
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Diaudit)
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan laporan auditor independen No. 0095/T&T-GA/JT-1/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor independen. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan perubahan atas penyesuaian penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta perubahan pada laporan arus kas konsolidasian dan tambahan pengungkapan pada Catatan 7, 35 dan 36 atas laporan keuangan konsolidasian.